



LAPORAN PRAKTIKUM KOMUNITAS

PROGRAM STUDI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL

PELAKSANAAN PROGRAM CERDAS MEMILAH DAN MENGELOLA

SAMPAH: MENUJU LINGKUNGAN PEDULI SAMPAH, BERSIH, DAN SEHAT

DI RW 06 KAMPUNG SALAPINANG, DESA CAMPAKA, KECAMATAN

MALANGBONG, KABUPATEN GARUT

PEMBIMBING :

Rosilawati, S.Sos., MPS.Sp

Oleh :

Vidella Setya Kanti Utomo

NRP. 20.03.069

POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG

2023

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Pelaksanaan Program Cerdas Memilah Dan Mengelola Sampah: Menuju Lingkungan Peduli Sampah, Bersih, Dan Sehat Di Rw 06 Kampung Salapinang, Desa Campaka, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut

Nama Mahasiswa : Vidella Setya Kanti Utomo

NRP : 20.03.069

Program : Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan

Pembimbing :

Rosilawati, S.Sos., MPS.Sp

Mengetahui :

Ketua Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial
Program Sarjana Terapan
Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

Lina Favourita Sutiaputri, Ph.D

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur praktikan panjatkan kepada Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya, serta dukungan kedua orang tua praktikan dapat menyelesaikan laporan Praktikum Komunitas Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial. Laporan ini merupakan hasil dari kegiatan Praktikum Komunitas Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yang telah dilaksanakan di Desa Campaka, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat selama 42 hari, dimulai pada tanggal 31 Oktober hingga 11 Desember 2023.

Laporan ini berisi hasil asesmen, rencana intervensi, pelaksanaan intervensi, evaluasi, terminasi dan rujukan terhadap masalah yang terdapat dalam Bidang Penataan Lingkungan Desa Campaka, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Praktikan menyadari bahwa laporan ini dapat selesai berkat do'a dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini praktikan menyampaikan terima kasih kepada :

1. Suharma, Ph.D., selaku Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung;
2. Lina Favourita Sutiaputri, Ph.D., selaku Ketua Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Bandung;
3. Dra. Atirista Nainggolan, MP, selaku Kepala Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial;
4. Rosilawati, S.Sos., MPS.Sp., selaku dosen pembimbing Praktikum Komunitas yang telah memberikan bimbingan dan arahnya kepada praktikan;
5. Ade Kamaludin, selaku Kepala Desa Campaka dan jajarannya;
6. Abdul Aziz Jarkasih, selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Desa Campaka dan Pendamping Lapangan Praktikum;
7. Rekan-rekan anggota kelompok 14 yang senantiasa memberikan motivasi selama pelaksanaan praktikum komunitas.
8. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama praktikum komunitas.

Semoga keikhlasan dan kebaikan pihak-pihak tersebut mendapatkan balasan dari Allah SWT. Akhir kata, praktikan menyadari bahwa laporan praktikum ini jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik maupun saran selalu praktikan harapkan demi tercapainya tujuan praktikum ini. Demikian laporan ini disusun, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi praktikan dan pembaca.

Garut, Desember 2023

Vidella Setya Kanti Utomo

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Praktikum	2
1.3 Manfaat Praktikum	3
1.4 Fokus Praktikum	4
1.5 Waktu dan Lokasi Praktikum.....	4
1.6 Proses Praktikum.....	5
1.7 Sasaran Praktikum.....	5
1.8 Prinsip dan Etika Praktikum	6
1.9 Metode, Strategi, dan Taktik Pekerja Sosial Yang Digunakan	6
1.10 Teknologi Intervensi	8
1.11 Peran Pekerja Sosial	11
1.12 Proses Supervisi	12
1.13 Langkah-langkah Praktikum.....	15
1.14 Sistematika Penulisan Laporan Praktikum	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	22
2.1 Kajian tentang Komunitas/Masyarakat	22
2.2 Kajian terkait Partisipasi Masyarakat	25
2.3 Kajian tentang Desa dan Pemerintahan Desa.....	26
2.4 Kajian tentang Intervensi Pekerjaan Sosial dengan Komunitas.....	34
2.5 Kajian Lingkungan Hidup	44
2.6 Kajian tentang Sampah.....	46
2.7 Kajian Teori tentang Kesadaran Masyarakat.....	51
2.8 Kajian tentang Penataan Lingkungan	52

BAB III PROFIL KOMUNITAS.....	56
3.1 Latar Belakang Desa	56
3.2 Komponen Khusus Masyarakat.....	58
3.3 Kehidupan Interaksi Sosial Masyarakat.....	64
3.4 Identifikasi Potensi dan Sumber.....	65
3.5 Identifikasi Masalah.....	66
BAB IV PELAKSANAAN PRAKTIKUM	68
4.1 Inisiasi Sosial	68
4.2 Pengorganisasian Sosial.....	72
4.3 Asesmen.....	74
4.4 Merumuskan Rencana Intervensi.....	84
4.5 Pelaksanaan Intervensi.....	95
4.6 Evaluasi	97
4.7 Terminasi dan Rujukan	99
BAB V REFLEKSI PELAKSANAAN PRAKTIKUM.....	101
5.1 Pencapaian Tujuan dan Manfaat Praktikum.....	101
5.2 Faktor pendukung dan Faktor Penghambat	102
5.3 Usulan dan Masukan untuk Praktik Pekerjaan Sosial Makro.....	103
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	104
6.1 Kesimpulan	104
6.2 Rekomendasi.....	106
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	110

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. 1 Supervisi Pra Lapangan Ke-1.....	12
Gambar 1. 2 Supervisi Pra Lapangan Ke-2.....	13
Gambar 1. 3 Supervisi Lapangan Ke-1	13
Gambar 1. 4 Supervisi Lapangan Ke-2	14
Gambar 1. 5 Supervisi Lapangan Ke-3	14
Gambar 1. 6 Supervisi Lapangan Ke-4	15
Gambar 1. 7 Dokumentasi Sosialisasi Praktikum.....	15
Gambar 1. 8 Dokumentasi Sosialisasi Pelaksanaan Praktikum	16
Gambar 1. 9 Dokumentasi Pembekalan Praktikum.....	16
Gambar 1. 10 Dokumentasi Pelepasan Praktikan.....	17
Gambar 1. 11 Dokumentasi Penerimaan Praktikan.....	17
Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	32
Gambar 3. 1 Peta Desa Campaka	57
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Desa Campaka	60
Gambar 4. 1 Pertemuan dengan Kepala Desa	70
Gambar 4. 2 Community Involvement Desa Campaka	71
Gambar 4. 3 Transect Walk Desa Campaka	71
Gambar 4. 4 Home Visit ke Tokoh Masyarakat	72
Gambar 4. 7 Wawancara bersama Aparatur Desa.....	75
Gambar 4. 8 Teknik MPA	76
Gambar 4. 9 Asesmen Lanjutan di RW 06 Kp Salapinang	79
Gambar 4. 10 Observasi Sungai yang tertumpuk sampah.....	80
Gambar 4. 11 Analisis Pohon Masalah	83
Gambar 4. 12 Proses Penyusunan Rencana Intervensi.....	86
Gambar 4. 13 Kegiatan Penyuluhan	96
Gambar 4. 14 Kegiatan Workshop.....	97

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3. 1 Batas Wilayah Desa Campaka	57
Tabel 3. 2 Orbitasi Desa Campaka	58
Tabel 3. 3 Potensi dan Sumber	65
Tabel 3. 4 Masalah Sosial yang Tampak	66
Tabel 4. 1 Permasalahan di Desa Campaka Tahun 2023.....	76
Tabel 4. 2 PSKS di Desa Campaka	77
Tabel 4. 3 Struktur TKM Kampung Salapinang Desa Campaka	87
Tabel 4. 4 Sistem Partisipan Program Intervensi.....	89
Tabel 4. 5 Jadwal Program Kegiatan Intervensi	90
Tabel 4. 6 Rundown Kegiatan Penyuluhan dan Workshop.....	91
Tabel 4. 7 Rancangan Anggaran Biaya Program Intervensi	92
Tabel 4. 8 Kebutuhan Perlengkapan Kegiatan.....	93
Tabel 4. 9 Analisis SWOT	94

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Surat Penerimaan Mahasiswa Praktikum	110
Lampiran 2 Surat Undangan Kegiatan MPA.....	111
Lampiran 3 Surat Kegiatan Intervensi	112
Lampiran 4 Surat Undangan kegiatan Lokakarya	113
Lampiran 5 Matriks Kegiatan Praktikum.....	114
Lampiran 6 Daftar Hadir Supervisi	115
Lampiran 7 Daftar Hadir Lapangan.....	115
Lampiran 8 InstrumenProfil Komunitas	116
Lampiran 9 Peta Lokasi Tempat Praktikum	117
Lampiran 10 Skenario Asesmen Awal.....	118
Lampiran 11 Skenario Asesmen Lanjutan	119
Lampiran 12 Skenario Rencana Intervensi	120
Lampiran 13 Daftar Hadir Kegiatan MPA	121
Lampiran 14 Daftar Hadir Asesmen Lanjutan dan TOP.....	122
Lampiran 15 Daftar Hadir Pelaksanaan Intervensi.....	123
Lampiran 16 Daftar Hadir Lokakarya	124
Lampiran 17 Dokumentasi Kegiatan Praktikum 2023.....	125

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan Poltekesos Bandung didirikan dengan tujuan untuk memenuhi, menyediakan, dan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang kesejahteraan sosial yang mempunyai keahlian sebagai analisis jaminan sosial, analisis sumber dana bantuan sosial, analisis pemberdayaan sosial, analisis penataan lingkungan sosial, dan analisis penanggulangan bencana. Dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut, maka salah satu muatan kurikulum Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial adalah menyelenggarakan kegiatan praktikum sebagai karakteristik unggul program studi ini.

Praktikum komunitas dilaksanakan di 14 Desa, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut. Praktikan melaksanakan Praktikum Komunitas di Desa Campaka Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut selama 42 hari dimulai pada tanggal 31 Oktober-11 Desember 2023. Pada praktikum komunitas praktikan bersama dengan 5 rekan lainnya bertempat tinggal di salah satu rumah warga RW 02 RT 02. Pelaksanaan praktikum komunitas menghasilkan beberapa program sesuai dengan 5 profil lulusan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial dengan mengambil satu fokus masalah yang akan dianalisis.

Desa Campaka, yang terletak di Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, memiliki potensi besar untuk menjadi lingkungan yang bersih, sehat, dan peduli terhadap masalah sampah. RW 06 Kampung Salapinang, sebagai bagian integral dari desa ini, menjadi fokus utama untuk mengimplementasikan sebuah inisiatif berkelanjutan yang dapat merubah paradigma pengelolaan sampah di masyarakat.

Seiring dengan pertumbuhan populasi dan perkembangan aktivitas ekonomi di Desa Campaka, volume sampah yang dihasilkan cenderung meningkat secara signifikan. Peningkatan ini memberikan dampak negatif terhadap kebersihan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan ekosistem lokal. Oleh karena itu, diperlukan sebuah intervensi berkelanjutan

yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola sampah dengan cara yang lebih cerdas dan bertanggung jawab.

Melalui program "Pelaksanaan Program Cerdas Memilah dan Mengelola Sampah," diharapkan masyarakat di RW 06 Kampung Salapinang dapat memahami pentingnya memilah sampah, merubah kebiasaan konsumsi, dan mengoptimalkan pengelolaan sampah. Program ini bukan hanya bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran akan peran setiap individu dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Dengan dukungan komunitas dan kerjasama antara pemerintah setempat, organisasi non-pemerintah, serta berbagai pihak terkait, diharapkan program ini dapat menjadi tonggak awal menuju transformasi positif dalam pengelolaan sampah di RW 06 Kampung Salapinang, Desa Campaka, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut.

1.2 Tujuan Praktikum

1.2.1 Tujuan Umum

Tujuan umum praktikum komunitas adalah meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam melakukan intervensi pekerjaan sosial di komunitas sesuai dengan profil lulusan.

1.2.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus praktikum komunitas adalah agar mahasiswa memiliki:

- a. Mengaplikasikan berbagai konsep dan teori praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial di Desa Campaka
- b. Mengimplementasikan pengetahuan, prinsip, nilai, dan etika pekerjaan sosial di dalam praktik pekerjaan sosial dalam pengembangan komunitas di Desa Campaka
- c. Menerapkan kemampuan berkomunikasi dan mengembangkan relasi pertolongan praktik pekerjaan sosial dengan *target group* dan *interest group* di Desa Campaka
- d. Melakukan tahapan pekerjaan sosial dimulai dari inisiasi sosial, pengorganisasian sosial, asesmen, perencanaan intervensi, pelaksanaan intervensi, evaluasi, dan terminasi dan rujukan di Desa Campaka

- e. Melakukan pencatatan dan pelaporan dalam pengembangan Masyarakat lokal di Desa Campaka

1.3 Manfaat Praktikum

Pelaksanaan Praktikum Komunitas memiliki berbagai manfaat yaitu:

1. Mahasiswa

Manfaat praktikum komunitas bagi mahasiswa antara lain:

- a. Memiliki pengalaman praktik intervensi pekerjaan sosial komunitas untuk merintis pengembangan karier professional sebagai pekerja sosial.
- b. Memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan komunitas.
- c. Memahami dan peka terhadap isu-isu penting yang berkaitan dengan kesejahteraan komunitas.

2. Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

Manfaat praktikum komunitas bagi Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung antara lain:

- a. Meningkatnya kualitas kurikulum terapan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Poltekesos Bandung.
- b. Meningkatnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Pekerjaan Sosial dalam pelaksanaan supervisi praktik pekerjaan sosial.
- c. Memperoleh kesempatan untuk mempromosikan profesi dan pendidikan pekerjaan sosial.

3. Masyarakat dan Pemerintah Lokal

Manfaat praktikum komunitas bagi masyarakat dan pemerintah lokal antara lain:

- a. Mendapat masukan tentang peluang-peluang pemanfaatan sistem sumber penyedia pelayanan yang dapat diakses untuk menangani permasalahan sosial dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- b. Mendapat masukan tentang peluang-peluang pengembangan kebijakan di tingkat lokal.

4. Bagi Masyarakat

Manfaat Praktikum Komunitas bagi masyarakat dan antara lain:

- a. Meningkatnya kesadaran dan inisiatif masyarakat untuk menangani permasalahan sosial dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di lingkungannya.

- b. Meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam menangani permasalahan sosial dan pemenuhan kebutuhan serta mengembangkan dan mendayagunakan potensi dan sumber yang ada.

1.4 Fokus Praktikum

Fokus praktikum komunitas adalah praktik intervensi pekerjaan sosial dengan komunitas. Praktikan memfokuskan diri pada salah satu profil lulusan yaitu Analisis Penataan Lingkungan Sosial. Penerima manfaat dari kegiatan praktik intervensi pekerjaan sosial dengan komunitas untuk tujuan pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial dalam rangka pencegahan atau penanganan permasalahan sosial tertentu. Dalam hal ini praktikan mengambil fokus masalah yang menjadi permasalahan utama pengelolaan sampah rumah tangga di RW 06 yaitu terjadi tumpukan sampah di Sungai dan lahan kosong RW 06 Kampung Salapinang.

1.5 Waktu dan Lokasi Praktikum

Lokasi praktikum komunitas dilakukan di Desa Campaka Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut. Praktikum komunitas dilakukan selama 42 Hari sesuai tahapan proses praktikum yaitu :

a. Pra Lapangan

- 1) Sosialisasi Praktikum : 25 Oktober 2023
- 2) Pembekalan : 26-27 Oktober 2023
- 3) Bimbingan Pra Lapangan : 24 Oktober 2023

b. Lapangan

- 1) Pelepasan oleh Direktur : 27 Oktober 2023
- 2) Penerima oleh Bupati : 31 Oktober 2023
- 3) Supervisi I : 12 November 2023
- 4) Supervisi II : 25 November 2023
- 5) Supervisi III : 08 Desember 2023
- 6) Lokakarya : 08 Desember 2023
- 7) Pengakhiran Praktikum : 11 Desember 2023

c. Pasca Lapangan

- 1) Penyusunan Laporan : 10-14 Desember 2023
- 2) Pendaftaran Ujian Lisan : 15 Desember 2023
- 3) Ujian Lisan : 18-19 Desember 2023
- 4) Ujian Kompetensi : 27-28 Desember 2023

1.6 Proses Praktikum

Proses praktikum mengikuti tahap-tahap:

1. Inisiasi sosial (membangun kontak dan kontrak dengan masyarakat);
2. Pengorganisasian sosial;
3. Asesmen;
4. Perumusan rencana intervensi;
5. Pelaksanaan intervensi;
6. Evaluasi; dan
7. Terminasi dan rujukan.

Tahapan setelah inisiasi sosial hingga menjelang terminasi tidak bersifat linier tetapi bersifat sirkuler, dalam artian proses-proses pengorganisasian, asesmen, perencanaan intervensi dapat berkembang meskipun sudah memasuki tahapan intervensi, sesuai dengan perolehan-perolehan informasi baru karena perkembangan situasi atau belum terantisipasi dalam perencanaan sebelumnya. Dengan demikian intervensi pun dapat berkembang sesuai dengan pengembangan rencananya.

1.7 Sasaran Praktikum

Perubahan kemampuan masyarakat dalam mengorganisasikan dan melaksanakan upaya-upaya bersama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, mencegah, dan menangani permasalahan sosial. Dengan demikian, sasaran perubahan dalam praktikum komunitas mencakup :

1. Warga masyarakat: kelompok sasaran (*target groups*) / penerima manfaat upaya perubahan terencana.
2. Berbagai elemen warga masyarakat (tokoh maupun warga masyarakat umum) sebagai kelompok kepentingan (*interest groups*).
3. Berbagai organisasi dan kelembagaan lokal yang relevan dengan isu yang ditangani.
4. Pembuat kebijakan di tingkat pemerintahan lokal, regional, maupun nasional.

1.8 Prinsip dan Etika Praktikum

1. Prinsip
 - a. Bekerja dengan masyarakat;
 - b. Membangun partisipasi masyarakat;
 - c. Pemberdayaan;
 - d. Peka terhadap nilai/budaya masyarakat;
 - e. Terpadu dan berkelanjutan;
 - f. Inklusivitas;
 - g. Konsensus bersama masyarakat;
 - h. Menghargai sumber daya lokal;
 - i. Menitikberatkan pada swadaya masyarakat;
 - j. Pengembangan yang berkeadilan; dan
 - k. *Cultural Humility*.
2. Etika
 - a. Kearifan Lokal;
 - b. Kesetaraan;
 - c. Penghargaan;
 - d. Kolaborasi; dan
 - e. Sinergitas.

1.9 Metode, Strategi, dan Taktik Pekerja Sosial Yang Digunakan

1.9.1 Metode

Praktikan menggunakan metode dalam praktik pekerjaan sosial pada pengembangan komunitas/masyarakat dilakukan dengan metode pekerjaan sosial yang meliputi Pengembangan Masyarakat (*Community Development*) dan Pengembangan Organisasi (*Community Organization*) atau yang disebut dengan *Community Work*.

Community Work adalah proses membantu masyarakat untuk memperbaiki kondisi masyarakat sendiri melalui kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Di dalam metode CO/CD terdapat model-model pendekatan intervensi yang juga dilakukan oleh praktikan antara lain model Pengembangan Lokal (*Locality Development*) atau Pengembangan Komunitas (*Community Development*), Perencanaan Sosial (*Social Planning*) dan Aksi Sosial (*Social Action*). Praktikan menggunakan metode secara kolektif dan menggunakan salah satu pendekatan,

yaitu pengembangan lokal atau komunitas (*Locality Development/Community Development*) dengan menekankan partisipatif aktif dari masyarakat atau kelompok sasaran .

1.9.2 Strategi dan Taktik

Strategi dan taktik dalam intervensi komunitas menurut Netting (2004) dibagi menjadi tiga, yaitu kerjasama (*collaboration*), kampanye sosial (*social campaign*), dan kontes (*contest*). Setiap strategi tersebut memiliki taktik-taktik tersendiri. Berikut merupakan penjelasannya :

a. Kolaborasi (*Collaboration*)

Collaboration yaitu strategi pengembangan masyarakat yang dilakukan jika kelompok sasaran / komunitas sudah memahami apa yang akan dan harus dilakukan. Selain itu, komunitas sasaran sudah memiliki kehendak atau kesepakatan bersama untuk melaksanakan kegiatan yang akan dilakukan. Taktik yang digunakan yaitu implementasi dan *capacity building*. Implementasi yaitu dengan adanya kerjasama yang erat, dengan demikian rencana perubahan dapat diimplementasikan. *Capacity building* yaitu pengembangan kemampuan, taktik ini terdiri dari dua taktik lagi yaitu perluasan partisipasi dan pemberdayaan kelompok-kelompok lemah.

b. Kampanye (*Campaign*)

Kampanye sosial adalah suatu upaya untuk mempengaruhi anggota sistem sasaran agar sistem tersebut menyadari bahwa perubahan memang benar-benar dibutuhkan dan dengan demikian sumber yang dibutuhkan dapat dialokasikan.

Taktik yang digunakan yaitu pendidikan atau penyuluhan, persuasi, dan pemanfaatan media masa. Pendidikan atau penyuluhan adalah taktik yang digunakan untuk tujuan memberikan pemahaman kepada kelompok sasaran agar mereka mampu menerima apa yang akan dilakukan dan bersedia terlibat secara aktif. Persuasi adalah taktik untuk membujuk atau memberikan gambaran bahwa kegiatan yang dilakukan merupakan suatu kegiatan yang sangat bermanfaat. Pemanfaatan media masa yaitu taktik untuk membujuk atau mengubah persepsi kelompok sasaran dengan memanfaatkan media masa yang ada atau media yang mudah diakses oleh kelompok sasaran.

c. Kontes (*Contest*)

Kontes adalah strategi yang dapat dilakukan jika kelompok sasaran mengalami permasalahan yang lebih banyak disebabkan oleh struktur kekuasaan yang menindas, tidak adil, dan merugikan kelompok terbesar dalam masyarakat. Taktik yang digunakan yaitu advokasi serta tawar menawar dan negoisasi. Advokasi adalah taktik yang dilakukan oleh pekerja sosial untuk memperjuangkan kepentingan kelompok sasaran dengan cara menawarkan suatu persyaratan tertentu kepada pihak lain (kelompok dominan, pemerintah daerah, legislatif, atau kelompok lain yang menindas) sebagai pengganti kerugian yang dialami atas dilaksanakannya suatu program tertentu.

1.10 Teknologi Intervensi

1.10.1 Teknik Inisiasi Sosial

Inisiasi sosial adalah kegiatan yang mengawali praktikum komunitas, yang merupakan kegiatan memasuki, melakukan kontak pendahuluan, memahami karakteristik masyarakat, membangun relasi dengan masyarakat hingga terbangun kesiapan dan kesepakatan untuk bekerjasama dalam melakukan pengembangan masyarakat. Kerjasama yang merespon isu penting berkenaan dengan kebutuhan pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial serta pencegahan atau penanganan permasalahan sosial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat.

a. *Community Involvement*

Teknik ini dilakukan untuk membaur bersama masyarakat desa dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat baik formal maupun informal, baik kegiatan individu maupun kelompok. Teknologi ini memudahkan praktikan dalam menciptakan keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi-informasi yang diperlukan pada proses penanganan masalah. Kegiatan yang dilakukan praktikan dengan menggunakan teknik ini adalah kegiatan ialah pengajian mingguan ibu-ibu di beberapa RW, Posyandu, Maulid Nabi, Rapat Kader PKK, dan sebagainya.

b. *Home Visit*

Home Visit atau kunjungan rumah yang merupakan salah satu teknik pengumpul data dengan jalan mengunjungi rumah tokoh masyarakat atau

tokoh pemuda dengan tujuan untuk membangun kepercayaan dan memperoleh informasi yang diperlukan selama praktikum berlangsung. Kunjungan ini dilakukan juga untuk membangun kedekatan secara profesional maupun interpersonal dengan masyarakat di Desa Campaka.

c. *Transect Walk*

Transect walk merupakan salah satu teknik di mana praktikan mengamati langsung kondisi lingkungan di Desa Campaka. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengetahui gambaran wilayah yang menjadi lokasi Praktikum komunitas dengan mengidentifikasi situasi dan kondisi lingkungan dari RW 1 hingga RW 8 di Desa Campaka. Kegiatan ini menghasilkan terjalinnya relasi yang baik antara praktikan dengan sistem sumber yang ada di masing-masing RW tersebut, yakni rumah warga, masjid, tempat makan dan lainnya.

1.10.2 Teknik Pengorganisasian Sosial

Proses pengorganisasian sosial dapat diupayakan dengan mendayagunakan dan menguatkan struktur pengorganisasian masyarakat dan pemimpin lokal yang ada yang memiliki peran relevan atau ower dalam pengembangan masyarakat untuk mencegah maupun mengatasi permasalahan sosial dari populasi target yang disepakati menjadi fokus praktik.

1.10.3 Teknik Asesmen

a. *Community Meeting Forum (CMF)*

Pertemuan masyarakat atau *Community Meeting Forum* merupakan kegiatan non formal berupa forum musyawarah di tingkat RT atau RW yang menjadi wadah untuk melakukan jajak kebutuhan (*need assessment*) maupun guna mengidentifikasi permasalahan sosial dengan melibatkan tokoh masyarakat maupun tokoh pemuda serta kelompok sasaran di Desa Campa. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengetahui sistem sumber yang dapat dilibatkan guna mengatasi isu permasalahan yang ada.

b. *Methodology of Participation Assessment (MPA)*

Teknik *Methodology of Participatory Assessment* atau disebut juga MPA merupakan teknik untuk melakukan asesmen terhadap permasalahan dengan melibatkan masyarakat. Praktikan bersama masyarakat menentukan permasalahan, prioritas masalah, dan potensi yang digunakan untuk menangani permasalahan tersebut.

c. Pohon Masalah

Analisis pohon masalah adalah suatu langkah pemecahan masalah dengan mencari sebab dari suatu akibat. Modul pola kerja terpadu menguraikan pohon masalah sebagai suatu teknik untuk mengidentifikasi semua masalah dalam suatu situasi tertentu dan memperagakan informasi ini sebagai rangkaian hubungan sebab akibat.

d. Observasi dan Wawancara

Observasi dan wawancara digunakan praktikan dalam tahap asesmen lanjutan, tujuan dari menggunakan teknologi ini adalah untuk mendalami informasi yang telah didapatkan oleh praktikan dari tahapan dan kegiatan sebelumnya, selain itu juga digunakan praktikan sebagai media untuk memvalidasi informasi apakah sesuai dengan kenyataan di lapangan.

e. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek ataupun dalam bentuk gambar maupun elektronik.

1.10.4 Teknik Rencana Intervensi

Teknik *Technology of Partisipation* (ToP) adalah teknik perencanaan pengembangan masyarakat secara partisipatif, sehingga seluruh pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mengemukakan gagasan. Praktikan bersama dengan masyarakat menentukan rencana intervensi atau rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk penanganan fokus masalah yang menjadi prioritas di setiap desa tersebut. Praktikan bertindak sebagai fasilitator untuk memperoleh pendapat dan aspirasi masyarakat dalam penanganan masalah sosial yang ada di lingkungan sekitar. Praktikan memperoleh gambaran umum program yang akan direncanakan secara aplikatif. Melalui hal ini, tersusun nama program, tujuan program, bentuk kegiatan, peralatan yang dibutuhkan, rencana evaluasi, terminasi dan rujukan. Rencana ini merupakan pedoman dan langkah langkah praktik intervensi.

1.10.5 Teknik Intervensi

a. Kolaborasi (*Collaboration*)

Kolaborasi merupakan pelaksanaan kerjasama sistem kegiatan dengan pihak masyarakat yang terlibat dengan kelompok sasaran untuk melakukan perubahan

untuk memecahkan masalah yang disepakati dengan alokasi dan distribusi sumber. Dalam prosesnya dilakukan aksi sosial masyarakat, pengembangan kapasitas dengan pengembangan partisipasi dan pemberdayaan.

b. Kampanye (*Campaign*)

Kampanye dilakukan dalam bentuk penyuluhan sosial kepada masyarakat dengan menyampaikan informasi yang selaras dengan isu permasalahan di masyarakat.

1.10.6 Teknik Evaluasi

Teknik evaluasi yang dilakukan pada proses Praktikum Komunitas hendaknya menggunakan evaluasi partisipatif seperti dengan diskusi terfokus. Disamping itu, dapat dilengkapi dengan teknik wawancara mendalam atau pengungkapan pengalaman perubahan.

1.11 Peran Pekerja Sosial

Peran pekerja sosial pada *setting* makro menurut Zastrow (2017) yang relevan dengan ranah kerja pekerja sosial yaitu:

a) Fasilitator (*Facilitator*)

Peran fasilitator adalah peran pekerja sosial dalam membantu individu atau masyarakat dalam berpartisipasi, berkontribusi, dan menyimpulkan apa yang telah dicapai sesuai kebutuhan dan masalah yang dihadapi.

b) Edukatif (*Educator*)

Kategori kedua dari peranan pekerjaan sosial masyarakat adalah peranan edukasional. Jika pada peranan fasilitatif, pekerja terlibat dalam menstimulasi dan mendukung proses-proses masyarakat, maka peranan edukatif menuntut pekerja lebih aktif dalam setting agenda. Peranan seorang pekerja sosial masyarakat terdiri atas peningkatan kesadaran, memberikan informasi, konfrontasi dan pelatihan.

c) Makelar (*Broker*)

Peranan sebagai broker pada prinsipnya adalah “menghubungkan klien dengan sistem sumber”. Pekerja sosial berada di ranah jaringan pelayanan sosial. pemahaman pekerja sosial yang menjadi broker mengenai kualitas pelayanan sosial di sekitar lingkungannya merupakan aspek penting dalam memenuhi keinginan kliennya.

1.12 Proses Supervisi

Supervisi dilaksanakan oleh dosen pembimbing yaitu Ibu Rosilawati selaku dosen pembimbing. Supervisi dilaksanakan baik pada saat pra lapangan, lapangan, hingga pasca lapangan. Supervisi ini dilakukan untuk mengarahkan dan memberikan dukungan kepada praktikan dalam pelaksanaan praktikum komunitas :

1.12.1 Supervisi Pra Lapangan

Supervisi pra lapangan dilaksanakan sebelum kegiatan praktikum dimulai, bertujuan untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan praktikum.

1. Supervisi Pra Lapangan Ke-1

Supervisi pra lapangan pertama dilakukan secara daring pada tanggal 24 Oktober 2023, supervisi pertama melakukan pengenalan antara Dosen Pembimbing yaitu Ibu Rosilawati MPS. Sp dengan mahasiswa praktikan dan membentuk *group whatsapp* untuk mempermudah komunikasi antara pembimbing dengan anggota praktikum.



Gambar 1. 1 Supervisi Pra Lapangan Ke-1

Sumber: Dokumentasi Praktikum Tahun 2023

2. Supervisi Pra Lapangan Ke-2

Supervisi ke-2 dilaksanakan pada hari Kamis, 26 Oktober 2023 dihadiri oleh seluruh anggota kelompok empat belas secara luring. Pertemuan kedua ini memberikan arahan untuk membentuk stuktur kelompok untuk praktikan. Dosen pembimbing yaitu ibu Rosilawati MPS. Sp mengarahkan praktikan untuk memahami pedoman yang telah disampaikan pada saat pembekalan

praktikum komunitas, selanjutnya pembimbing mengarahkan praktikan untuk menyusun matriks dan kajian literatur yang sesuai dengan pelaksanaan praktikum komunitas.



Gambar 1. 2 Supervisi Pra Lapangan Ke-2
Sumber: Dokumentasi Praktikum Tahun 2023

1.12.2 Supervisi Lapangan

1. Supervisi Lapangan Ke-1

Supervisi lapangan dilaksanakan pada 31 Oktober 2023, dosen pembimbing mengarahkan praktikan untuk menyusun profil wilayah atau lokasi praktikum dengan memperhatikan informasi terkait wilayah, isu-isu permasalahan, potensi dan sistem sumber yang terdapat di wilayah praktik.



Gambar 1. 3 Supervisi Lapangan Ke-1

Sumber: Dokumentasi Praktikum Tahun 2023

2. Supervisi Lapangan Ke-2

Supervisi lapangan kedua dilaksanakan pada 12 November 2023 dilakukan secara luring. Dalam pelaksanaan supervisi lapangan ini dosen pembimbing memberikan arahan dan masukan kepada praktikan tentang pelaksanaan kegiatan perencanaan intervensi yang tepat untuk semua fokus masalah yang diambil setiap praktikan. Hasil pelaksanaan supervisi yaitu adanya arahan ataupun

saran dari dosen pembimbing terkait dengan perencanaan intervensi setiap praktikan.



Gambar 1. 4 Supervisi Lapangan Ke-2

Sumber: Dokumentasi Praktikum Tahun 2023

3. Supervisi Lapangan Ke-3

Supervisi lapangan ketiga dilaksanakan pada 25 November 2023 secara luring. Dalam supervisi ini dosen pembimbing membahas tentang pelaksanaan intervensi yang akan dilaksanakan dan sudah dilakukan praktikan kemudian membahas tentang kegiatan terminasi yang akan dilakukan pada tanggal 08 Desember 2023.



Gambar 1. 5 Supervisi Lapangan Ke-3

Sumber: Dokumentasi Praktikum Tahun 2023

4. Supervisi Lapangan Ke-4

Supervisi lapangan dilaksanakan pada 08 Desember 2023. Dalam supervisi ini dosen pembimbing Ibu Rosilawati MPS. Sp beserta Praktikan melakukan tahap terminasi dengan menyerahkan cindra mata dan melaporkan hasil kegiatan praktikum komunitas di Desa Campaka dengan mengadakan lokakarya bersama dengan Kepala Desa Campaka, Perangkat Desa, Ibu TP PKK, Tokoh Masyarakat, dan perwakilan masyarakat Desa Campaka.



Gambar 1. 6 Supervisi Lapangan Ke-4
Sumber: Dokumentasi Praktikum Tahun 2023

1.13 Langkah-langkah Praktikum

Tahapan kegiatan Praktikum dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu pra lapangan, lapangan dan pasca lapangan. Berikut merupakan langkah-langkah praktikum komunitas :

1. Tahap Persiapan

1) Sosialisasi Praktikum

Sosialisasi persiapan praktikum dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2023 pukul 13.00 -15.30 WIB dilakukan secara luring. Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh Ibu Atirista Nainggolan, selaku Kepala Laboratorium, Bapak Eko Gunawan, dan Bapak Indra. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan membahas mengenai persiapan praktikum komunitas dan penjelasan terkait integrasi program ATENSI, pembelajaran di Poltekesos dan Pengelolaan Warung Makan Indomie (Warmindo) bagi penerima manfaat yang nantinya mahasiswa yang melakukan praktikum akan membantu dalam asesmen terintegrasi disampaikan oleh Dr. Yuti Ismudiyati.



Gambar 1. 7 Dokumentasi Sosialisasi Praktikum
Sumber: Dokumentasi Praktikum Tahun 2023

2) Sosialisasi Pelaksanaan Praktikum

Sosialisasi pelaksanaan praktikum dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2023 pukul 15.00-16.30 WIB dilakukan secara luring. Kegiatan sosialisasi Kepala Prodi Lindayasos, Kepala Laboratorium dan jajaran dosen tim prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial serta mahasiswa prodi lindayasos. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan membahas terkait mekanisme pelaksanaan praktikum komunitas yang nantinya akan dilaksanakan.



Gambar 1. 8 Dokumentasi Sosialisasi Pelaksanaan Praktikum
Sumber: Dokumentasi Praktikum Tahun 2023

3) Pembekalan Praktikum

Pembekalan praktikum ketiga dilaksanakan di auditorium Poltekkes Bandung pada tanggal 27 Oktober 2023 pukul 08.30-11.30 WIB. Pembekalan diawali oleh laporan kegiatan praktikum komunitas dari Kepala Prodi Lindayasos. Kemudian, dilanjutkan dengan pemberian materi oleh Drs. H. Aji Sukarmaji, M.Si selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut terkait dengan implementasi kebijakan dan Program Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial, Masalah dan Tantangannya di Kabupaten Garut, dengan sub bahasan, Penyebaran populasi PPKS di Kab.Garut dan Program unggulan dalam meningkatkan layanan bidang kesejahteraan sosial.



Gambar 1. 9 Dokumentasi Pembekalan Praktikum
Sumber: Dokumentasi Praktikum Tahun 2023

2. Tahap Pelaksanaan

1) Pelepasan Praktikan

Pelepasan praktikan dilaksanakan di Aula Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung pada hari Jumat, 27 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB. Kegiatan pelepasan ini dihadiri oleh Direktur Poltekesos Bandung dan seluruh dosen Poltekesos Bandung serta mahasiswa Angkatan 2020 dari tiga prodi, yaitu prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, Prodi Pekerjaan Sosial, dan Prodi Rehabilitasi Sosial. Pada pelepasan praktikum ini, praktikan diharapkan untuk mempersiapkan segala hal yang akan dilakukan selama praktikum berlangsung.



Gambar 1. 10 Dokumentasi Pelepasan Praktikan
Sumber: Dokumentasi Praktikum Tahun 2023

2) Penerimaan Praktikan

Penerimaan praktikan dilaksanakan di Kantor Bupati Garut pada hari Selasa, 31 Oktober 2023 pukul 09.00 WIB. Praktikan diterima langsung oleh Bupati Garut yaitu Bapak H. Rudi Gunawan, S.M, M.H, M.P. Kegiatan Penerimaan praktikan juga dihadiri Bapak Suharna, M.P., Ph.D selaku Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial. Selanjutnya, setelah penerimaan di Pendopo Kantor Bupati Garut. Praktikan juga melakukan penerimaan di Kantor Desa Campaka.



Gambar 1. 11 Dokumentasi Penerimaan Praktikan
Sumber: Dokumentasi Praktikum Tahun 2023

3) Inisiasi Sosial

Kegiatan inisiasi sosial dilaksanakan pada 1 November-4 November 2023 di Desa Campaka yang menjadi lokasi praktikan. Inisiasi sosial dilakukan untuk mendapat penerimaan dari masyarakat desa, mengenal kondisi kehidupan desa, dan mendapat dukungan dari masyarakat desa. Tahapan inisiasi sosial meliputi kegiatan *home visit*, *community involvement*, *transect walk* dan diskusi informal.

4) Pengorganisasian Sosial

Kegiatan pengorganisasian sosial dilaksanakan pada 3 November-8 November 2023. Kegiatan pengorganisasian sosial dilaksanakan dengan mengadakan kegiatan *community meeting* atau rembuk warga. Proses pengorganisasian sosial dilakukan untuk menjalin kepercayaan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda dan organisasi di desa serta memohon dukungan selama proses praktikum di Desa Campaka.

5) Asesmen

Proses asesmen dilaksanakan pada tanggal 9 November-15 November 2023 secara partisipatif yaitu praktikan mengkaji dan menganalisa informasi lebih dalam mengenai permasalahan sosial yang telah dipilih sebagai fokus penanganan menggunakan *Methodology Participatory Assesments* (MPA). Asesmen terbagi menjadi dua tahapan yaitu asesmen awal dan asesmen lanjutan.

6) Perumusan Rencana Intervensi

Perumusan rencana intervensi dilaksanakan pada tanggal 16 November-21 November 2023. Perumusan rencana intervensi sebagai rencana tindak lanjut dengan menggunakan *Technology of Participation* (ToP). Perumusan rencana intervensi pada dasarnya merupakan perencanaan strategis yang mensyaratkan pengumpulan data dan informasi secara luas, eksplorasi alternatif pemecahan masalah, serta implikasi masa depan atas keputusan yang dibuat.

7) Pelaksanaan Intervensi

Pelaksanaan intervensi merupakan kegiatan untuk mengimplemantasikan rencana intervensi yang telah disusun. Secara umum, pelaksanaan intervensi bertujuan mencapai perubahan penting bagi komunitas dengan adanya perbaikan kinerja untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien dalam pemecahan masalah. Kegiatan pelaksanaan intervensi pada tanggal 22 November-5 Desember 2023.

8) Evaluasi

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai apakah tujuan intervensi tercapai atau tidak dan juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaan intervensi. Kegiatan evaluasi dilakukan pada tanggal 5 Desember 2023.

3. Tahap Pengakhiran

1) Terminasi

Terminasi merupakan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan masyarakat atau kelompok sasaran. Tahap ini harus dilakukan karena program sudah harus dihentikan, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Praktikan mengucapkan terimakasih kepada masyarakat telah menerima praktikan dengan baik dan permohonan maaf jika ada kesalahan selama melaksanakan kegiatan praktikum komunitas. Terminasi dilakukan pada tanggal 7 Desember 2023.

2) Rujukan

Rujukan merupakan tindak lanjut dari proses pengakhiran yang membutuhkan keberlanjutan intervensi/proses pertolongan yang sudah dilaksanakan dengan menyalurkan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial atau sistem sumber lain yang dapat melanjutkan proses intervensi.

1.14 Sistematika Penulisan Laporan Praktikum

Sistematika laporan adalah urutan letak dari bagian-bagian yang terdapat didalam sebuah laporan. Berikut merupakan sistematika penulisan laporan Praktikum Institusi Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung:

BAB I PENDAHULUAN : Memuat tentang latar belakang, tujuan praktikum, manfaat praktikum, fokus praktik, sasaran praktik, metode, strategi dan taktik praktik pekerjaan sosial yang digunakan, teknologi praktik pekerjaan sosial makro yang digunakan, peran pekerja sosial dalam praktikum, proses supervisi, langkah-langkah kegiatan praktikum, serta sistematika penulisan laporan praktikum

- BAB II KAJIAN PUSTAKA** : memuat tentang konsep masyarakat/komunitas, partisipasi masyarakat, keamanan lingkungan, sistem pemerintahan lokal, kebijakan dan program dalam pengembangan masyarakat dan kesejahteraan sosial dalam keamanan lingkungan, Praktik Pekerjaan Sosial Makro (definisi, model-model pengembangan masyarakat/ masyarakat, prinsip-prinsip, proses terbentuknya, strategi, taktik, dan teknik, dan peran pekerja sosial).
- BAB III PROFIL KOMUNITAS** : meliputi Latar belakang; Komponen khusus dalam masyarakat; Kehidupan Interaksi Sosial Masyarakat; Identifikasi potensi dan Sumber; Identifikasi permasalahan sosial yang Nampak Identifikasi pemecahan masalah yang telah dilakukan identifikasi apa penyebab kegagalan yang dialami, bagaimana reaksi, masyarakat terhadap upaya pemecahan yang pernah dilakukan, dsb.
- BAB IV PELAKSANAAN PRAKTIKUM** : memuat tentang tahapan praktikum yang dilakukan oleh praktikan mulai dari inisiasi sampai dengan evaluasi.
- BAB V REFLEKSI PELAKSANAAN PRAKTIKUM** : Meliputi pencapaian tujuan dan manfaat praktikum yang dirasakan praktikan, faktor pendukung dan faktor penghambat kegiatan praktikum, usulan, dan masukan untuk praktik pekerjaan sosial khususnya terkait dengan metode dan teknik intervensi komunitas.

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI : Berisi kesimpulan tentang praktikum komunitas, hasil yang telah dan belum dicapai dalam praktikum. Rekomendasi ditujukan kepada pihak mana, isi teknis rekomendasi, serta langkah-langkah untuk melaksanakan rekomendasi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian tentang Komunitas/Masyarakat

2.1.1 Definisi Komunitas/Masyarakat

Komunitas berasal dari bahasa latin "*communitas*" yang berarti kesamaan, kemudian diturunkan menjadi "*communis*" yang berarti "sama, publik, dibagi oleh semua pihak". Menurut Wilkinson dalam *Community as a Social Fields* (1970:317), komunitas adalah tempat orang hidup, mengalami konfigurasi budaya, melakukan tindakan kolektif dan merasakan pengalaman fenomenologis individu. Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin "*socius*" yang berarti (kawan). Menurut Edi Suharto (2010:47) Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan yang sama atau menyatu satu-sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, memiliki perasaan dan biasanya satu tempat yang sama. Ada beberapa fungsi masyarakat: penyedia dan pendistribusian barang-barang dan jasa, lokasi kegiatan bisnis dan pekerjaan, keamanan publik, sosialisasi, wadah dukungan bersama atau gotong royong, kontrol sosial, organisasi dan partisipasi politik.

Masyarakat memiliki dua ruang lingkup, yaitu pengertian dalam arti sempit dan dalam arti luas. Masyarakat dalam arti sempit sering disebut sebagai komunitas, yaitu sekelompok orang yang hidup dan berinteraksi dalam wilayah geografis yang terbatas seperti desa, kecamatan, dusun atau rukun tetangga. Sedangkan dalam arti luas, masyarakat mengacu pada interaksi kompleks dari banyak orang yang memiliki kesamaan minat dan tujuan, meskipun mereka tidak tinggal di wilayah geografis tertentu. Komunitas memiliki pengertian yang hampir sama dengan masyarakat. Komunitas menurut Warren, Komunitas merupakan organisasi kegiatan sosial yang orang mampu mengakses kepada apa yang diperlukan untuk hidup sehari-hari seperti sekolah, toko kelontong, rumah sakit, rumah ibadah dan unit sosial. Sebuah komunitas mungkin atau tidak mungkin memiliki ikatan yang jelas, namun sangat penting diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia (Netting, 2010:127).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa komunitas adalah kumpulan berbagai populasi yang hidup pada waktu tertentu dan di daerah tertentu yang saling berinteraksi. Sedangkan masyarakat adalah sekelompok

orang yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Komunitas berbagi identitas, sikap, wilayah dan budaya yang sama.

2.1.2 Ciri-ciri Komunitas/Masyarakat

Menurut Kusumohamidjojo (2000:28) dalam Studi Masyarakat Indonesia oleh Handoyo, Eko dkk. (2015), mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat sebagai berikut :

1. Kelompok manusia yang disebut masyarakat memiliki suatu perasaan bersatu, bahkan sense of belonging yang relatif sama sampai tingkat kepentingan tertentu.
2. Kelompok manusia tersebut hidup dan bekerja dalam suatu kerangka yang sama untuk waktu yang lama.
3. Kelompok manusia tersebut menyelenggarakan hidupnya dalam suatu kerangka organisatoris yang tumbuh dari kebiasaan atau kesepakatan diam-diam.
4. Kelompok manusia tersebut terdiri dari kelompok-kelompok yang lebih kecil baik kelompok dalam alur genealogis maupun dalam alur organisatoris

2.1.3 Komponen Komunitas/Masyarakat

Menurut Fredian Tony dalam Soekantor (2012) menyebutkan suatu komunitas tidak akan terbentuk tanpa adanya komponen-komponen yang dapat memenuhi syarat terbentuknya sebuah komunitas. Terdapat empat komponen komunitas yaitu sebagai berikut:

- a. *People*, merupakan komponen yang mencakup orang-orang yang menjadi bagian dari komunitas, tanpa adanya orang-orang maka komunitas tidak dapat terbentuk.
- b. *Place of Territory*, merupakan komponen yang mencakup tempat dimana orang-orang (people) berkumpul atau berada di suatu wilayah yang sama.
- c. *Psychological Identification*, merupakan komponen psikologi yaitu adanya perasaan psikologis yang terjalin antar anggota komunitas.
- d. *Social Interaction*, merupakan komponen yang mencakup interaksi sosial yaitu proses-proses sosial berupa hubungan sosial antara satu individu dengan individu lainnya. Interaksi sosial ini merupakan sebuah proses yang terjadi didalam komunitas.

Dikuti dari Buku *Social Work Macro Practice* (2017:122) Netting menjelaskan tentang dimensi dari komunitas sebagai berikut:

1) Fungsi Produksi, Distribusi dan *Konsumsi* (*Production, Distribution, Consumption*).

Fungsi produksi, distribusi, dan konsumsi adalah kegiatan masyarakat yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan material masyarakat, termasuk kebutuhan yang paling mendasar, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dalam komunitas modern, keluarga jarang menghasilkan sebagian besar atau semua dari apa yang mereka konsumsi. Orang-orang bergantung satu sama lain untuk ini dan kebutuhan lainnya, termasuk perawatan medis, sanitasi, pekerjaan, transportasi, dan rekreasi.

2) Fungsi Sosialisasi (*Socialization*).

Meneruskan atau mewariskan norma-norma, tradisi-tradisi dan nilai-nilai yang selama ini dianut oleh orang-orang yang berinteraksi di dalam masyarakat.

3) Fungsi Pengawasan Sosial (*Social Control*).

Masyarakat senantiasa mengharapkan warganya untuk mentaati norma-norma dan nilai-nilai yang dianut melalui penetapan hukum, peraturan dan sistem-sistem penegakkannya. Hal ini biasanya dilakukan dengan menetapkan undang-undang, aturan, dan peraturan, serta sistem untuk penegakkannya. Kontrol sosial sering dilakukan oleh beragam Lembaga-lembaga seperti pemerintahan, pendidikan, agama, dan pelayanan sosial.

4) Fungsi Partisipasi Sosial (*Social Participation*).

Masyarakat menyediakan wahana bagi para anggotanya untuk mengekspresikan aspirasi-aspirasi dan kepentingan-kepentingannya guna terbangunnya jaringan dukungan dan pertolongan melalui interaksi dengan warga masyarakat yang tergabung dalam kelompok-kelompok, asosiasi-asosiasi dan organisasi-organisasi.

5) Fungsi Gotong Royong (*Mutual Support*)

Keluarga-keluarga, teman-teman, para tetangga, kelompok sukarela dan asosiasi-asosiasi profesional yang tergabung dalam sebuah masyarakat biasanya saling membantu satu sama lain.

2.2 Kajian terkait Partisipasi Masyarakat

Definisi partisipasi menurut Mardikanto dan Soebiato, (2012) yaitu Pengertian partisipasi/peran-serta pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikut-sertaan secara aktif dan sukarela, baik karena alasan intrinsik maupun ekstrinsik dalam keseluruhan proses kegiatan pembangunan, yang mencakup: pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian (pemantauan, evaluasi, pengawasan), serta pemanfaatan hasil kegiatan yang dicapai.

2.2.1 Bentuk Kegiatan Partisipasi Masyarakat

Beragam bentuk kegiatan partisipasi masyarakat yang berhasil diidentifikasi oleh Dusseldorp (1981) yaitu:

1. Menjadi anggota kelompok masyarakat;
2. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok;
3. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain;
4. Menggerakkan sumber daya masyarakat;
5. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan;
6. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.

2.2.2 Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Perannya

Dalam jurnal ilmu sosial politik dan pemerintahan Lalita Ika Pertiwi Abdillah (2020) tentang peran partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan pembangunan desa yaitu :

1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayahnya perlu ditumbuhkan melalui forum yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan terhadap program pembangunan di wilayah setempat.
2. Partisipasi dalam Pelaksanaan Pembangunan, diartikan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, perlu adanya pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga/masyarakat.

3. Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan, Bentuk partisipasi masyarakat dalam memantau dan mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan sangat diperlukan, guna mengetahui apakah tujuan yang dicapai sudah sesuai dengan harapan. Selain itu juga untuk memperoleh umpan balik tentang masalah/kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang sedang dilaksanakan.
4. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan
Seringkali masyarakat tidak memahami manfaat dari setiap program pembangunan secara langsung, sehingga hasil pembangunan menjadi sia-sia. Dengan demikian, perlu adanya partisipasi masyarakat dengan kemauan dan kesukarelaan untuk memanfaatkan hasil pembangunan, misalnya: memanfaatkan jembatan penyeberangan jalan, dan lain sebagainya.

2.2.3 Unsur Partisipasi Masyarakat

Terdapat tiga unsur penting yang dimaksud dalam definisi Keith Davis dalam jurnal ilmiah ekonomi pembangunan oleh Herman tentang partisipasi masyarakat dalam peencanaan (2019), yang memerlukan perhatian khusus yaitu:

1. Bahwa partisipasi atau keikutsertaan (keterlibatan/peran serta) sesungguhnya merupakan suatu keterikatan mental dan perasaan, lebih daripada kata-kata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah;
2. Ketersediaan memberi suatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok, ini berarti bahwa terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok. Seseorang menjadi anggota dalam kelompok dengan segala nilainya;
3. Unsur tanggung jawab, unsur ini merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota, diakui sebagai anggota berarti ada: “(*sense of belonging*)”

2.3 Kajian tentang Desa dan Pemerintahan Desa

2.3.1 Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut R. Bintarto, Desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan mengenai ciri-ciri suatu desa yaitu sebagai berikut :

- 1) Suatu wilayah yang tidak luas
- 2) Corak kehidupan yang bersifat agraris
- 3) Kehidupan sederhana
- 4) Jumlah penduduk tidak padat
- 5) Pada umumnya terdiri dari pekarangan dan persawahan
- 6) Minimnya sarana transportasi

2.3.2 Pemerintahan Desa

Desa adalah suatu kesatuan hukum pada suatu wilayah tertentu yang memiliki masyarakat dan pemerintah tersendiri. Desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik dan kultur yang terdapat di suatu daerah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Widjaja (2010:3) "Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya". Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan juga bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Maka dari itu berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan pemerintahan desa adalah sekelompok orang dan lembaga yang membuat dan

menjalankan undang-undang pada tingkat desa, dengan tujuan mendekatkan pelayanan publik kepada penerimanya di kalangan masyarakat lokal.

2.3.3 Peraturan, Struktur Organisasi serta Tugas/Fungsi Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana untuk melaksanakan pemerintahan tersebut dipimpin oleh seorang kepala desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibantu oleh perangkat desa. Kepala dipilih langsung oleh penduduk desa melalui tahap pencalonan, pemungutan suara dan penetapan.

Dalam sebuah desa terdapat peraturan-peraturan. Jenis peraturan di desa terdiri atas peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan peraturan kepala desa. Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa dan rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa. Peraturan desa dan peraturan kepala desa diundangkan dalam lembaran desa dan berita desa oleh sekretaris desa. Selain adanya peraturan desa, dalam tatanan pemerintahan desa terdapat struktur pemerintahan desa yang tidak kalah penting. Berikut merupakan struktur pemerintah desa yang ada di Indonesia:

1) Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.

- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2) Sekretaris Desa

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3) Kepala Urusan

Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Urusan mempunyai fungsi:

- a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat,

arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

- b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

4) Kepala Seksi

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:

- a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
- b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

5) Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun

Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa

dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas Kepala Dusun memiliki fungsi:

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- c. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

6) Badan Permusyawaratan Daerah

Merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

7) Keuangan Desa

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa mempunyai beberapa sumber pendapatan yang terdiri atas Pendapatan Asli Desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong. APB Desa terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

8) Lembaga Kemasyarakatan

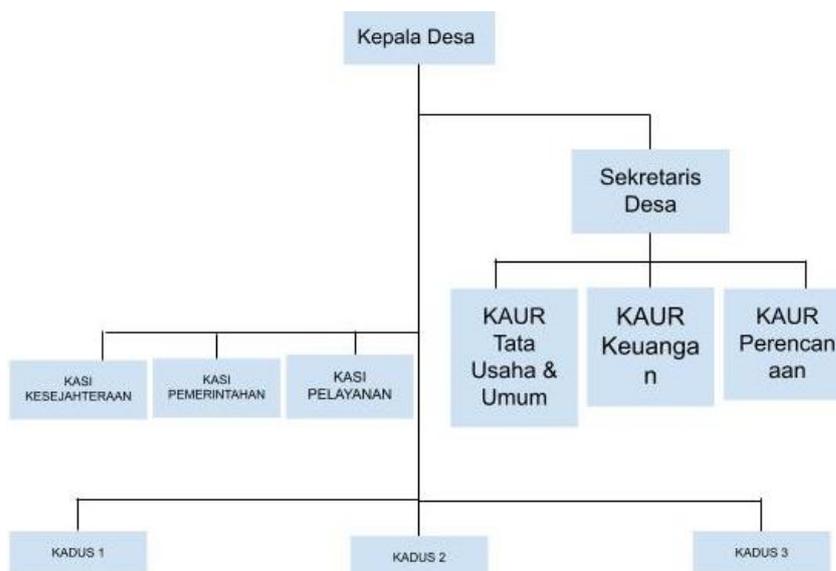
Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat. Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tim Penggerak

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa, RT/RW, dan Karang Taruna.

9) BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

Merupakan Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa agar terciptanya desa yang mandiri. BUMDes merupakan suatu lembaga usaha ekonomi yang mana modal usahanya bersumber dari inisiatif masyarakatnya sendiri untuk kemandirian desa. BUMDes merupakan salah satu sarana untuk mencapai stabilitas ekonomi dalam desa, dimana pemerintah desa bersama masyarakat mengelola satu lembaga usaha desa yang berdiri dan memanfaatkan potensi dalam masyarakat desa.

Berikut merupakan struktur pemerintah desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Sumber: Profil Desa Campaka Tahun 2023

2.3.4 Kewenangan Pemerintahan Desa

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala diatur dan diurus oleh Desa. Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diurus oleh Desa. Berikut merupakan yang termasuk kedalam kewenangan desa yakni:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana paling sedikit terdiri atas:

- a. Sistem organisasi masyarakat adat;
- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. Pengelolaan tanah kas Desa; dan
- e. Pengembangan peran masyarakat Desa.

2. Kewenangan lokal berskala Desa

Kewenangan lokal berskala Desa paling sedikit terdiri atas:

- a. Pengelolaan tambatan perahu;
- b. Pengelolaan Pasar Desa;
- c. Pengelolaan tempat permandian umum;
- d. Pengelolaan jaringan irigasi;
- e. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- i. Pengelolaan embung Desa;
- j. Pengelolaan air minum berskala Desa; dan
- k. Pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain kewenangan sebagaimana di atas, jenis kewenangan desa juga dapat disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal. Penyerahan "urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa" akan berimplikasi terhadap:

1. Kewenangan memutuskan ada pada tingkat Desa, sehingga terjadi:
 - a. Pergeseran kewenangan dari Pemerintahan kabupaten/kota kepada Pemerintahan desa
 - b. Peningkatan volume perumusan peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa.
2. Adanya pembiayaan yang diberikan Kabupaten/Kota kepada Desa dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut, sehingga terjadi:
 - a. Pergeseran anggaran dari pos perangkat daerah kepada pos pemerintahan desa.
 - b. Adanya program pembangunan yang bisa mengatasi kebutuhan masyarakat Desa dalam skala Desa.
3. Adanya prakarsa dan inisiatif pemerintahan desa dalam mengembangkan aspek budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup di wilayahnya sesuai ruang lingkup kewenangan yang diserahkan.
4. Adanya prakarsa dan kewenangan memutuskan oleh Pemerintahan Desa sesuai kebutuhan masyarakat Desa, sehingga keterlibatan seluruh stakeholders (Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan masyarakat desa) dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan semakin lebih maksimal. Bila semua kebutuhan lokal dapat diatasi oleh pemerintah desa, diharapkan akan semakin meningkat partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program-program pemerintah.

2.4 Kajian tentang Intervensi Pekerjaan Sosial dengan Komunitas

2.4.1 Definisi Pekerjaan Sosial dengan Komunitas

Menurut Max Siporin dalam bukunya yang berjudul *Introduction to Social Work Practice* (1975) mendefinisikan "*Social work is defined as a social institutional methods of helping people to prevent and to resolve their social problem, to restore and enhance their social functioning.*" (Pekerjaan sosial didefinisikan sebagai suatu metode institusi sosial untuk membantu orang

mencegah dan memecahkan masalah mereka serta untuk memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial mereka).

William G. Brueggemann dalam *The Practice of Macro Social Work* (2014:09) menjelaskan bahwa pekerjaan sosial makro adalah praktik membantu individu dan kelompok memecahkan masalah dan membuat perubahan sosial di komunitas, organisasi, sosial, dan tingkat global. Pekerja sosial komunitas membantu komunitas memperkuat hubungan antara orang-orang, memperoleh pemberdayaan, dan mengatasi ketidakadilan melalui sosial perencanaan, pengembangan masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat.

Sedangkan menurut W.A Friedlander (dalam Hermawati, 2001) menjelaskan bahwa pekerjaan sosial adalah suatu pelayanan sosial profesional yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam hubungan kemanusiaan guna membantu seseorang atau kelompok untuk mencapai kepuasan dan kebebasan pribadi maupun sosial.

Berdasarkan definisi beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan sosial adalah profesi pertolongan profesional yang membantu individu, kelompok, ataupun masyarakat untuk memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosialnya serta menciptakan kondisi kemasyarakatan dimana tujuan tersebut dapat diwujudkan. Dari definisi tersebut, maka dapat dilihat terdapat dua poin utama yang menjadi tujuan dari pertolongan pekerjaan sosial yaitu meningkatkan dan memperbaiki keberfungsian sosial dan menciptakan kondisi kemasyarakatan (*societal condition*). Berdasarkan pengertian di atas dapat dilihat bahwa profesi pekerjaan sosial memang membantu masyarakat dalam level atau tataran mikro, meso, dan juga makro. Pada level makro, pekerjaan sosial menyentuh lapisan masyarakat yang lebih besar seperti kelompok masyarakat desa dan sebagainya. Praktek ini tidak terlalu menekankan pada intervensi individual atau intervensi kelompok kecil.

Praktek makro dalam pekerjaan sosial terutama lebih memfokuskan diri pada keberfungsian klien dalam konteks organisasi, masyarakat, dan kebijakan. Pekerja sosial dituntut untuk melakukan advokasi dimana pekerja sosial membantu masyarakat untuk mengakses pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sedangkan di sisi lainnya pekerja sosial juga memungkinkan bekerja dengan sistem atau kebijakan lembaga yang dianggap tidak adil atau kurang manusiawi. Dalam kasus-kasus seperti ini, pekerja sosial mungkin perlu

memberikan intervensi pada organisasi, kebijakan, atau sistem tertentu yang diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Hal inilah yang membedakan pekerja sosial dengan profesi kemanusiaan yang lainnya, banyak disiplin yang mengklaim dapat bekerja dengan individu, keluarga dan kelompok namun hanya sedikit profesi yang memfokuskan pada keberfungsian klien dalam konteks organisasi, masyarakat, dan kebijakan yang salah satunya adalah pekerjaan sosial (Netting, 2008).

2.4.2 Tujuan dan Fungsi Pekerjaan Sosial dengan Komunitas

Menurut Netting (2010:7) tujuan dari pekerjaan sosial makro adalah untuk menciptakan dan mengembangkan suatu penyesuaian yang efektif antara sumber-sumber kesejahteraan sosial dengan kebutuhan-kebutuhan. Selain itu terdapat pula tujuan khusus di dalam pekerjaan sosial makro diantaranya:

1. Memperoleh data dan fakta yang diperlukan.
2. Mengembangkan dan merubah program agar tercapai penyesuaian yang lebih baik antara sumber dan kebutuhan.
3. Meningkatkan efektivitas kerja dari lembaga-lembaga.
4. Meningkatkan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam program.
5. Mengembangkan pengertian umum tentang masalah, kebutuhan, tujuan, program dan metode yang dipakai.
6. Mengembangkan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam aktivitas pengembangan masyarakat.

Menurut Netting (2010:9) terdapat fungsi-fungsi dari praktek pekerjaan sosial makro atau pekerjaan sosial berbasis masyarakat, diantaranya:

1. Memperoleh dasar-dasar faktual yang lengkap bagi penyusunan perencanaan dan pelaksanaan. Fakta-fakta yang harus diidentifikasi pekerja sosial yaitu seperti ciri-ciri dan luasnya masalah, ciri-ciri dan luasnya sumber-sumber yang tersedia, ciri-ciri dan luasnya usaha kesejahteraan sosial.
2. Memulai, mengembangkan, merubah, melaksanakan dan mengakhiri suatu program.
3. Menciptakan, mempertahankan dan meningkatkan standar kesejahteraan sosial dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi usaha kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial.

4. Mengembangkan dan memberikan fasilitas interelasi dan meningkatkan koordinasi antara organisasi, kelompok, dan individu yang terlibat.
5. Mengembangkan pengertian yang baik dari seluruh warga masyarakat.
6. Mengembangkan dukungan dan partisipasi di dalam kegiatan kesejahteraan sosial.

2.4.3 Model-Model Intervensi Komunitas

Jack Rothman membagi tipe pengembangan masyarakat ke dalam tiga jenis. Model ini sesuai dengan masyarakat di zaman sekarang.

1. *Locality Development* atau Pengembangan Komunitas Lokal

Inti dari komunitas adalah masyarakat dengan skala kecil. Komunitas adalah suatu skala kecil masyarakat memiliki jaringan sosial yang kuat, saling mengenal, saling membantu dan simpati. Model ini memandang bahwa perubahan atau pengembangan masyarakat dapat dilakukan dengan optimal melalui partisipasi aktif dari masyarakat. Fokusnya pada locality atau jejaring sosial sehingga perhatian utamanya adalah keterlibatan masyarakat di seluruh lapisan. Termasuk para tokoh masyarakat dan orang mengalami masalah atau kebutuhan atau kelompok sasaran itu sendiri. Untuk membahas masalah yang dialami dan kebutuhan yang dirasakan. Di mana masyarakat melakukan semuanya dengan kemampuan sendiri. Perhatian utamanya adalah prosedur demokratis yang merupakan bagian jejaring sosial. Adanya konsensus, kerja sama sukarela. Ketika membutuhkan pemimpin, pemimpin berasal dari masyarakat atau indigenous leadership. Adanya self sufficeint atau mereka mengalami masalah sendiri dan dengan kemampuan sendiri mengatasi masalah tersebut. Masyarakat didorong untuk mengkaji masalah sendiri. Peran pekerja sosial menjadi fasilitator yaitu memudahkan terjadinya proses sosial.

2. *Social Planning and Social Policy* atau Perencanaan sosial dan Kebijakan Sosial

Social planning menekankan pada proses-proses rational technics. Model ini meyakini bahwa masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan lingkungan yang kompleks memerlukan seorang perencana yang memiliki keterampilan untuk membantu dan membimbing dalam melakukan proses perubahan. Peran utama seorang pekerja sosial adalah sebagai tenaga ahli atau expert. Pada umumnya expert seorang pegawai dari organisasi atau pemerintahan

besar untuk melakukan perencanaan sesuai visi misi asal instansi pekerja sosial tersebut. Di mana pekerja sosial bersifat *dependent*. Dalam model ini upaya untuk mengembangkan kemampuan masyarakat kurang mendapat perhatian dalam model ini, mulai dari asesmen hingga terwujudnya program. Peranan perencana dalam model ini meliputi pengumpul data, melakukan survei dan penelitian, menganalisis data sehingga menjadi informasi yang digunakan untuk merumuskan program. Data adalah sebuah bentuk angka-angka sedang informasi penerjemahan data yang sudah memiliki makna. Fokus utamanya pada upaya untuk mengidentifikasi kebutuhan, serta melakukan perancangan program untuk menyelesaikan kebutuhan bersangkutan. Tema sentra dari model ini yaitu untuk mendapat data dan melakukan melakukan tahapan selanjutnya secara rasional.

3. Social Action atau Aksi Sosial

Mengatakan bahwa dalam masyarakat selalu ada bagian dan unsur yang menguasai dan dikuasi, yang menekan dan tertindas atau ketimpangan sehingga diperlukan suatu model untuk diarahkan untuk membela atas nama orang yang tidak beruntung untuk memperoleh suatu kondisi yang lebih baik dan dapat memenuhi kebutuhan mereka. Seringkali model ini dipakai untuk melakukan perubahan pada suatu institusi seperti ekonomi pasar mau pun kebijakan tertentu. Peranan pekerja sosial adalah sebagai pembela atau penggerak, aktivis, negosiator. Tema sentral dari model ini adalah menggalang kekuatan untuk mengubah atau memperbaiki sistem yang menindas dan merugikan. Model ini tidak banyak dilakukan oleh pekerja sosial bahkan di negara maju sekalipun karena dapat memperoleh sanksi dari lembaga yang mempekerjakan pekerja sosial tersebut. Kemudian dicarilah cara yang lebih lembut. Misalnya dengan reseach presentation di kalangan parlemen mengenai aspirasi masyarakat yang dirugikan.

2.4.4 Prinsip-Prinsip Pekerjaan Sosial

Pekerja sosial mentransformasikan nilai-nilai profesi yang abstrak ke dalam prinsip-prinsip praktek. Kemudian mereka menerjemahkan prinsip-prinsip ini ke dalam suatu tindakantindakan yang konkret dalam situasi-situasi yang spesifik. Prinsip-prinsip umum pekerjaan sosial profesional meliputi penerimaan, individualisasi, pengungkapan perasaan-perasaan yang bertujuan, sikap-sikap tidak menghakimi, obyektivitas, penglibatan emosi secara terkendali, penentuan

nasib sendiri, akses kepada sumber-sumber, kerahasiaan, dan akuntabilitas. Apabila pekerja sosial gagal mengoperasionalkan prinsip-prinsip ini, mereka tentu akan mengorbankan klien dan memperdayakan mereka. Sebaliknya, dengan menganut prinsip-prinsip praktek ini berarti akan memfasilitasi pemberdayaan.

2.4.5 Peran Pekerjaan Sosial

Dalam pengembangan masyarakat terdapat pekerja sosial komunitas yang berperan antara lain yaitu peran fasilitatif, edukasional, representatif, dan teknikal. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Peranan Fasilitatif Peranan

“fasilitatif” sering disebut sebagai “pemungkin” (enabler). Keduanya bahkan sering dipertukarkan satu-sama lain. Peran sebagai pemungkin atau fasilitatif bertujuan untuk membantu klien agar menjadi mampu menangani tekanan situasional atau transisional. Menurut Barker (1987:49) pencapaian tujuan diperlukan beberapa strategi, meliputi: pemberian harapan, pengurangan penolakan dan ambivalensi, pengakuan dan pengaturan perasaan-perasaan, pengidentifikasian dan pendorongan kekuatan-kekuatan personal dan aset-aset sosial, pemilahan masalah menjadi beberapa bagian sehingga lebih mudah dipecahkan, dan pemeliharaan sebuah fokus pada tujuan dan cara-cara pencapaiannya.

2. Peranan Edukasional

Kategori kedua dari peranan pekerjaan sosial masyarakat adalah peranan edukasional. Jika pada peranan fasilitator, pekerja terlibat dalam menstimulasi dan mendukung proses-proses masyarakat, maka peranan edukasional menuntut pekerja lebih aktif dalam setting agenda. Peranan seorang pekerja sosial masyarakat terdiri atas peningkatan kesadaran, memberikan informasi, konfrontasi dan pelatihan.

3. Peranan Representatif

Peran representative digunakan untuk menunjukkan peranan pekerja sosial masyarakat dalam berinteraksi dengan badan-badan eksternal atau luar, demi kepentingan atau keuntungan masyarakat. Peranan yang mengarahkan pekerja sosial untuk dapat mengakses sumber-sumber daya untuk penanganan masalah.

4. Peranan Teknikal

Peran pekerja sosial masyarakat melibatkan aplikasi berbagai keterampilan teknis untuk membantu pengembangan masyarakat.

2.4.6 Strategi dan Taktik Pekerjaan Sosial dengan Komunitas

Pendekatan atau metode pengembangan masyarakat perlu menerapkan taktik dan teknik yang tepat. Hal penting yang juga menjadi perhatian adalah bahwa setiap upaya perubahan dalam masyarakat, selalu berkaitan dengan persoalan alokasi sumber yang bersifat terbatas.

Brager, Specht, dan Torczyner (1987) menghubungkan strategi dengan tujuan jangka panjang dan taktik dengan perilaku kelompok dan jangka pendek. Strategi mengacu pada upaya keseluruhan dirancang untuk memastikan bahwa perubahan yang diusulkan diterima. Istilah taktik mengacu pada teknik dan perilaku khusus yang digunakan dalam kaitannya dengan sistem target dan dirancang untuk memaksimalkan kemungkinan bahwa strategi akan berhasil dan yang diusulkan diadopsi (Netting:2017).

Jenis strategi dan taktik pengembangan masyarakat Brager (1987) dan Holloway (1978) membagi 3 jenis strategi beserta taktik dalam pengembangan masyarakat, yaitu:

1. Kolaborasi (kerjasama)

Kolaborasi dilakukan apabila sistem sasaran setuju (mudah teryakinkan untuk sepakat) dengan sistem kegiatan mengenai perlunya perubahan dan dukungan alokasi sumber. Definisi dari kata kerjasama bervariasi dalam berbagai literature. Bisa jadi digunakan untuk merujuk pada komunikasi informal, kerjasama, atau koordinasi. Untuk tujuan perubahan yang direncanakan, bagaimanapun kolaborasi harus lebih dari sekedar afiliasi longgar. Strategi perubahan yang direncanakan ini membutuhkan kemitraan yang berkomitmen di antara sistem aksi anggota untuk melihat proses perubahan melalui bagian, implementasi, pemantauan kemajuan, dan evaluasi keberhasilan. Kolaborasi memiliki 2 taktik, yaitu:

2. Kampanye

Teknik ini diperlukan untuk dilakukan apabila sistem sasaran tidak menolak untuk berkomunikasi dengan sistem kegiatan, akan tetapi konsensus akan perlunya perubahan belum tercapai, atau sistem sasaran mendukung perubahan tetapi tidak ada alokasi sumber untuk perubahan tersebut.

- a. Teknik Edukasi Sistem perubahan berinteraksi dengan sistem sasaran dengan menyajikan berbagai persepsi, sikap, opini, data dan informasi mengenai perubahan yang diinginkan, dengan tujuan untuk meyakinkan sistem sasaran mengubah cara berpikir atau bertindak, yang selama ini dianggap kurang sejalan dengan perubahan yang diperlukan.
- b. Teknik Persuasi Mengacu pada seni untuk meyakinkan orang lain agar menerima dan mendukung pandangan-pandangannya atau persepsinya mengenai suatu isu:
 - 1) Kooptasi (cooptation)

Meminimalkan kemungkinan terjadinya oposisi dengan cara menyerap atau melibatkan anggota-anggota sistem sasaran ke dalam sistem kegiatan. Pelibatan anggota kelompok sasaran secara individual disebut "*informal cooptation*", sedangkan melibatkan sistem sasaran secara kelompok disebut "*formal cooptation*".
 - 2) Lobi (Lobbying)

Lobi adalah bentuk persuasi yang mengarah pada perubahan kebijakan di bawah jelajah sistem pengendalian. Kegiatan diarahkan pada para elit yang menjadi kunci dalam perumusan kebijakan.
 - 3) Penggunaan Media Massa

Mengembangkan dan menayangkan cerita-cerita yang bernuansa berita ke dalam media-media elektronik maupun cetak dengan tujuan untuk mempengaruhi pendapat umum. Teknik ini digunakan untuk mendesak para pengambil keputusan untuk menyepakati cara-cara pemecahan masalah yang telah teridentifikasi.
3. Kontes

Kontes menunjuk pada kegiatan kompetisi yang bersifat menang-kalah (*win-lost solutions*) dan digunakan manakala masing-masing pihak tidak atau belum memiliki kesepakatan mengenai perubahan. Taktik yang digunakan dalam kondisi demikian antara lain bargaining dan negosiasi, aksi masyarakat dan aksi penuntutan perkara

2.4.7 Teknologi Pekerjaan Sosial dengan Komunitas

Seorang pekerja sosial bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ada untuk mempermudah pelaksanaan kegiatannya. Beberapa teknologi untuk menunjang kegiatan, diantaranya:

1. *Community Involvement (CI), Neighborhood Survey Study (NSS), Community/Night Meeting Forum (CMF)*

Ketiga teknologi ini pada umumnya digunakan pada tahap inisiasi sosial dalam mengajak masyarakat membangun kesadaran kolektif bersama. Community Involvement dapat dilakukan dengan meleburkan diri/melibatkan diri dalam berbagai kegiatan masyarakat, baik kegiatan formal seperti yang praktikan lakukan saat mengikuti kegiatan Posyandu, Minggu desa, Puskesmas Keliling, maupun informal, seperti kumpul-kumpul dan ngaliwet. Hasil dari Community Involvement adalah terciptanya keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi-informasi yang diperlukan serta menghindari adanya tekanan dari pihak manapun.

W.S. Winkel (1995) menjelaskan bahwa Neighborhood Survey Study (NSS) adalah nama lain dari home visit atau kunjungan rumah yang merupakan salah satu teknik pengumpul data dengan jalan mengunjungi rumah sasaran untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dan untuk melengkapi data hasil asesmen yang sudah ada yang diperoleh dengan teknik lain Community/Night Meeting Forum (CMF) atau pertemuan masyarakat merupakan kegiatan non-formal berupa forum musyawarah warga di tingkat RT atau RW yang merupakan wadah untuk melakukan jajak kebutuhan (need assessment) bagi penyiapan usulan kegiatan yang akan dilaksanakan. Praktikan mengikuti pertemuan nonformal ini sebagai media untuk saling bertukar ide atau usulan dalam perencanaan program yang akan direncanakan.

2. *Metodologi Partisipatoris Assesmen (MPA)*

MPA adalah salah satu cara untuk melakukan asesmen terhadap permasalahan dengan melibatkan masyarakat. Masyarakat yang menentukan, merencanakan, memutuskan permasalahan yang dialami dan dirasakan, karena itu keikutsertaan masyarakat dalam semua kegiatan menjadi tolak ukur yang penting. Metode asesmen partisipatoris dalam pelaksanaan di lapangan mengikuti empat langkah utama, yaitu:

- a. Menemukan masalah.
- b. Menemukan potensi.
- c. Menganalisis masalah dan potensi.
- d. Memilih solusi pemecahan masalah.

e. *Participatory Rural Appraisal (PRA)*

PRA merupakan sebuah pendekatan untuk mengkaji masyarakat desa secara partisipatif, yang memandang pendidikan pada masyarakat sebagai pendidikan orang dewasa. Secara Hafiah atau diterjemahkan kata perkata, PRA adalah penilaian/pengkajian/penelitian keadaan desa secara partisipatif. Dengan demikian, metode Participatory Rural Appraisal atau PRA adalah cara yang digunakan dalam melakukan kajian untuk memahami keadaan atau kondisi desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Menurut Konsorsium Pengembangan Dataran Tinggi Nusa Tenggara (2012) yang dimaksudkan dengan PRA adalah pendekatan dan teknik-teknik pelibatan masyarakat dalam proses-proses pemikiran yang berlangsung selama kegiatan-kegiatan perencanaan dan pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi program pembangunan masyarakat. PRA memiliki beberapa teknik berdasarkan Acuan Participatory Rural Appraisal sebagai berikut:

- a. *Secondary Data Review (SDR)* – Review Data Sekunder, merupakan cara mengumpulkan sumber-sumber informasi yang telah diterbitkan maupun yang belum disebar. Praktikan mencoba mencari apakah sudah ada database PMKS atau belum untuk mengetahui data manakah yang telah ada sehingga tidak perlu lagi dikumpulkan.
- b. *Direct Observation* – Observasi Langsung. Direct Observation adalah kegiatan observasi langsung pada obyek-obyek tertentu, kejadian, proses, hubungan-hubungan masyarakat dan mencatatnya. Setelah melakukan MPA untuk asesmen awal, praktikan mengobservasi secara langsung menuju PMKS tersebut untuk melakukan *cross check*.
- c. Pemetaan Sosial. Teknik ini adalah suatu cara untuk membuat gambaran kondisi sosial-ekonomi masyarakat, misalnya gambar posisi pemukiman, sumber-sumber mata pencaharian, peternakan, jalan, persebaran penyandang masalah kesejahteraan sosial dan sarana-sarana umum. Hasil gambaran ini merupakan peta umum sebuah lokasi yang menggambarkan keadaan masyarakat maupun lingkungan fisik.
- d. *Semi-Structured Interviewing (SSI)* – Wawancara Semi Terstruktur. Teknik ini adalah wawancara yang mempergunakan panduan pertanyaan sistematis yang hanya merupakan panduan terbuka dan masih mungkin untuk berkembang selama interview dilaksanakan. SSI dapat dilakukan

bersama individu yang dianggap mewakili informasi, misalnya wanita, pria, anak-anak, pemuda, petani, pejabat lokal.

- e. *Focus Group Discussion* – Diskusi Kelompok Terfokus. Teknik ini berupa diskusi antara beberapa orang untuk membicarakan hal-hal bersifat khusus secara mendalam. Tujuannya untuk memperoleh gambaran terhadap suatu masalah tertentu dengan lebih rinci.
- f. *Transek* (Penelusuran). Transek merupakan teknik penggalian informasi dan media pemahaman daerah melalui penelusuran dengan berjalan mengikuti garis yang membujur dari suatu sudut ke sudut lain di wilayah tertentu.
- g. *Technology of Participation* (ToP). Menurut Sheafor (2003) *Technology of Participation* adalah teknik perencanaan pengembangan masyarakat secara partisipatif, sehingga seluruh pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mengemukakan ide dan menolong setiap orang untuk mampu mengapresiasi ide orang lain. Selanjutnya, Ajat Sudrajat (2005) menjelaskan bahwa teknik ini digunakan untuk mengundang partisipasi kelompok sasaran secara optimal untuk merumuskan tujuan, merencanakan kegiatan dan mempersiapkan tim kerja masyarakat (TKM) yang akan berfungsi penuh sebagai penggerak utama atas semua kegiatan di masyarakat. Ada beberapa kegiatan yang terangkum dalam tiga tahap utama dalam mengaplikasikan *Technology of Participation* (ToP) yaitu, tahap diskusi, tahap lokakarya dan tahap rencana tindak lanjut

2.5 Kajian Lingkungan Hidup

2.5.1 Definisi Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Menurut Munadjat Danusaputro lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa setiap komponen dalam lingkungan saling berkaitan dan berpengaruh satu dengan yang lain. Di mana dalam lingkungan hidup terhadap ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan satu kesatuan secara menyeluruh dan saling berpengaruh dalam membentuk keseimbangan dan stabilitas kehidupan alam.

2.5.2 Komponen Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup dapat dibagi menjadi lingkungan alam (abiotik dan biotik), lingkungan binaan dan lingkungan sosial budaya. Dalam pengelompokan ini komponen abiotik dan biotik dimasukkan ke dalam komponen lingkungan alam.

a. Lingkungan Hidup Alami

Lingkungan hidup alami terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah segala makhluk hidup, mulai mikroorganisme sampai dengan tumbuhan dan hewan. Lingkungan abiotik adalah segala kondisi yang terdapat di sekitar makhluk hidup yang bukan organisme hidup, seperti batuan, tanah, mineral, udara, angin, curah hujan, cahaya matahari, dan lainlain. Lingkungan biotik sering pula dinamakan lingkungan organik, sedangkan lingkungan abiotik dinamakan juga lingkungan anorganik.

b. Lingkungan Binaan

Lingkungan fisik hasil karya manusia dimasukkan menjadi lingkungan binaan. Lingkungan binaan dikenal dengan penciptaan lingkungan hidup binaan yaitu berusaha membentuk, memodifikasi, atau mengelola lingkungan hidup. Tujuannya agar lingkungan hidup dapat normal kembali seperti semula yaitu memiliki keseimbangan ekologi. Contoh yang sederhana dalam penciptaan lingkungan binaan misalnya penanaman pohon di lingkungan kompleks perumahan agar udaranya lebih segar, terlihat asri dan nyaman.

c. Lingkungan Sosial Budaya

Lingkungan sosial budaya merupakan lingkungan hidup manusia yang melakukan interaksi dengan sesamanya. Lingkungan sosial budaya tidak terlepas dari lingkungan alam. Banyak kerusakan alam akibat interaksi antar manusia yang negatif, contohnya peristiwa penjarahan hutan Sancang Garut, selama ribuan tahun Leuweung atau Hutan Sancang adalah hutan konservasi yang tidak dapat dilalui manusia. Tetapi karena kondisi politik yang tidak stabil hutan tersebut sudah habis dijarah oleh masyarakat.

2.6 Kajian tentang Sampah

2.6.1 Pengertian Sampah

Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik domestik (rumah tangga) maupun industri. Dalam Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Ditinjau dari sumbernya, sampah berasal dari beberapa tempat, yakni :

- 1) Sampah dari pemukiman penduduk pada suatu pemukiman biasanya sampah dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal di suatu bangunan atau asrama. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya organik, seperti sisa makanan atau sampah yang bersifat basah, kering, abu plastik dan lainnya.
- 2) Sampah dari tempat-tempat umum dan perdagangan tempat-tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyaknya orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Tempat-tempat tersebut mempunyai potensi yang cukup besar dalam memproduksi sampah termasuk tempat perdagangan seperti pertokoan dan pasar. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa-sisa makanan, sayuran dan buah busuk, sampah kering, abu, plastik, kertas, dan kaleng-kaleng serta sampah lainnya. Kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari sampah dan dalam kegiatannya manusia senantiasa menghasilkan sampah baik sampah organik maupun non organik.

2.6.2 Jenis-Jenis Sampah

Sampah memiliki berbagai jenis-jenis berdasarkan bahan atau bentuk pembuatannya sendiri yang kadang tidak bisa di daur ulang atau tidak bisa dipakai lagi. Berikut adalah jenis-jenis sampah :

1) Sampah Organik

adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat biodegradable. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Termasuk sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa-sisa makanan, pembungkus (selain kertas, karet dan plastik), tepung, sayuran, kulit buah, daun dan ranting. Selain itu, pasar tradisional juga

banyak menyumbangkan sampah organik seperti sampah sayuran, buah-buahan dan lain-lain.

2) Sampah Non Organik

Sampah non organik atau anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik dibedakan menjadi sampah logam dan produk-produk olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca dan keramik, sampah detergen. Sebagian besar anorganik tidak dapat diurai oleh alam/ mikroorganisme secara keseluruhan (unbiodegradable). Sementara, sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga misalnya botol plastik, botol gelas, tas plastik, dan kaleng.

3) Sampah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Merupakan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan dan sebagainya yang terkontaminasi zat atau energi dan komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Contoh: deterjen dan pemutih pakaian, pembasi serangga, hair spray, batu baterai, oli bekas dan sebagainya.

2.6.3 Sumber-sumber Sampah

Menurut Gilbert dkk. dalam Artiningsih (2008), sumber-sumber timbulan sampah adalah sebagai berikut:

1. Sampah dari Pemukiman Penduduk, Pada suatu pemukiman biasanya sampah dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal di suatu bangunan atau asrama. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya cenderung organik, seperti sisa makanan atau sampah yang bersifat basah, kering, abu plastik, dan lainnya.
2. Sampah dari Tempat-Tempat Umum dan Perdagangan, Tempat-tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyaknya orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Tempat-tempat tersebut mempunyai potensi yang cukup besar dalam memproduksi sampah termasuk tempat perdagangan seperti

pertokoan dan pasar. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa-sisa makanan, sampah kering, abu, plastik, kertas, dan kaleng-kaleng serta sampah lainnya.

3. Sampah dari Sarana Pelayanan, Sampah yang dimaksud di sini misalnya sampah dari tempat hiburan umum, pantai, mesjid, rumah sakit, bioskop, perkantoran, dan sarana pemerintah lainnya yang menghasilkan sampah kering dan sampah basah.
4. Sampah dari Industri, Dalam pengertian ini termasuk pabrik-pabrik sumber alam perusahaan kayu dan lain-lain, kegiatan industri, baik yang termasuk distribusi ataupun proses suatu bahan mentah. Sampah yang dihasilkan dari tempat ini biasanya sampah basah, sampah kering abu, sisa-sisa makanan, sisa bahan bangunan.
5. Sampah Pertanian, Sampah dihasilkan dari tanaman atau binatang daerah pertanian, misalnya sampah dari kebun, kandang, ladang atau sawah yang dihasilkan berupa bahan makanan pupuk maupun bahan pembasmi serangga tanaman (Siahaan, 2013).

2.6.4 Metode Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (UU Nomor 18 Tahun 2008). Terdapat 2 kelompok utama pengelolaan sampah, yaitu:

1. Pengurangan sampah (*waste minimization*), yang terdiri dari pembatasan terjadinya sampah (*reduce*) menggunakan ulang (*reuse*), dan mendaur ulang (*recycle*).
2. Penanganan sampah (*waste handling*), yang terdiri dari:
 - a. Pemilahan: dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
 - b. Pengumpulan: dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
 - c. Pengangkutan: dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir.

- d. Pengolahan: dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
- e. Pemrosesan akhir sampah: dalam bentuk pengambilan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman (Darmawan, 2018)

2.6.5 Perilaku Membuang Sampah Sembarangan

Kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan salah satu penyebab pencemaran oleh sampah plastik yang paling menonjol. Di Indonesia, beberapa kelompok masyarakat menganggap buang sampah sembarangan sebagai bagian dari budaya dan praktik yang umum dilakukan. Membuang sampah sembarangan juga menjadi opsi yang diterima secara sosial di beberapa lokasi yang tidak memiliki layanan pengumpulan sampah. Selain itu, perilaku dan praktik buang sampah sembarangan sangat berkaitan dengan lokasi - apakah itu di ruang publik, di mana orang menganggap akan ada seseorang yang bertanggung jawab untuk mengelola sampah yang mereka buang dan menjaga kebersihan area (*sindrom Not 37 In My Backyard*), atau ruang nonpublik, tempat orang membuang sampah secara sembarangan sebagai cara mereka mengelola sampah yang dihasilkan. Dikutip dari buku Stop Buang Sampah Sembarangan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, terdapat beberapa perilaku yang dilakukan oleh masyarakat secara umum:

1. Membuang sampah sembarangan telah umum dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Sebagian masyarakat memiliki pemikiran bahwa ketika suatu area telah tercemar, melakukan aktivitas membuang sampah di area tersebut tidak akan menimbulkan perbedaan.
2. Anggapan bahwa sampah yang dihasilkan bukanlah tanggung jawab masyarakat itu sendiri. Beberapa masyarakat memiliki pendapat bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.
3. Anggapan bahwa dengan membuang sampah sembarangan tidak akan menyebabkan dampak kepada lingkungan.
4. Membuang sampah sembarangan mudah untuk dilakukan. Adanya anggapan bahwa membuang sampah sebagai sebagai jalan untuk mengelola sampah dikarenakan sampah dilihat sebagai sesuatu yang tidak membuat diri nyaman sehingga ingin segera disingkirkan.

5. Sebagian perilaku masyarakat di fasilitas umum memiliki pemahaman bahwa tempat tersebut bukanlah lingkungan tempat tinggal saya sehingga membuang sampah bukan perkara yang dipertimbangkan. Hal ini juga dipegaruhi oleh rasa kepemilikan yang rendah.
6. Aktivitas membuang sampah sembarangan juga terjadi di daerah pedesaan dan pinggiran kota, tempat di mana jasa pengelolaan sampah minim. Sebagian membuang sampah mereka ke saluran air, jika mereka tinggal di sepanjang sungai, atau membuang sampah mereka di pasar tradisional terdekat.

2.6.6 Faktor yang Mempengaruhi Sampah

Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi jumlah sampah (Chandra, 2006):

1. Jumlah penduduk bergantung pada aktivitas dan kepadatan penduduk. Semakin padat penduduk, sampah semakin menumpuk karena tempat atau ruang untuk menampung sampah kurang. Semakin meningkat aktivitas penduduk, sampah yang dihasilkan semakin banyak, misalnya pada aktivitas pembangunan, perdagangan, industri, dan sebagainya.
2. Sistem pengumpulan atau pembuangan sampah yang dipakai. Pengumpulan sampah dengan menggunakan gerobak lebih lambat jika dibandingkan dengan truk.
3. Pengambilan bahan-bahan yang ada pada sampah untuk dipakai kembali. Metode itu dilakukan karena bahan tersebut masih memiliki nilai ekonomi bagi golongan tertentu. Frekuensi pengambilan dipengaruhi oleh keadaan, jika harganya tinggi, sampah yang tertinggal sedikit.
4. Faktor geografis. Lokasi tempat pembuangan apakah di daerah pegunungan, pantai, atau dataran rendah.
5. Faktor waktu. Bergantung pada faktor harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Jumlah sampah per hari bervariasi menurut waktu. Contoh, jumlah sampah pada siang hari lebih banyak daripada jumlah di pagi hari, sedangkan sampah di daerah pedesaan tidak begitu bergantung pada faktor waktu.
6. Faktor sosial ekonomi dan budaya. Contoh, adat istiadat dan taraf hidup hidup dan mental masyarakat.

7. Faktor musim. Pada musim hujan sampah mungkin akan tersangkut pada selokan pintu air, atau penyaringan air limbah.
8. Kebiasaan masyarakat. Contoh jika seseorang suka mengkonsumsi satu jenis makanan atau tanaman sampah makanan itu akan meningkat.
9. Kemajuan teknologi, Akibat kemajuan teknologi, jumlah sampah dapat meningkat. Contoh plastik, kardus, rongsokan AC, TV, kulkas, dan sebagainya.
10. Jenis sampah. Makin maju tingkat kebudayaan suatu masyarakat, semakin kompleks pula macam dan jenis sampahnya.

2.6.7 Dampak Sampah

Suwerda (2012) mengemukakan beberapa dampak apabila sampah tidak dikelola dengan baik sebagai berikut:

1. Sampah dapat menjadi sumber penyakit, lingkungan menjadi kotor. Hal ini akan menjadi tempat yang subur bagi mikroorganisme patogen yang berbahaya bagi kesehatan manusia, dan juga menjadi tempat sarang lalat, tikus dan hewan liar lainnya.
2. Pembakaran sampah dapat berakibat terjadinya pencemaran udara yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat, dan memicu terjadinya pemanasan global.
3. Pembusukan sampah dapat menimbulkan bau yang tidak sedap dan berbahaya bagi kesehatan. Cairan yang dikeluarkan dapat meresap ke tanah, dan dapat menimbulkan pencemaran sumur, air tanah, dan yang dibuang ke badan air akan mencemari sungai.
4. Pembuangan sampah ke sungai atau badan air dapat menimbulkan pendangkalan sungai, sehingga dapat memicu terjadinya banjir (Kahfi, 2017).

2.7 Kajian Teori tentang Kesadaran Masyarakat

Menurut Soekanto (1982) menyatakan bahwa terdapat empat indikator kesadaran yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan menunjuk pada tingkat kesadaran tertentu, mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, antara lain: pengetahuan, pemahaman, sikap, pola perilaku (tindakan). Priyono (1996) mengemukakan, kesadaran akan isu-isu lingkungan berarti menjadi berwawasan lingkungan dan memahami tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menemukan solusi atas masalah-

masalah tersebut. Jadi, dari teori di atas dapat dijelaskan bahwa indikator kesadaran adalah pengetahuan dan pemahaman.

Menurut Galler (2000) tahapan-tahapan kesadaran yaitu:

1. *Inconscious Incompetence*, yaitu tahapan pertama dimana seseorang tidak mengerti apa yang harus dilakukan.
2. *Conscious Incompetence*, yaitu tahapan kedua dimana seseorang memahami atau tahu apa yang harus dilakukan, tetapi perlu adanya pembelajaran bagaimana melakukannya secara benar.
3. *Conscious Competence*, yaitu tahapan ketiga dimana seseorang dapat melakukannya dengan benar karena telah mengikuti aturan yang telah ditetapkan.
4. *Unconscious Competence*, yaitu tahapan terakhir dimana seseorang telah memiliki kebiasaan dan mengetahui secara benar apa yang mengetahui.

2.8 Kajian tentang Penataan Lingkungan

2.8.1 Definisi *Green Social Work*

Jaka Ramdani dalam jurnal tentang intervensi komunitas berbasis *Green Social Work* (2020) menjelaskan bahwa *Green Social Work* disebutkan sebagai bentuk praktik pekerjaan sosial profesional yang berfokus pada saling ketergantungan diantara individu dengan individu, organisasi sosial dan hubungan antara orang-orang bahkan flora dan fauna di habitat fisiknya, interaksi antara krisis lingkungan sosial ekonomi dan fisik serta perilaku interpersonal yang merusak kesejahteraan manusia dan planet bumi. Hal ini mengatasi masalah dengan mengkonseptualisasikan basis sosial masyarakat setempat yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya.

2.8.2 Tujuan *Green Social Work*

Menurut Prof. Lena, "*Green Social Work* (GSW) berfokus pada bagaimana organisasi sosial berhubungan antara masyarakat dan interaksi dengan flora dan fauna di habitat fisik. GSW mempunyai tugas untuk mengatasi ketidaksetaraan struktural dan lingkungan yang terdegradasi, bagaimanapun penyebabnya serta mengembangkan model alternatif yang berkelanjutan untuk pembangunan sosial-ekonomi. GSW menilai risiko yang ditimbulkan oleh bahaya dan mempunyai argumentasi yaitu transformasi konseptual dan sosial holistik yang mendalam, hubungan yang berkelanjutan antara orang-orang dan makhluk hidup lain,

transdisipliner berkaitan dengan semua ilmu dan profesi dalam keterlibatan dengan komunitas/penduduk setempat untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dan menanggapi kebutuhan masyarakat.

2.8.3 Peranan Pekerjaan Sosial dalam Penataan Lingkungan

Salah satu perspektif yang kemudian muncul dan berkembang dalam menangani permasalahan lingkungan alam di bidang pekerjaan sosial adalah perspektif *Green Social Work* yang dalam implementasinya dapat dipandang melampaui kewajiban sipil seorang pekerja sosial dalam memperhatikan lingkungan alam dalam praktik dan tanggung jawab atas kehidupan manusia di masa depan. Kerentanan yang meningkat dalam kehidupan orang miskin menyebabkan peningkatan risiko, sehingga berbagai upaya untuk mengurangi dan menghilangkan kerentanan yang dihadapi menjadi bagian penting dari strategi pengurangan risiko seperti pendapat (Peeters, 2010) yang menyatakan bahwa hal ini dapat dilakukan melalui pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Sebagai legitimasi konseptual dalam menangani permasalahan lingkungan fisik, konsepsi *social work* tidak hanya sebatas mempersoalkan bagaimana berbagai upaya pengentasan kerentanan tersebut digunakan oleh orang-orang dalam masyarakat kontemporer, melainkan praktik *social work* juga menegaskan upaya penegakan hak asasi manusia dan keadilan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat dan lingkungan saat ini maupun di masa yang akan datang. Kepedulian *Green Social Work* untuk menangani bentuk-bentuk kerusakan lingkungan yang merugikan karena merusak kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dipandang telah memberikan alasan yang membenarkan keterlibatan pekerja sosial dalam menangani permasalahan lingkungan fisik (Dominelli, 2015).

(Dominelli, 2015) berpendapat bahwa saling ketergantungan antargenerasi di antara semua makhluk hidup dan lingkungan fisik menjadi pertimbangan utama pentingnya upaya mengembangkan model kehidupan alternatif yang berkelanjutan dan tidak bertentangan dengan kebutuhan manusia, flora dan fauna yang hidup bersama dan berbagi sumber daya alam dengan manusia. Namun faktanya banyak kerusakan pada lingkungan fisik yang disebabkan oleh tingkah laku manusia yang buruk dalam memperlakukan lingkungan fisik, sehingga

menyebabkan terjadinya bencana alam yang merugikan kehidupan manusia dan merusak kondisi lingkungan fisik.

Semangat solidaritas yang dibangun dalam pekerjaan sosial menunjukkan kondisi saling tergantung antara kehidupan manusia dengan lingkungan fisik, sehingga hal ini menjadi dasar kewajiban bagi masyarakat untuk peduli terhadap sesama dan saling peduli terhadap hak bersama dalam menjaga kondisi lingkungan fisik di saat sekarang dan di masa yang akan datang. Keterlibatan profesi pekerjaan sosial diperlukan dalam mengatasi ketidaksetaraan sosial; mengubah model pembangunan sosio-ekonomi yang berakar pada neoliberalisme dan degradasi lingkungan yang berdampak negatif terutama pada masyarakat yang kurang beruntung; serta membuat negara-bangsa di dunia berkomitmen pada keadilan sosial dan mematuhi Universal Declaration of Human Rights (UDHR, Pasal 22- 27).

Pekerja sosial pun harus memikirkan dan merumuskan upaya yang dapat ditempuh untuk membuat masyarakat memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan dapat berperilaku baik terhadap lingkungan fisik, karena pengalaman menunjukkan bahwa sebagian besar permasalahan dalam kehidupan masyarakat dapat dikurangi dengan melakukan perencanaan yang cermat dan melakukan penilaian terhadap lingkungan secara baik dan holistik. Strategi pengurangan risiko akan berjalan lebih efektif jika aktivitas yang diusulkan melibatkan semua pihak yang terkait (*stakeholder*) dan upaya pengurangan risiko tersebut dimasukkan ke dalam kebiasaan masyarakat dan dibudayakan melalui rutinitas kehidupan sehari-hari daripada dilaksanakan sebagai acara khusus yang bersifat seremonial dan akan mudah untuk dilupakan.

Melibatkan semua pihak yang terkat (*stakeholder*) dalam membuat keputusan tentang apa yang harus dilakukan dalam mengurangi risiko dan meningkatkan ketahanan untuk diri mereka sendiri dan komunitas mereka akan menjadi sarana untuk memproduksi pengetahuan secara bersama-sama dan menjadi sarana pembentukan kemitraan yang melibatkan berbagai macam keilmuan lintas disiplin, sehingga hal ini memungkinkan terjadinya kontak secara langsung antara masyarakat lokal dengan tenaga ahli yang diharapkan akan melahirkan upaya-upaya berbasis pengetahuan dan teknologi modern yang sesuai dengan konteks masyarakat lokal, sehingga upaya mengurangi risiko dapat sejalan dengan nilai-nilai lokalitas dalam kehidupan masyarakat lokal. Hal ini

dilakukan untuk menghindari terjadinya penolakan dan resistensi masyarakat lokal terhadap upaya-upaya pengurangan risiko yang dilakukan oleh pihak luar bersama pekerja sosial.

Salah satu gagasan mengenai keterlibatan pekerjaan sosial dalam menangani permasalahan lingkungan adalah konsep *Green Social Work* yang disampaikan oleh (Dominelli, 2015) Gagasan konseptual (Dominelli, 2015) menjelaskan bahwa *Green Social Work* dilaksanakan dengan mengedepankan tugas-tugas yang harus dilakukan, yaitu: 1) menilai kebutuhan; 2) mengoordinasikan dan mengirimkan barang dan jasa; 3) membantu keluarga untuk memenuhi kewajiban mereka; membantu reunifikasi keluarga, 4) mendukung individu dan komunitas dalam membangun kembali kehidupan mereka, mengembangkan ketahanan dan membangun kapasitas untuk meminimalkan risiko di masa depan; 5) mengadvokasi, melobi dan memobilisasi perubahan yang bertujuan untuk: mencegah berlanjutnya ketidaksetaraan struktural; dan mengembangkan model alternatif berkelanjutan untuk pembangunan sosial ekonomi; memobilisasi perubahan yang melindungi lingkungan dan mencegah bencana di masa depan.

Terkait hal tersebut, (Boetto, 2017) menyatakan bahwa saat ini diperlukan upaya perubahan yang bersifat transformatif dalam praktik pekerjaan sosial dan profesi pekerjaan sosial. Pekerjaan sosial perlu melakukan orientasi ulang secara mendasar khususnya terhadap persepsi yang berpusat pada manusia, menuju pandangan dunia yang mencerminkan saling ketergantungan antara manusia dengan dunia fisik (lingkungan alam), salah satunya seperti pemikiran yang diusung oleh perspektif *Green Social Work*.

Dalam praktiknya, perspektif *Green Social Worker* dapat diwujudkan dalam berbagai level praktik pekerjaan sosial dan berbagai bentuk program baik dalam praktik pada level mikro bersama individu dan kelompok kecil; praktik pada level mezzo bersama kelompok dan organisasi; ataupun praktik pada level makro bersama komunitas, masyarakat dan tataran kebijakan. Berbagai bentuk program yang dapat digagas dan dilaksanakan oleh pekerja sosial dengan mengusung praktik *Green Social Work* antara lain berupa program edukasi, pendampingan, gerakan sosial, advokasi, dan bahkan program penyusunan kebijakan.

BAB III

PROFIL KOMUNITAS

3.1 Latar Belakang Desa Campaka

3.1.1 Sejarah/Latar Belakang Desa Campaka

Campaka adalah nama sebuah desa di Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut. Nama desa ini hampir serupa dengan nama pohon cempaka. Berdirinya desa indah dan asri yang menyimpan banyak memori ini tak luput dari jasa para pejuang yang berada di dalamnya. Mereka gigih dan bekerja sama tanpa pamrih, hanya berharap ridho dari Allah yang Maha Asih. Tak peduli seberapa banyak yang telah dikorbankan, karena tujuan utamanya yaitu membangun sebuah tempat yang nyaman dan tentram.

Sebelum Campaka lahir, daerah yang sekarang kita tinggali ini merupakan bagian dari desa Malangbong yang kemudian dimekarkan menjadi desa Sukamanah. Lalu dikarenakan banyaknya latar belakang yang muncul, tujuh orang tokoh penting dibalik lahirnya desa Campaka yaitu: Pak Achmad Zafar, Aki Abib, Mayor Sulaiman, Pak Mamad Mulyana, Pak Ojo. Pak Emod, dan Ibu Titim berinisiatif untuk memekarkan kembali desa melahirkan desa baru; yaitu Campaka. Sukamanah, sehingga untuk menjadikan Campaka benar-benar ada dan diakui negara tidak semudah membalikkan telapak tangan. Terjadi banyak pertarungan dan perdebatan, tak urung membuat perselisihan hingga pertengkaran. Keringat panas dan dingin membaaur menjadi satu kesatuan, desahan napas tak bisa lagi dielakkan, letih dan lesu merupakan konsekuensi yang dirasakan.

Hal tersebut dibuktikan karena warga masyarakat bagian utara wilayah ini (Campaka) menginginkan jika pusat desa berada di kampung Cikadu, karena letaknya yang berada di tengah-tengah. Namun, hal itu tak dapat direalisasikan karena kampung Cikadu letaknya kurang strategis, di mana banyak yang harus diperhitungkan saat itu. Salah satunya angkutan tak bisa masuk ke kampung Cikadu karena belum ada jalan 'beureum' (jalan desa) yang bisa digunakan kendaraan beroda empat.

3.1.2 Kondisi Geografis

Desa Campaka merupakan salah satu desa di Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. Desa Campaka memiliki luas wilayah keseluruhan 331 Ha, luas wilayah terbagi luas pesawahan 80, 704 Ha, Luas

Ladang 110. 200 Ha, Luas Hutan 102, 885 Ha, luas daerah Pemukiman 37, 211 Ha. Desa Campaka yang terdiri dari dari 3 Dusun, 8 RW dan 36 RT. Secara Keseluruhan berikut gambaran peta Desa Campaka Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut sebagai berikut :



Gambar 3. 1 Peta Desa Campaka

Sumber: Profil Desa Campaka Tahun 2023

Desa Campaka berbatasan dengan wilayah lain, berikut ini penjabaran dari setiap Batasan Desa Campaka :

Tabel 3. 1 Batas Wilayah Desa Campaka

No.	Batas Wilayah	Daerah
1.	Sebelah Utara	Desa Sukamanah
2.	Sebelah Timur	Wilayah Kehutanan
3.	Sebelah Barat	Desa Mekar Mulya
4.	Sebelah Selatan	Desa Cinagara - Cikarag

Sumber: Profil Desa Campaka Tahun 2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa Desa Campaka terletak diantara 4 desa yang berada di Kecamatan Malangbong. Adapun batas-batas dari Desa Campaka Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut diantaranya batas wilayah sebelah Utara yaitu Desa Sukamanah, batas wilayah Timur yaitu Wilayah Kehutanan, batas wilayah Sebelah Barat yaitu Desa Mekar Mulya, dan batas wilayah Sebelah Selatan yaitu Desa Cinagara dan Cikarang.

Melihat kondisi geografis desa Campaka juga dapat dilihat dari orbitasi desa menuju pusat pemerintah kecamatan, maupun ibu kota kabupaten. Berikut table orbitasi Desa Campaka berdasarkan jarak dan waktu tempuh :

Tabel 3. 2 Orbitasi Desa Campaka

Menuju Pusat Pemerintahan	Jarak	Waktu
Kecamatan	3,2 KM	9 Menit
Kabupaten	112 KM	3 Jam 19 Menit
Ibukota Provinsi Jawa Barat	73 KM	1 Jam 50 Menit

Sumber: Profil Desa Campaka Tahun 2023

Tabel diatas dapat dilihat bahwa jarak tempuh menuju Kecamatan Malangbong adalah 3,2 KM dengan waktu tempuh sekitar 9 menit akses jalan yang cukup baik. Jarak tempuh menuju Kabupaten Garut adalah 112 KM dengan melewati jalan beraspal dengan membutuhkan waktu tempuh sekitar 3 jam 19 menit. Selanjutnya menuju Ibukota Provinsi Jawa Barat yaitu 73 KM dengan membutuhkan waktu tempuh sekitar 1 Jam 50 Menit.

3.1.3 Perkembangan Masyarakat

Penduduk Desa Campaka sangat beragam. Mereka memiliki tingkat kekeluargaan yang tinggi. Di beberapa kampung sifat gotong royong masyarakat masih erat dan terjaga sampai sekarang. Hal ini dibuktikan jika ada seorang yang memiliki hajatan ataupun acara maka warga yang lain masih berbondong-bondong untuk tolong menolong dan gotong royong membantu. Desa Campaka juga memiliki masyarakat yang terkenal agamis dikarenakan hampir seluruh penduduk beragama Islam sehingga sering diadakan acara-acara peringatan hari besar Islam. Sebagian besar masyarakat Desa Campaka bekerja di bidang pertanian, peternakan, dan budi daya. Namun, ada juga yang memilih merantau di luar wilayah. Masyarakat juga sudah tergolong berkembang dalam bidang pertanian. Hal ini ditunjukkan dengan proses pengolahan pertanian secara dan perkebunan sudah diolah dengan modern menggunakan tenaga mesin.

Desa Campaka juga dilengkapi fasilitas yang disediakan sudah cukup lengkap mulai fasilitas olahraga seperti GOR Badminton dan voly; fasilitas pendidikan dari SD hingga SMA; fasilitas jalan; fasilitas kesehatan berupa klinik dan praktek bidan.

3.2 Komponen Khusus dalam Masyarakat

3.2.1 Karakteristik Demografi

Jumlah penduduk desa Campaka sebanyak 6.876 jiwa dengan jumlah 1.810 Kartu Keluarga (KK). Adapun jumlah penduduk Perempuan 3.279 jiwa,

sedangkan penduduk laki-laki sebanyak 3.597 jiwa. Informasi mengenai jumlah penduduk mengetahui banyaknya orang yang tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu sehingga dapat digunakan untuk merencanakan pelayanan sosial ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, dan papan serta kebutuhan sosial lainnya.

3.2.2 Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi digunakan untuk melihat komposisi sektor ekonomi di suatu wilayah. Desa Campaka mayoritas penduduknya bekerja sebagai buruh harian lepas sapu ijuk dan pengerajin pandai besi yang memperoleh penghasilan per hari dan per bulan. Selain itu terdapat beberapa profesi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Campaka seperti petani, PNS, dan wirausaha.

3.2.3 Kondisi Perumahan

Kondisi perumahan di Desa Campaka beranekaragam baik rumah permanen atau rumah semi permanen. Pemukiman masyarakat cukup jauh dari jalan raya, namun mayoritas sudah termasuk jenis rumah permanen. Berbeda masyarakat di beberapa kampung yang masuk ke jalan kecil dengan akses jalan sudah diaspal.

Berdasarkan hasil asesmen praktikan, hanya beberapa kampung saja yang termasuk padat penduduk karena selebihnya pemukiman penduduk terbilang cukup luas dengan banyak lahan pertanian yang sekitar lingkungannya. Rumah-rumah yang dalam kondisi tidak layak sudah mendapatkan bantuan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

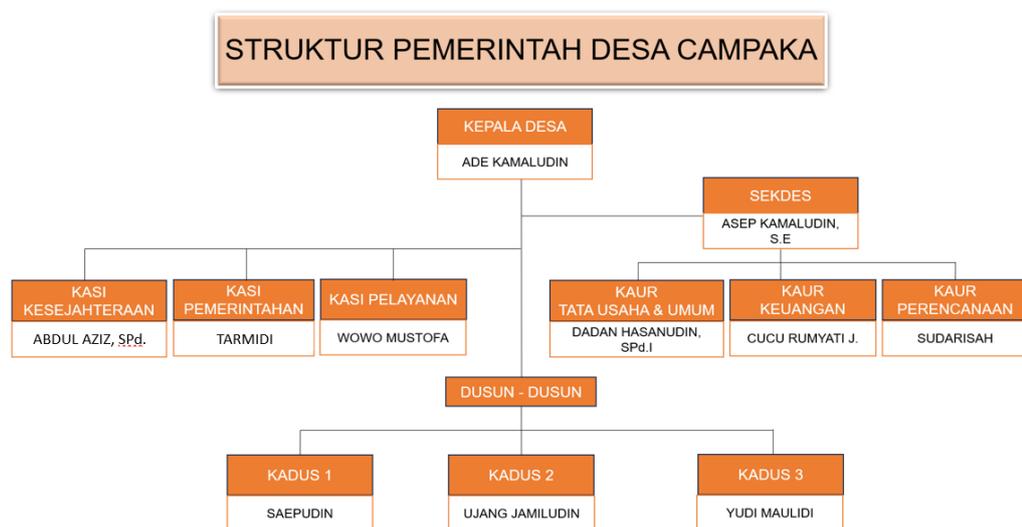
3.2.4 Tingkat Pendapatan Penduduk

Sistem pengelompokan dalam masyarakat adalah perbedaaan kelompok masyarakat ke dalam beberapa kelompok atau lapisan yang bertingkat yang pada umumnya dilihat dari kondisi perekonomian dan kekuasaan atau jabatan yang mereka punya. Pengelompokan masyarakat di bedakan menjadi tiga yaitu kelompok masyarakat kelas atas, kelompok masyarakat kelas menengah, dan kelompok masyarakat kelas bawah. Sistem pengelompokan dalam masyarakat di Desa Campaka tidak terlalu nampak, hal ini disebabkan karena masyarakat dapat berbaur dengan baik dan tidak ada batasan diantara mereka baik dalam berinteraksi maupun pergaulan sehingga suasana yang ditimbulkan adalah keharmonisan serta kerukunan diantara masyarakat. Pengelompokan di

masyarakat sebatas pengelompokan secara administratif yaitu pengelompokan berdasarkan wilayah seperti rukun warga dan rukun tetangga, kelompok dasawisma, kelompok pengajian dan lainnya.

3.2.5 Struktur kepemimpinan

Struktur kepemimpinan Desa Campaka dipimpin oleh seorang kepala Desa beserta perangkat desa. Jumlah perangkat desa yaitu 11 orang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris, Kepala Seksi pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Tata Usaha dan Umum, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Perencanaan.



Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Desa Campaka

Sumber: Profil Desa Campaka Tahun 2023

Berdasarkan bagan diatas, Desa Campaka dipimpin oleh Bapak Ade Kamaludin sebagai Kepala Desa dengan dibantu oleh perangkat dan aparat desa lainnya untuk menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembungunan desa, dan pemberdayaan Masyarakat desa Campaka.

3.2.6 Sisem Nilai Budaya

Sistem nilai budaya merupakan sistem yang ada di masyarakat dilaksanakan selama bertahun-tahun dan menjadi suatu pola nilai-nilai dan norma-norma yang melekat di masyarakat. Desa Campaka memiliki nilai budaya yang lekat dan masih dilaksanakan hingga saat ini. Berikut merupakan budaya yang masih dilesatarakan hingga saat ini di Desa Campaka:

a. Beas Perelek

Beas Perelek merupakan salah satu budaya lokal yang masih melekat di masyarakat desa khususnya di Desa Campaka. Masyarakat melakukan tradisi jimpitan yakni iuran sukarela berupa uang maupun beras yang dikumpulkan melalui petugas atau warga yang telah ditunjuk.

b. Pengajian

Pengajian yang dilakukan di Desa Campaka dilaksanakan di masing-masing Rukun Tetangga (RT) yang dilaksanakan di setiap masjid/mushola yang ada di desa dilakukan seminggu sekali, sedangkan pengajian tingkat desa dilakukan sebulan sekali. Pengajian rutin dilakukan ibu-ibu dan bapak-bapak. Partisipasi masyarakat dalam melakukan pengajian cukup tinggi karena sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan di Desa Campaka. Kegiatan pengajian yang dilakukan secara terjadwal juga dapat dilakukan saat ada perayaan seperti pengajian untuk keberangkatan jamaah umrah/haji, khatam al-quran, lahiran, kematian, dan juga perayaan besar agama islam.

c. Botram

Budaya sunda yang melekat pada masyarakat Desa Campaka selanjutnya adalah botram, yang mana tradisi ini merupakan tradisi berkumpul untuk makan bersama dan saling berbagi yang dilakukan oleh masyarakat sunda dengan. Suasana kekeluargaan dan kebersamaan sangat kental dalam tradisi ini. Menghubungkan sanak saudara, sahabat, dan memperkuat komunitas. Botram biasa dilakukan dimana pun, bisa di balai warga, masjid, rumah warga, kebun, sawah dan tempat lain yang biasa digunakan untuk tempat berkumpul.

3.2.7 Sistem Pengelompokan dalam Masyarakat

Sistem pengelompokan masyarakat di Desa Campaka terbagi menjadi beberapa kelompok, yakni pengelompokan sosial berdasarkan kegiatan rutin di masyarakat, organisasi masyarakat, kelompok olahraga, wilayah tempat tinggal, pekerjaan, dan suku berikut pengelompokan dalam Masyarakat Desa Campaka sebagai berikut:

1) Kegiatan Rutin Masyarakat

Sistem pengelompokan di Desa Campaka berdasarkan kegiatan rutin masyarakat, seperti kelompok pengajian rutin RT dan RW yang dilaksanakan sekali dalam seminggu, kelompok posyandu yang dilaksanakan setiap hari kamis pada malam hari, kelompok posyandu yang dilaksanakan dalam sebulan, kelompok ronda malam yang dilaksanakan secara bergiliran setiap malamnya, kelompok kegiatan arisan, kegiatan bersih desa, bersih kampung, dan bersih parit.

2) Organisasi Masyarakat

Pengelompokan masyarakat di Desa Campaka juga dapat dilihat dengan adanya beberapa organisasi-organisasi yang bersumber dari masyarakat, seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pos Layanan Terpadu (Posyandu), Wanita Kelompok Tani (WKT).

3) Kelompok Olahraga

Pengelompokan masyarakat di Desa Sukatani berdasarkan kegiatan olahraga cukup banyak ditemui, seperti kelompok senam, kelompok olahraga boal voly, kelompok olahraga bulu tangkis, dan kelompok olahraga tenis meja.

4) Wilayah Tempat Tinggal

Pengelompokan masyarakat berdasarkan wilayah tempat tinggal di Desa Sukatani dapat digambarkan sesuai dengan Dusun, Rukun Tetangga (RT), dan Rukun Warga (RW). Desa Campaka terdiri dari 3 Dusun dan 8 RW.

3.2.8 Sistem Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Pelayanan Kesejahteraan Sosial merupakan upaya untuk mencapai keberfungsian sosial bagi individu maupun masyarakat. Desa Campaka mengelola beberapa sistem pelayanan kesejahteraan sosial yang di berikan terhadap individu, keluarga, maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial baik bersifat pencegahan, pengembangan, maupun rehabilitasi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat atau guna memenuhi kebutuhan sehingga masyarakat secara maksimal mampu untuk menjalankan fungsi sosialnya secara memadai. Kegiatan pelayanan tersebut antara lain seperti:

a. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bantuan sosial tunai bersyarat yang diberikan kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajiban sebagai penerima manfaat PKH. Persyaratan tersebut berupa kehadiran difasilitas pendidikan dan Kesehatan.

b. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM secara tepat sasaran dan tepat waktu. Pada saat ini pencairan BPNT dilakukan dalam bentuk pencairan uang langsung sebesar 200.000 rupiah untuk tiap KPM.

c. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Pos pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Tujuan dari posyandu adalah menurunkan angka kematian bayi, angka kemandian ibu hamil, melahirkan dan nifas, membudayakan NKBS, meningkatkan peranserta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera. Kegiatan posyandu di Desa Campaka dilaksanakan setiap bulan diseluruh RW. Kegiatan yang dilakukan yaitu penimbangan anak, imunisasi, pengecekan kesehatan untu ibu hamil dan lain sebagainya.

d. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau disingkat BLT-DD adalah salah satu bantuan yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu dan atau rentan. Besaran bantuan adalah sebesar RP. 200.000 per bulan untuk satu keluarga.

3.2.9 Kemungkinan Menerima Perubahan

Kemungkinan masyarakat dalam menerima perubahan dalam konteks pengembangan masyarakat dapat terlihat dari sambutan dan antusias masyarakat baik ketika praktikan melakukan kunjungan, kegiatan kumpul warga. Masyarakat menyambut kedatangan praktikan secara terbuka baik untuk kegiatan formal maupun informal, terbuka terhadap perubahan yang akan dilaksanakan bersama

masyarakat dengan mencoba memahami apa yang disampaikan praktikan dan bertanya untuk memperjelas apa yang sudah disampaikan. Hal tersebut juga dilatarbelakangi oleh kegiatan yang pada tahun-tahun sebelumnya banyak universitas maupun lembaga pendidikan yang melakukan KKN ataupun penelitian di desa ini, sehingga ketika ada suatu kegiatan yang membawa perubahan di masyarakat, mereka akan senantiasa menerima dan menyambut baik. Sebagian besar masyarakat juga memberikan persetujuan atas rencana umum kegiatan yang akan dilaksanakan oleh praktikan. Meskipun begitu, terdapat beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan dalam teknis pelaksanaannya karena berkaitan dengan sistem nilai budaya yang berkembang dan menyesuaikan dengan aktivitas masyarakat Desa Campaka.

3.3 Kehidupan Interaksi Sosial Masyarakat

3.3.1 Kerjasama Masyarakat

Masyarakat di Desa Campaka dalam kehidupan sehari – harinya terutama hubungan interaksi sosial antar masyarakatnya sangat erat. Banyak kegiatan – kegiatan yang bertujuan untuk menyambung tali silaturahmi antar warga masyarakat seperti kegiatan pengajian rutin. Hampir di setiap RT memiliki jadwal pengajian rutin yakni pengajian mingguan dan bulanan. Dikarenakan kultur keagamaan di Desa Campaka masih sangat kuat sehingga kegiatan gotong royong dalam rangka membantu tetangga membangun rumah dengan bahu membahu menggotong material yang diperlukan untuk pembangunan jalan, ada yang berjaga – jaga agar jalanan tidak banyak dilintasi sehingga tidak mengganggu, lalu ibu – ibu juga ramai memberikan makanan untuk masyarakat yang bekerja.

3.3.2 Komunikasi Masyarakat

Masyarakat di Desa Campaka sudah dibuktikan terdapat kerjasama yang kuat antar masyarakatnya pada point sebelumnya. Ketika ditanyakan bagaimana komunikasi dalam masyarakatnya tentu saja komunikasi antar warganya sangatlah baik Desa Campaka sangat menjunjung tinggi nilai keagamaan terlihat dengan banyaknya Pondok Pesantren. Nilai kekeluargaan dan penerimaan di Desa Campaka sangat baik, terbukti dengan kedatangan praktikan yang berasal dari berbagai daerah sehingga sedikit sulit untuk berbahasa sunda, namun tetap diterima dengan sangat baik oleh warga masyarakat Desa Campaka.

3.3.3 Keeratan Hubungan Masyarakat

Masyarakat Desa Campaka memiliki hubungan kekeluargaan yang sangat erat antar masyarakat, tetangga bagaikan saudara istilahnya. Ketika masyarakat lain mendapati kesulitan, tetangga pun berdatangan untuk memberikan bantuan. Disuatu daerah tidak semua warganya merupakan warga asli desa tersebut, begitu juga di Desa Campaka. Walaupun terdapat banyak pendatang dari desa ataupun kabupaten lain tetap saja warga tersebut diterima dengan sangat baik. Banyaknya Rukun Warga (RW) yang dipecah kembali menjadi perkampung dan per Rukun Tetangga tetap mengeeratkan hubungan interaksi sosial antar masyarakatnya.

3.3.4 Konflik Masyarakat

Berdasarkan keeratan interaksi yang ada di Desa Campaka maka dapat dikatakan hampir tidak ada konflik yang berarti antar anggota masyarakat Desa Sirnagalih. Hal tersebut terlihat dari adanya kerukunan antar anggota masyarakatnya. Apabila konflik-konflik kecil di masyarakat dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Konflik yang terjadi di Desa Sirnagalih biasanya disebabkan oleh perbedaan pendapat antar anggota masyarakat, kesalahpahaman dalam rumah tangga, ataupun hal-hal kecil lainnya.

3.4 Identifikasi Potensi dan Sumber

Hasil pengamatan yang dilakukan pada proses asesmen komunitas yang telah dilaksanakan selama praktikum, dapat diidentifikasi beberapa potensi dan sumber yang dimiliki oleh Desa Campaka. Potensi dan sumber ini selanjutnya menjadi aset desa yang dapat dimanfaatkan untuk Upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Adapun potensi dan sumber tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Potensi dan Sumber

No	Potensi dan sumber	Keterangan
1.	Potensi	1. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 2. Kelompok Wanita Tani (KWT) 3. Kader Posyandu 4. Pengerajin Sapu Ijuk 5. Pandai Besi 6. Karang Taruna 7. Bidan Desa 8. Badan Usaha Desa (Bumdes) 9. RT/RW 10. Bintara Pembina Desa (Babinsa) 11. Bintara Pembinaan Masyarakat (Babinmas)

No	Potensi dan sumber	Keterangan
2.	Sumber Alamiah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lahan Pertanian 2. Perkarangan Hidroponik 3. GOR 4. Posyandu 5. Madrasah dan Masjid 6. Lapangan Voli 7. Aula Desa
3.	Sumber Non Material	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arisan PKK 2. Beas Perelek 3. Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
4.	Alamiah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lahan Pertanian 2. Lahan Perkebunan 3. Hutan Lindung

Sumber: Profil Desa Campaka Praktikum Komunitas 2023

3.5 Identifikasi Masalah

3.5.1 Permasalahan Sosial yang Tampak

Permasalahan sosial yang ditemukan bahwa terdapat beberapa masalah sosial yang Nampak yaitu diantaranya :

Tabel 3. 4 Masalah Sosial yang Tampak

No	Jenis Permasalahan	Masalah
1.	Jaminan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Kepersertaan BPJS PBI • Bantuan sosial yang tidak tepat sasaran
2.	Pemberdayaan sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Akses KPM PKH terhadap peningkatan perekonomian keluarga • Pengelolaan Hidroponik oleh KWT
3.	Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Membuang sampah sembarangan • Pengelolaan sampah • Tidak ada bank sampah • Tidak ada TPS
4.	Bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya jalur evakuasi • Kurang pahamnya mitigasi atau siaga bencana

Sumber: Profil Desa Campaka Praktikum Komunitas 2023

Praktikan memfokuskan permasalahan lingkungan yang terjadi di RW 06 Kampung Salapinang yaitu masyarakat yang membuang sampah sembarangan pada lahan milik orang lain. Sehingga mengakibatkan penumpukan sampah, bau, yang tidak sedap, merusak pemandangan dan kerugian untuk Masyarakat yang tinggal dekat dengan Sungai ataupun lahan kosong yang dijasikan Masyarakat untuk membuang sampah lalu membakarnya. Permasalahan terjadi disebabkan karena tidak adanya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Desa Campaka

sehingga masyarakat membuang sampah sembarangan. Berdasarkan hasil asesmen penyebab Desa Campaka tidak memiliki TPS dikarenakan tidak ada lahan dan anggaran untuk membuat TPS Desa.

3.5.2 Identifikasi Upaya yang dilakukan

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Desa Campaka hingga saat ini yaitu sebatas himbauan untuk pemilahan sampah artinya untuk sampah organik dapat dikubur dan sampah anorganik dikumpulkan dan dibakar. Adapun rencana untuk pembangunan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Tahun 2023 namun belum direalisasikan. Adapun upaya dari tokoh masyarakat untuk melarang dan menghimbau jangan membuang sampah, namun tidak ada hasil dari upaya tersebut. Dikarenakan jumlah warga yang banyak dan acuh dengan larangan maka tidak ada hasil warga masih membuah samah di Sungai dan lahan kosong.

3.5.3 Identifikasi Hasil yang telah dicapai

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Desa, Organisasi Masyarakat maupun warga desa dalam menangani permasalahan sampah dianggap kurang efektif, sebab himbauan untuk tidak membuang sampah tidak memiliki arti apabila tidak tersedianya tempat sampah dan tempat pembuangan akhir sampah di Desa Campaka. Selain itu, warga desa juga belum sepenuhnya memahami bagaimana cara pengelolaan sampah.

BAB IV

PELAKSANAAN PRAKTIKUM

4.1 Inisiasi Sosial

Tahap pertama dalam pelaksanaan Praktikum Komunitas di Desa Campaka dimulai dengan tahap Inisiasi Sosial. Inisiasi Sosial merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk melakukan kontak pendahuluan, memahami karakteristik masyarakat, membangun relasi (*Trust Building*) dan dukungan sosial dari masyarakat serta membangun kesepakatan untuk bekerjasama dalam melakukan pengembangan masyarakat, serta membangun akses dengan berbagai *stakeholder* yang ada di masyarakat. Teknik Pekerjaan Sosial ini melibatkan berbagai masyarakat agar praktikan diterima dan membaaur dengan masyarakat. Kerjasama yang merespon isu penting berkenaan dengan kebutuhan pengembangan sumber dan potensi kesejahteraan sosial serta pencegahan atau penanganan permasalahan sosial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Inisiasi Sosial dalam Praktikum Komunitas dilaksanakan mulai pada tanggal 01 - 04 November 2022 dengan sasaran yaitu Kepala Desa Campaka, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan organisasi-organisasi lokal Desa Campaka seperti PKK, Karang Taruna, BPD, dan Posyandu. Teknik yang digunakan pada tahapan ini yaitu wawancara, *Transect Walk*, *Home Visit*, *Community Involvement*, pertemuan Formal maupun Informal dengan masyarakat. Berikut ini merupakan beberapa kegiatan inisiasi sosial yang telah dilakukan oleh praktikan selama kegiatan Praktikum Komunitas di Desa Campaka Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut:

4.1.1 Proses Inisiasi Sosial

Berikut ini merupakan beberapa proses yang dilakukan praktikan dalam tahapan inisiasi sosial, sebagai berikut :

a. Pertemuan dengan Aparat Desa

Pada hari Rabu, 01 November 2023 praktikan melakukan kegiatan Pertemuan dengan Aparat Desa dengan teknik percakapan sosial dilakukan dengan tujuan untuk membangun komunikasi awal dan menjalin relasi bersama pihak desa dan masyarakat serta membangun kepercayaan dengan berbagai elemen yang ada didalam masyarakat.

Pada tahap ini praktikan menghubungi Kepala Desa Campaka dan perangkat desa lainnya untuk menjelaskan tentang pelaksanaan kegiatan Praktikum Komunitas sekaligus meminta izin untuk melaksanakan kegiatan praktikum pada tanggal 31 Oktober 2023 - 09 Desember 2023 di Desa Campaka. Setelah melakukan komunikasi dengan Kepala desa dan perangkat desa lainnya, praktikan melakukan komunikasi dan kerjasama dengan pihak RT/RW, Kader PKK, Karang Taruna, dan Para tokoh yang ada di masyarakat Desa Campaka untuk mendapat dukungan selama kegiatan Praktikum Komunitas di Desa Campaka ini berlangsung.

b. *Community Involvement*

Pada tanggal 03-07 November 2023 kegiatan *Community Involvement* telah dilakukan oleh praktikan memberikan hasil diantaranya yaitu praktikan menjadi tahu dan saling mengenal dengan tokoh-tokoh masyarakat, dapat diterima dengan baik dan membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan dapat membangun *trust* dengan tokoh-tokoh masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang ada di wilayah tersebut serta dapat melakukan observasi dan melihat potensi wilayah tersebut. Berikut merupakan hasil kegiatan yang diikuti oleh praktikan :

- 1) Kegiatan Pengajian Rutin di Desa
- 2) Kegiatan Posyandu
- 3) Kegiatan Panen bersama Kelompok Wanita Tani (KWT)
- 4) Kegiatan Pembagian Beras Bulog
- 5) Kegiatan Pembagian Bantuan Stunting

c. *Transect Walk*

Kegiatan *transect walk* yang dilakukan pada tanggal 02 November 2023 oleh praktikan diantaranya memberikan hasil yaitu praktikan dapat memahami karakteristik wilayah Desa Campaka, mengetahui sarana dan prasarana maupun fasilitas umum yang ada di Wilayah Desa Campaka, serta dapat memetakan secara umum bagaimana wilayah serta potensi yang ada di Desa Campaka. Praktikan melakukan *transect walk* dengan berjalan kaki dan menggunakan kendaraan sepeda motor dikarenakan jarak antara wilayah ke wilayah lainnya cukup terbilang jauh.

d. *Home Visit*

Pelaksanaan *home visit* dilakukan dengan mengunjungi rumah dari para *key person* atau pimpinan lokal. Praktikan melakukan kegiatan kunjungan ke kediaman Kepala Desa, Ketua RW, dan Koordinator Pokja 1-4. Pelaksanaan *Home Visit* dilakukan pada tanggal 01 November 2023. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjelaskan mengenai maksud dan tujuan praktikum serta untuk mendapatkan dukungan atas rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh mahasiswa praktikan sekaligus memperoleh gambaran umum wilayah Desa Campaka.

4.1.2 Hasil Inisiasi Sosial

Hasil yang diperoleh dari rangkaian kegiatan inisiasi sosial yang telah dilakukan :

a. Pertemuan dengan Aparat Desa

Hasil yang didapat oleh praktikan dari percakapan sosial adalah terjalin hubungan kontak dan kontrak antara praktikan dengan aparat desa serta adanya penerimaan yang baik dan dukungan penuh dari Aparat Desa Campaka, Selain itu, praktikan juga mendapatkan informasi mengenai kegiatan warga Desa Campaka, kondisi dan potensi masyarakat, hingga mayoritas mata pencaharian masyarakat di Desa Campaka.



Gambar 4. 1 Pertemuan dengan Kepala Desa
Sumber: Dokumentasi Praktikum Tahun 2023

b. *Community Involvement*

Pada kegiatan *Community Involvement* yang dilaksanakan dengan cara membaur atau ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat seperti pengajian, posyandu, kegiatan Kelompok Wanita Tani (KWT). Hasil yang diperoleh oleh praktikan diantaranya yaitu mayoritas kegiatan yang ada di masyarakat Desa Campaka adalah terkait dengan

keagamaan seperti pengajian. Setelah mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Campaka bersama masyarakat, praktikan mengetahui dan menjadi saling mengenal dengan tokoh-tokoh yang ada dimasyarakat, baik itu tokoh kepemudaan maupun tokoh masyarakat yang pada akhirnya menumbuhkan hubungan yang baik dengan masyarakat sehingga terbangunnya rasa percaya antara praktikan dengan masyarakat Desa Campaka.



Gambar 4. 2 Community Involvement Desa Campaka
Sumber: Dokumentasi Praktikum Tahun 2023

c. *Transect Walk*

Dalam Pelaksanaan transect walk praktikan mendapatkan informasi mengenai kondisi wilayah Desa Campaka, dan sarana, prasarana hingga fasilitas umum yang ada di wilayah Desa Campaka.



Gambar 4. 3 Transect Walk Desa Campaka
Sumber: Dokumentasi Praktikum Tahun 2023

d. *Home Visit*

Hasil dari tahap *home visit* yang telah dilakukan oleh praktikan adalah masyarakat mengetahui keberadaan praktikan serta mengetahui maksud

dan tujuan dari kegiatan praktikum komunitas yang praktikan laksanakan di Desa Campaka dengan kurun waktu 42 hari. Selain itu pada tahap ini praktikan mendapatkan penerimaan yang baik dari masyarakat serta terbangunnya kepercayaan dan relasi yang baik antara praktikan dengan masyarakat di Desa Campaka.



Gambar 4. 4 Home Visit ke Tokoh Masyarakat

Sumber: Dokumentasi Praktikum Tahun 2023

4.2 Pengorganisasian Sosial

Pengorganisasian sosial adalah suatu upaya dalam melibatkan secara aktif anggota masyarakat (*interest group*). Pengorganisasian sosial merupakan proses dimana praktikan mendapatkan dukungan dari warga masyarakat untuk sadar dan peduli terhadap isu masalah komunitas di masyarakat, mengidentifikasi struktur pengelompokan sosial dan organisasi-organisasi lokal, melibatkan masyarakat untuk menggerakkan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial, serta mencegah dan menangani permasalahan sosial yang ada di Desa Campaka.

4.2.1 Proses Pengorganisasian Sosial

Pengorganisasian sosial dilakukan dengan mengikuti kegiatan yang ada di masyarakat dan menanyakan secara langsung mengenai permasalahan yang telah dihadapi serta sumber yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Proses pengorganisasian sosial yang dilakukan oleh praktikan yaitu dengan mengidentifikasi kelompok dan organisasi sosial dengan mengembangkan potensi dan sumber. Pengorganisasian sosial dilakukan dengan mengidentifikasi *interest group* dan *target group*. Proses pengorganisasian sosial melibatkan warga sehingga mereka menyadari bersama-sama bahwa adanya masalah, kebutuhan, sumber dan kekuatan komunitas untuk diintervensi dan diorganisasikan untuk mencapai perubahan dan penanganan permasalahan yang

diharapkan. Teknik yang digunakan dalam pengorganisasian sosial adalah diskusi dengan kelompok-kelompok sosial di Desa Campaka yang dihadiri oleh perwakilan Ibu PKK, Kader Posyandu, perwakilan kepemudaan, serta beberapa warga lainnya yang ikut hadir dalam kegiatan tersebut.

4.2.2 Hasil Pengorganisasian Sosial

Dari tahap hasil pengorganisasian sosial yang telah dilakukan oleh praktikan diperoleh hasil mengenai identifikasi permasalahan sosial yang ada di Desa Campaka secara garis besar. Setiap tahapan pengorganisasian sosial yang telah dijalani menghasilkan beberapa progress, hasil dari pengorganisasian sosial yang telah dilakukan praktikan adalah sebagai berikut:

1. Karang Taruna

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Desa Campaka memiliki organisasi karang taruna, anggota karang taruna diambil setiap RW,RT di Desa Campaka dan pembentukan karang taruna di Desa Campaka baru berjalan satu tahun. Untuk kegiatan karang taruna baru hanya dilakukan oleh pengurus inti dari karang taruna di Desa Campaka.

2. Kelompok Wanita Tani

Desa Campaka memiliki Kelompok Wanita Tani yang dilakukan oleh ibu-ibu pokja 3. Program yang dilakukan yaitu penanaman hidroponik kangkung, slada, dan pakcoy.

3. Puskesmas

Puskesmas yang ada di Desa Campaka diketuai oleh Bapak Aziz yang juga menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan. Tujuan didirikannya Puskesmas adalah untuk membantu pemerintah dan juga masyarakat dalam menangani permasalahan kemiskinan di Desa Campaka. Upaya yang telah dilakukan yaitu memberikan pelayanan aduan dalam bidang kesehatan. Masyarakat mengadakan keluhannya ke Puskesmas untuk dapat segera ditangani, apabila belum dapat ditangani maka akan dirujuk pada kemitraan lainnya yang relevan dengan permasalahan masyarakat tersebut.

4. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat. Kader PKK di Desa Campaka aktif dalam mengikuti kegiatan dan memiliki program yang sampai sekarang masih berjalan, seperti posyandu, program untuk mengurangi angka stunting di Desa Campaka.

4.3 Asesmen

Pada tahap asesmen dilakukan tahap penggalan informasi dan pendalaman mengenai masalah sosial yang ada di Desa Campaka Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut. Asesmen merupakan salah satu proses dalam praktik pekerjaan sosial, yaitu proses pemahaman dan pengungkapan masalah melalui kegiatan pengumpulan data, penganalisaan data, dan pengambilan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh mengenai permasalahan, kebutuhan, dan perubahan yang diperlukan oleh masyarakat di Desa Campaka. Asesmen dilaksanakan pada tanggal 9 – 15 November 2023. Adapun tahapan asesmen dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap asesmen awal dan tahap asesmen lanjutan.

4.3.1 Asesmen Awal

Assesmen awal merupakan proses dalam praktik pekerjaan sosial yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan serta kebutuhan dan kelompok sasaran yang potensial menjadi penerima manfaat upaya perubahan (*potential target groups*), mengidentifikasi kelompok-kelompok kepentingan (*interest group*) yang relevan dengan permasalahan target groups, mengidentifikasi potensi, sumber, dan kekuatan yang dapat dimanfaatkan baik yang berasal dari dalam maupun luar masyarakat, serta menentukan prioritas masalah komunitas yang akan diintervensi. Asesmen awal dilakukan dengan teknik yaitu *Methodology Participatory of Assessment (MPA)*, *home visit*, *Transect walk*, serta wawancara. Adapun proses dan hasil pelaksanaan asesmen awal diuraikan sebagai berikut :

a. Proses Asesmen Awal

Assesmen awal ini dilakukan oleh praktikan dengan proses sebagai berikut:

1) Wawancara

Praktikan melakukan assesmen awal melalui wawancara mengenai permasalahan sosial khususnya PPKS (Pemerlu Pelayanan

Kesejahteraan Sosial), potensi dan sumber yang dimiliki, adat dan kebiasaan masyarakat, serta gambaran permasalahan yang terdapat di Desa Campaka dan assesmen awal ini dilakukan bersama dengan perangkat Desa Campaka. Selain itu, praktikan juga melakukan assesmen awal melalui kegiatan *Home Visit* kegiatan ini tidak dilakukan sekaligus diwaktu yang sama tetapi dilakukan dengan waktu dan tempat yang berbeda-beda.



Gambar 4. 5 Wawancara bersama Aparatur Desa
Sumber: Dokumentasi Praktikum Tahun 2023

2) *Methodology Participatory of Assessment (MPA)*

Pada asesmen awal praktikan melaksanakan dengan kegiatan *Methodology Participatory of Assessment (MPA)* di Aula Kantor Desa Campaka Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut pada hari Rabu, 08 November 2022 pukul 08.30 WIB. Pada tahap ini dihadiri oleh lapisan masyarakat mulai dari pemerintah desa, masing-masing RW dari RW 01 sampai RW 08 bersama perwakilan RT, PKK, dan Karang Taruna Desa Campaka.

Dalam kegiatan *Methodology Participatory of Assessment (MPA)* praktikan berperan sebagai fasilitator. Praktikan terlebih dulu menjelaskan pengertian dan tujuan dari *Methodology Participatory of Assessment (MPA)*, menjelaskan 5 profil Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yaitu Analisis Jaminan Sosial, Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analisis Pemberdayaan Sosial, Analisis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analisis Penanggulangan Bencana kepada audiens yang hadir dalam pelaksanaan MPA. Kemudian, praktikan mulai menjelaskan terkait permasalahan apa saja yang termasuk dalam permasalahan sosial. Selanjutnya, praktikan mengarahkan kepada warga untuk menuliskan

permasalahan dan potensi yang ada. Setelah menuliskan permasalahan di kertas yang telah dibagikan, selanjutnya praktikan mengelompokkan permasalahan dan potensi yang teridentifikasi sehingga ditemukan prioritas masalah atau didahulukan untuk dicari solusi permasalahan. Semua kegiatan ini dilaksanakan dengan partisipasi masyarakat, mulai dari mengidentifikasi permasalahan sosial dan sumber potensi hingga penentuan prioritas yang dilakukan dengan jumlah suara terbanyak.



Sumber: Dokumentasi Praktikum Tahun 2023

Gambar 4. 6 Teknik MPA

b. Hasil Asesmen Awal

Hasil yang praktikan dapatkan dari tahap asesmen awal yang dilaksanakan melalui asesmen dan rebug warga menggunakan *Methodology Participatory of Assesment* (MPA) adalah teridentifikasinya masalah-masalah sosial. Berdasarkan kegiatan *Methodology Participatory of Assessment* (MPA) yang dilakukan dengan warga Desa Campaka ditemukan beberapa permasalahan yang dimiliki beserta potensi yang ada.

Tabel 4. 1 Permasalahan di Desa Campaka Tahun 2023

No.	Jenis Permasalahan Sosial	Keterangan
1.	Jaminan Sosial	1. Banyaknya keluhan dari Masyarakat yang tidak memiliki kartu fisik bagi peserta PBI BPJS Kesehatan 2. Data BPJS Kesehatan tidak sesuai
2.	Sumber Dana Bantuan sosial	Terdapat keluhan dari KPM bahwa bantuan BPNT dan PKH tidak cair
3.	Kepemudaan (Sumber Daya Manusia)	Pemuda-pemudi di Desa Sirnagalih kurang aktif dalam mengikuti organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna di wilayahnya.

No.	Jenis Permasalahan Sosial	Keterangan
4.	Permasalahan mengenai Pertanian	1. Pemasaran hasil hidropnik hanya sekitaran desa, belum tembus pasar Malabong. 2. Gagal panen Harum madu dikarenakan kekeringan
5.	Kebersihan Lingkungan	Desa Campaka tidak memiliki TPA, masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan dan menumpuk sampah diselokan maupun pinggir jalan, Masih banyak warga yang tidak tahu pengelolaan sampah yang baik.
6.	Air Bersih	Keterbatasan dalam pengadaan air bersih
7.	Rawan Bencana	1. Rawan bencana alam di seluruh Desa Campaka 2. Desa Campaka belum memiliki peta risiko bencana 3. Belum pernah dilakukannya sosialisasi pencengahan bencana alam

Sumber: Hasil MPA di Desa Campaka Tahun 2023

Hasil permasalahan sosial Desa Campaka diatas memiliki prioritas masalah yang diangkat atau yang akan dipecahkan masalahnya dilihat dari hasil luasan permasalahan merupakan permasalahan yang luasan permasalahannya merangkap ke setiap RW yang ada di Desa Campaka. Berdasarkan hasil dari *Community Meeting* yang telah dilaksanakan, paktikan menentukan prioritas masalah yang akan ditangani yaitu mengenai pengelolaan sampah rumah tangga

Hasil asesmen awal yang menggunakan teknik *Methodology Participatory of Assessment* (MPA) yang dilakukan bukan hanya mengidentifikasi permasalahan namun juga mengidentifikasi potensi sosial yang ada di Desa Campaka. Berikut adalah potensi sosial yang dimiliki Desa Campaka hasil Asesmen awal menggunakan teknik *Methodology Participatory of Assessment* (MPA):

Tabel 4. 2 PSKS di Desa Campaka

No	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	Ketersediaan
1.	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Tidak ada
2.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Ada
3.	Karang Taruna	Ada
4.	Pekerja Sosial Profesional	Tidak ada

No	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	Ketersediaan
5.	Penyuluh Sosial	Tidak ada
6.	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	Tidak ada
7.	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	Tidak ada
8.	Taruna Siaga Bencana	Tidak ada
9.	Lembaga Kesejahteraan Sosial	Tidak ada
10.	Keluarga Pioner	Tidak ada
11.	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat	Tidak ada
12.	Dunia Usaha	Tidak ada

Sumber: Hasil MPA di Desa Campaka Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa PSKS di Desa Campaka yang dapat dimanfaatkan guna mempermudah praktikan dalam menangani permasalahan sosial yang diangkat.

4.3.2 Asesmen Lanjutan

Asesmen lanjutan adalah proses penggalian informasi lebih mendalam mengenai permasalahan yang telah diidentifikasi serta sudah diprioritaskan mengenai masalah yang akan ditindak lanjuti untuk dibentuknya sebuah solusi atau program. Praktikan mencari sebab-akibat dari munculnya masalah yang dipilih masyarakat dan menemukan kekuatan dan kelemahan pada sasaran *target group* yaitu warga RW 06 dan *interest group* yaitu tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan lembaga lokal dalam mengatasi isu permasalahan sampah yang di fokuskan pada kampung Salapinang RW 06, Desa Campaka serta menganalisis potensi dan sumber yang memiliki pengaruh dekat untuk digunakan dalam perencanaan intervensi dari masalah sampah tersebut serta mencari data yang relevan mengenai permasalahan sampah dengan meninjau lingkungan sekitar.

Praktikan menganalisis salah satu prioritas permasalahan yaitu pengelolaan sampah rumah tangga yang ada di kampung Salapinang RW 06, dengan menggali informasi mengenai kondisi sampah yang ada di lingkungan kampung Salapinang RW 06, seperti bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan sebelumnya dalam penanganan sampah, dan bagaimana partisipan masyarakat mengikuti upaya-upaya tersebut. Kemudian analisis ini akan menjadi landasan rencana intervensi yang akan di ambil dari isu permasalahan sampah di kampung Salapinang RW 06, Desa Campaka. Teknik yang digunakan dalam

melakukan asesmen lanjutan yaitu dengan wawancara mendalam melalui diskusi informal, observasi dan menggunakan Analisis Pohon Masalah untuk menemukan sebab-akibat dari permasalahan serta studi dokumentasi. dan terakhir membentuk Tim Kerja Masyarakat dengan membuat Janji Hati.

1. Proses Asesmen Lanjutan

Dalam proses asesmen lanjutan dilakukan wawancara mendalam melalui diskusi kepada beberapa pihak seperti, Ketua RW 06, Kepala Dusun 3, dan Kader PKK melakukan penggalian informasi yang mendalam mengenai masalah pengelolaan sampah yang ada di Kampung Salapinang RW 06 ke sumber informasi yang memiliki peran dan tanggung jawab pada masyarakat. Melalui wawancara, praktikan mendapatkan informasi tentang permasalahan tumpukan sampah terutama pada saluran air yang menjadi masalah utama.

Praktikan melakukan observasi permasalahan sampah di Kampung Salapinang dengan turun langsung untuk meninjau kondisi sampah yang ada di Kampung Salapinang dan menyaksikan langsung keadaan sampah dan menyaksikan perilaku Masyarakat membuang sampah sembarangan.

Kemudian praktikan mencari sebab-akibat permasalahan yang telah difokuskan yaitu tumpukan sampah dengan menggunakan teknologi Pohon Masalah, tujuannya adalah mencari lebih lanjut atau pendalaman informasi dengan melibatkan Masyarakat untuk mengetahui sebab dari permasalahan yang timbul dan dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tumpukan sampah.



Gambar 4. 7 Asesmen Lanjutan di RW 06 Kp Salapinang
Sumber: Dokumentasi Praktikum Komunitas 2023

2. Hasil Asesmen Lanjutan

Berdasarkan hasil asesmen lanjutan yang telah dilakukan oleh praktikan dengan teknik wawancara mendalam melalui diskusi informal, dan observasi yang telah ditemukan beberapa isu terkait dengan permasalahan pengelolaan sampah rumah tangga di Kampung Salapinang. Setelah terlaksananya

kegiatan asesmen lanjutan, praktikan menentukan fokus masalah yang menjadi permasalahan utama pengelolaan sampah rumah tangga di Kampung Salapinang yaitu terjadi perilaku masyarakat dalam mengolah dan mengelola sampah.

Permasalahan sampah yang terjadi di Kampung Salapinang RW 06 sangat merugikan Masyarakat dan masih belum dapat tertangani. Hasil observasi melihat langsung bagaimana rumah tangga membuang sampah ditanah depan rumah mereka dan beberapa dari rumah tangga membuang sampah di Sungai. Perilaku masyarakat dengan membuang sampah sembarangan tentunya dikarenakan tidak adanya Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah di Desa Campaka. Masyarakat masih menganggap bahwa sampah merupakan suatu hal yang tidak bernilai sehingga membuang sampah rumah tangga yang telah dihasilkan sembarangan. Banyaknya tumpukan sampah, timbul dampak negative yang terjadi yaitu air yang seharusnya mengalir lancar di saluran air dengan adanya tumpukan sampah maka air tidak dapat mengalir sehingga air dapat meluap. Selain membuang sampah yang dihasilkan secara sembarangan, banyak masyarakat yang lebih memilih alternatif termudah dalam menangani sampah yaitu dengan cara membakar sampah tersebut. Hal tersebut tentunya dapat berakibat buruk karena dapat menyebabkan polusi di udara, mencemari udara, pemanasan global, membahayakan kesehatan dalam jangka panjang dan masih banyak dampak negatif lainnya dari hal tersebut. Sebagai pekerja sosial, selain memperhatikan permasalahan individu atau masyarakat itu sendiri, pekerja sosial juga perlu memperhatikan lingkungan alam agar tidak ada dampak yang dirasakan oleh generasi-generasi selanjutnya. Maka perlu adanya perhatian khusus dalam budaya masyarakat di Kampung Salapinang yang membuang sampah dan membakar sampahnya secara sembarangan.



Gambar 4. 8 Observasi Sungai yang tertumpuk sampah
Sumber: Hasil Observasi Praktikan Tahun 2023

Penjelasan selanjutnya ialah mengenai faktor penyebab permasalahan pengelolaan sampah rumah tangga di Kampung Salapinang yaitu :

1) Tidak adanya Tempat Penampungan Sementara (TPS)

Berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan praktikan terkait sampah, diketahui bahwa Desa Campaka masih belum memiliki TPS di wilayahnya. Hal tersebut menyebabkan banyaknya masyarakat yang memilih untuk membuang sampah sembarangan dan juga membakar sampahnya.

2) Kurangnya kesadaran dalam memilah sampah organik dan non organik

Berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan, Masyarakat telah mengetahui pemilahan sampah, tetapi Masyarakat malas dalam memilah sampah karena menurutnya alternatif dari sampah yang dihasilkan dengan membakar dan membuang sampah pada sungai.

3) Kurangnya pemahaman Masyarakat dalam pengelolaan sampah 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*)

Berdasarkan hasil asesmen, rata-rata Masyarakat belum mengetahui mengenai pengelolaan sampah 3R serta menilai bahwa sampah hanyalah sampah yang tidak bernilai. Banyaknya masyarakat yang belum mengetahui mengenai pengelolaan sampah dengan baik yang semestinya masih bisa diolah kembali menjadi barang bermanfaat yang memiliki nilai guna. Maka dari kurangnya kesadaran masyarakat tersebut, banyaknya masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan cara dibakar dan dibuang sembarangan saja.

4) Membuang sampah sembarangan dan membakar sampah telah menjadi budaya

Berdasarkan hasil asesmen, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dampak dan bahayanya dari sampah tersebut bagi kehidupan sehari-hari bila dibakar dan dibuang sembarangan. Masyarakat menganggap bahwa membakar sampah dan membuang sampah sembarangan merupakan budaya atau tradisi yang ada di Kampung Salapinang. Sehingga ketika seseorang warga membakar atau membuang sampahnya sembarangan menjadi alternatif bagi Masyarakat untuk membuang sampah yang dihasilkan. Meskipun seiring berjalannya waktu, permasalahan sampah ini sudah menjadi perhatian oleh ketua RT 04,

namun Tingkat kepedulian masih sedikit masih banyak hambatan yang terjadi.

Selain itu, adapun dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tumpukan sampah di sungai dan lahan kosong Kampung Salapinang berkaitan dengan lingkungan itu sendiri, sebagai berikut:

1) Pencemaran Lingkungan

Dengan banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan akan membuat sampah terus menumpuk sehingga dapat menyebabkan pencemaran pada lingkungan seperti menimbulkan bau yang tidak sedap, mencemari air, merusak permukaan tanah, dan sebagainya. Sedangkan membakar sampah pun dapat menimbulkan berbagai sampah seperti membuat polusi di udara, mencemari udara, pemanasan global dan masih banyak yang lainnya.

2) Menimbulkan sumber penyakit

Sampah yang terus menumpuk di lingkungan dan sampah yang terus menerus dibakar setiap harinya dapat menimbulkan dampak pula bagi kesehatan. Bagi jangka panjang apabila sampah terus menerus dibiarkan menumpuk dan dibakar dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan karena mudah dihindangi oleh virus dan bakteri. Beberapa penyakit yang ditimbulkan akibat dari hal tersebut ialah seperti diare, kolera, tetanus, gangguan pernapasan, dan lain-lain

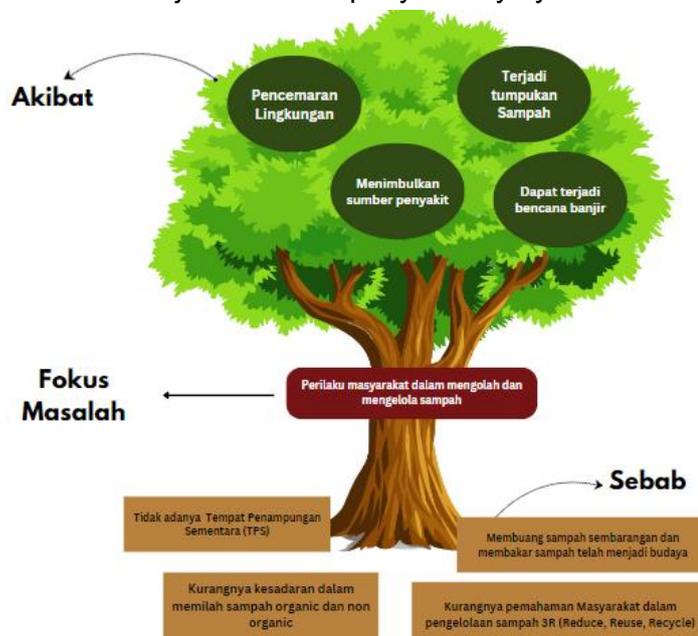
3) Terjadi tumpukan sampah

Dengan perilaku masyarakat yang belum memahami terkait mengolah dan mengelola sampah, menimbulkan perilaku membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan tumpukan sampah di sungai ataupun di lahan kosong karena masyarakat lebih memilih sampahnya untuk dibuang ke tempat yang seharusnya bukan menjadi tempat pembuangan sampah.

4) Dapat terjadi bencana banjir

Dengan menumpuknya sampah di Sungai, ketika cuaca sedang hujan deras maka air tidak akan bisa mengalir dan akan terjadi luapan air ke daratan sehingga dapat menimbulkan banjir. Pada tahun 2022 Kampung Salapinang pernah terjadi bencana banjir karena cuaca hujan ekstrim dan tumpukan sampah yang menutupi aliran air sungai.

Hasil asesmen lanjutan dengan menggunakan Analisis Pohon Masalah untuk mengidentifikasi penyebab serta akibat dari fokus permasalahan yang diambil praktikan menunjukkan bahwa penyebabnya yaitu :



Gambar 4. 9 Analisis Pohon Masalah
Sumber: Hasil Asesmen Lanjutan Tahun 2023

Berdasarkan dari penyebab, dampak dan fokus masalah dari hasil berdiskusi bersama masyarakat maka dapat disimpulkan bahwa kebutuhan yang diperlukan sebagai upaya menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah rumah tangga di Kampung Salapinang, yaitu:

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*).
- 2) Memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat mengenai pengolahan dan pengelolaan sampah.
- 3) Memberikan pengetahuan masyarakat seberapa pentingnya menjaga dan menciptakan lingkungan bebas sampah.
- 4) Memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat mengenai kegiatan pengolahan sampah agar dapat menjadi barang bermanfaat yang memiliki nilai guna.
- 5) Memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat mengenai bank sampah unit.

Adapun sumber dan potensi yang dirumuskan oleh praktikan berkaitan dengan solusi serta alternatif pemecahan masalah pengelolaan sampah rumah tangga di Kampung Salapinang, sebagai berikut:

- 1) PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) pokja 2
- 2) Kepala Dusun 2
- 3) Ketua RW 06
- 4) Ketua RT 04
- 5) Tokoh Pemuda
- 6) Tokoh Agama

4.4 Merumuskan Rencana Intervensi

Rencana intervensi adalah proses berkelanjutan dari hasil tahapan asesmen yang telah dilakukan yang melibatkan masyarakat untuk membuat perencanaan untuk mencapai tujuan dan perubahan yang diinginkan. Dalam pelaksanaan intervensi, praktikan memfokuskan pada RW 06 dikarenakan tingginya tingkat permasalahan mengenai pengelolaan sampah rumah tangga. Selain itu, dikarenakan ketua PKK Pokja 2 yang bertanggung jawab mengenai lingkungan berada di RW 06. Perencanaan dilakukan dengan melibatkan sumber dan potensi yang ada di RW 06 Kampung Salapinang yaitu Tim Kerja Masyarakat (TKM) untuk menentukan langkah-langkah yang dilakukan untuk dapat digunakan dalam memecahkan permasalahan. Perencanaan ini dilakukan menggunakan teknik *Technology of Partisipatory* (ToP) yaitu salah satu perencanaan program dalam penyusunan rencana intervensi makro dalam bekerja dengan masyarakat. Perumusan intervensi adalah sebuah tahapan yang dilaksanakan untuk menyusun program guna mengatasi masalah yang menjadi fokus permasalahan yang praktikan ambil yaitu kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah rumah tangga.

4.4.1 Proses Merumuskan Rencana Intervensi

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahapan pertama yang dilakukan dalam perumusan rencana intervensi. Sebelum melaksanakan perencanaan intervensi, praktikan melakukan persiapan sebagai berikut:

- 1) Melakukan koordinasi dengan kepala dusun, RW 06, PKK Pokja 2, ketua RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, dan tokoh pemuda RW 06 untuk memberitahukan

jadwal pelaksanaan kegiatan *Technology of Partisipation* (ToP) untuk merumuskan perencanaan intervensi.

- 2) Mempersiapkan tempat pelaksanaan perencanaan intervensi dan *tools* yang akan digunakan

b. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan pertemuan untuk melakukan kegiatan *Technology of Partisipation* (ToP) dilaksanakan pada Hari Rabu, 22 November 2023 pukul 13.00 yang bertempat di MI Ma'rif Amin 2 Malangbong. Adapun rangkaian pelaksanaan kegiatan, sebagai berikut:

- 1) Praktikan menyampaikan salam pembuka dan ucapan terimakasih serta sambutan secara singkat.
- 2) Praktikan menyampaikan tujuan dari pertemuan yaitu menyusun rencana mengatasi permasalahan kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah. Praktikan menjelaskan beberapa hal yang perlu disepakati seperti nama program, tujuan program, bentuk kegiatan, sasaran, waktu, output, kebutuhan, sumber dan membentuk tim kerja serta komitmen.
- 3) Menyepakati waktu atau durasi pelaksanaan yaitu satu sampai dua jam.
- 4) Menyampaikan tentang topik masalah yaitu tentang kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Praktikan bersama dengan partisipan mengulas kembali hasil asesmen yang telah dilakukan sebelumnya.
- 5) Praktikan bersama dengan partisipan menentukan nama program yang tepat yang akan dilaksanakan sebagai bentuk intervensi dalam menjawab permasalahan.
- 6) Praktikan berdiskusi bersama dengan partisipan dan menanyakan kepada masing-masing untuk menentukan tujuan yang akan dicapai dari program kegiatan yang akan dilakukan.
- 7) Praktikan berdiskusi bersama dengan partisipan mengenai bentuk kegiatan apa yang akan dilakukan sesuai dengan persetujuan bersama yang mana untuk menghindari adanya hambatan yang tidak diharapkan.
- 8) Praktikan berdiskusi bersama dengan partisipan dalam penentuan sasaran kegiatan yang merupakan salah satu hal yang harus ditentukan sejak awal agar kegiatan yang nantinya dilaksanakan dapat tepat sasaran dan bermanfaat.

- 9) Praktikan bersama dengan partisipan menentukan waktu pelaksanaan. Jadwal untuk kegiatan disusun menyesuaikan dengan suara terbanyak dari hadirin yang datang. Hal ini ditujukan untuk menghindari adanya alasan penolakan untuk datang pada saat pelaksanaan acara.
- 10) Praktikan bersama dengan partisipan menentukan output yang diharapkan dari program yang akan dilaksanakan dan akan menjadi indikator keberhasilan dari kegiatan yang dilakukan.
- 11) Praktikan bersama dengan partisipan menentukan kebutuhan dari kegiatan yang akan dilaksanakan.
- 12) Praktikan bersama dengan partisipan menentukan sumber yang dapat mendukung dalam keberhasilan program.
- 13) Pembentukan Tim Kerja Masyarakat atau TKM guna melaksanakan program bersama-sama dengan praktikan. Selain itu, dilakukan penentuan untuk penanggung jawab pelaksana kegiatan yaitu Bapak Nanan Suherman.
- 14) Praktikan memandu partisipan untuk menandatangani lembar janji hati dengan tanda tangan sebagai bentuk adanya komitmen secara bersama-sama untuk mensukseskan pelaksanaan program.
- 15) Praktikan mengucapkan terimakasih dan apresiasi serta mengajak partisipan untuk bersama-sama mensukseskan program yang akan dilaksanakan dan menutup kegiatan penyusunan rencana intervensi.
- 16) Praktikan bersama dengan partisipan mengambil foto untuk dokumentasi.



Gambar 4. 10 Proses Penyusunan Rencana Intervensi
Sumber: Dokumentasi Praktikum Tahun 2023

4.4.2 Hasil Merumuskan Rencana Intervensi

Adapun hasil dari rencana intervensi yang telah disusun oleh praktikan bersama dengan Tokoh masyarakat dideskripsikan sebagai berikut ini:

a. Terbentuknya Tim Kerja Masyarakat (TKM)

TKM yang dibentuk untuk program penataan lingkungan masyarakat di Kampung Salapinang dengan struktur sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Struktur TKM Kampung Salapinang Desa Campaka

No	Nama	Jabatan
1.	Nanan Suherman	Ketua
2.	Entin Sumarni	Sekretaris
3.	Cucu Hasanah	Bendahara
4.	Undang	Sie Penghijauan
5.	Ronal	Sie Pengelolaan sampah
6.	H. Otong	Sie Humas

Sumber; Hasil Rencana Intervensi Praktikum Komunitas 2023

b. Nama Program

Program yang akan dilaksanakan di Kampung Salapinang RW 06 berdasarkan kesepakatan bersama yaitu “Cerdas memilah sampah menciptakan Lingkungan Peduli Sampah, Bersih, dan Sehat”.

c. Tujuan Program

Tujuan yang ingin dicapai dari program “Cerdas memilah sampah menciptakan Lingkungan Peduli Sampah, Bersih, dan Sehat” di Kampung Salapinang RW 06 dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus

1) Tujuan Umum

Program dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat Desa Campaka khususnya RW 06 agar dapat memahami bentuk pengelolaan sampah yang memiliki nilai jual ekonomi dan dimanfaatkan untuk masyarakat itu sendiri, sehingga tidak ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan maupun membakar sampahnya.

2) Tujuan Khusus

- a) Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pemilahan dan pemanfaatan sampah sebagai upaya pentingnya menjaga lingkungan.
- b) Memberikan wawasan baru terkait pengelolaan sampah yang dapat menjadi nilai ekonomi masyarakat.

- c) Menciptakan efek positif berkelanjutan dalam mencapai lingkungan yang peduli sampah, bersih dan sehat.
- d) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perilaku membuang sampah sembarangan.

d. Bentuk Kegiatan

1. Penyuluhan optimalisasi peran Masyarakat dalam pengelolaan sampah

Pada kegiatan penyuluhan merupakan sebagai salah satu bentuk penyadaran kepada Masyarakat akan pentingnya menjaga dan peduli lingkungan terutama pada permasalahan sampah dengan tidak membuang sampah ke Sungai dan tidak membakar sampah. Dalam penyuluhan akan dijelaskan mengenai Komposisi Sampah; Dampak Sampah pada Kesehatan; Dampak Sampah pada Lingkungan; Dampak Sampah pada Ekosistem Laut; Solusi yang dapat dilakukan (Sinergi dan Perubahan, Perubahan Paradigma: Pengolahan jadi Pencegahan; Perubahan Kebiasaan: Dicampur jadi DIPILAH); Regulasi Hukum Sampah.

2. *Workshop* pengelolaan sampah sebagai nilai guna ekonomi untuk Masyarakat

Dalam kegiatan *workshop* menjelaskan terkait pengelolaan dan pengolahan sampah secara mandiri dan terpadu yang nantinya dapat dilakukan oleh Masyarakat. Kegiatan *workshop* dilakukan oleh masyarakat bersama narasumber melakukan penerapan pemanfaatan sampah organik dan non organik, bagaimana masyarakat bisa langsung melihat bagaimana cara sampah dikelola sehingga dapat menjadi nilai guna dan manfaat yang dapat dimiliki ataupun menambah ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan sampah yang dapat di daur ulang. Pada *workshop* juga dijelaskan terkait bagaimana pemisahan sampah sehingga nantinya dapat mempermudah dalam pengelolaannya menjadi memiliki nilai guna dan mampu memilah dan mengelola sampah secara mandiri . Pada salah kegiatan *workshop* menunjukkan langsung proses pembuatan pupuk kompos dan *ecoenzym* serta mengelola sampah plastik dengan menjadikan bentuk *ecobrik* dengan memasukan potongan sampah plastik kedalam botol dan nantinya apabila jumlah *ecobrik* sudah banyak dapat dijadikan tempat duduk, meja, hiasan tanaman, dan lain-lain.

e. Sistem Partisipan

Sistem partisipasi dibutuhkan untuk menentukan pihak-pihak mana saja yang akan dilibatkan dalam upaya mencapai perubahan yang diinginkan. Sistem ini terdiri dari *interest group* dan *target group*, serta sumber lainnya. Sistem partisipan dalam upaya pengembangan masyarakat melalui Program “Cerdas memilah sampah menciptakan Lingkungan Peduli Sampah, Bersih, dan Sehat”, adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Sistem Partisipan Program Intervensi

No	Jenis Sistem	Representatif
1.	<i>Initiator System</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Praktikan • Ketua RT 04/06
2.	<i>Change Agent System</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Praktikan • Tim Kerja Masyarakat
3.	<i>Client System</i>	Masyarakat Kampung Salapinang
4.	<i>Support System</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Desa • Ketua RW • Ketua RT • PKK Pokja 2
5.	<i>Controlling System</i>	Tim Kerja Masyarakat
6.	<i>Implementing System</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat Kampung Salapinang • Tim Kerja Masyarakat • Ketua RT dan Ketua RW
7.	<i>Target System</i>	Masyarakat Kampung Salapinang
8.	<i>Action System</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Kerja Masyarakat • Komunitas Garut Zero West

Sumber: Hasil Praktikum Komunitas Desa Campaka Tahun 2023

f. Strategi dan Teknik

Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan program “Cerdas memilah sampah menciptakan Lingkungan Peduli Sampah, Bersih, dan Sehat”, yaitu kolaborasi (*collaboration*) dengan taktik implementasi. Strategi kolaborasi dipilih karena sudah ada komitmen dan kesepakatan antar anggota tim kerja masyarakat untuk melaksanakan terkait peningkatan kesadaran warga dalam pengelolaan sampah. Tim kerja masyarakat juga sudah membagi tugas dalam pelaksanaan program, kemudian merencanakan program secara bersama-sama. Dalam strategi kolaborasi menegaskan adanya kerjasama antar sistem aksi.

Dalam strategi kolaborasi terdapat taktik implementasi dan peningkatan kapasitas. Implementasi dikarenakan antara sistem aksi dan target terdapat keterbukaan dan motivasi bersama dalam melaksanakan program “Cerdas memilah sampah menciptakan Lingkungan Peduli Sampah, Bersih, dan Sehat”.

Strategi dan teknik kedua yaitu kampanye sosial (*social campaign*), menggunakan taktik Pendidikan yang berupa penyuluhan optimalisasi peran Masyarakat dalam pengelolaan sampah dan *workshop* pengelolaan dan pengolahan sampah secara mandiri dan terpadu.

g. Langkah-langkah dan Jadwal Kegiatan

Proses agenda kegiatan program “Cerdas memilah sampah menciptakan Lingkungan Peduli Sampah, Bersih, dan Sehat” di RW 06 Kampung Salapinang, sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Jadwal Program Kegiatan Intervensi

No.	Bentuk Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Waktu	Tempat	Sumber Dana
1.	Penyuluhan optimalisasi peran Masyarakat dalam pengelolaan sampah	Memberikan pemahaman Masyarakat terkait pentingnya peran Masyarakat terhadap lingkungan terutama pada permasalahan sampah	Masyarakat RW 06 Kp. Salapinang	Jum'at, 24 November 2023	MI Ma'rif Amin 2 Malangbong.	Prodi Lindayasos & Swadaya masyarakat
2.	<i>Workshop</i> pengelolaan dan pengolahan sampah secara mandiri dan terpadu	Memberikan pengetahuan Masyarakat terkait pemanfaatan sampah menjadi nilai guna ekonomi	Masyarakat RW 06 Kp. Salapinang	Jum'at, 24 November 2023	MI Ma'rif Amin 2 Malangbong.	Prodi Lindayasos & Swadaya masyarakat

Sumber: Hasil Praktikum Komunitas Desa Campaka Tahun 2023

Berikut Langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan intervensi program “Cerdas memilah sampah menciptakan Lingkungan Peduli Sampah, Bersih, dan Sehat” di RW 06 Kampung Salapinang, sebagai berikut:

- 1) Tahap Persiapan
 - a) Melakukan koordinasi awal dengan Perangkat Desa, Tim Kerja Masyarakat (TKM), narasumber serta Stakeholder-stakeholder terkait.
 - b) Mengajukan perizinan dan mengurus surat undangan bagi masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat RW 06.
 - c) Mempersiapkan kebutuhan logistik dilakukan dengan cara membuat daftar bahan atau alat yang dibutuhkan pada saat kegiatan berlangsung.
 - d) Menyiapkan materi yang akan di paparkan saat sosialisasi dilakukan.

2) Tahap Pelaksanaan

Penyuluhan sosial dan *workshop* dilakukan dalam satu hari dengan dua sesi yaitu pada hari Jum'at, 24 November 2023 bertempat di MI Ma'rif Amin 2 Malangbong. Kegiatan pertama dilakukan Penyuluhan optimalisasi peran Masyarakat dalam pengelolaan sampah yang disampaikan oleh bapak Ridhwan Fauzi Syarif, S.S (CEO Garut Zero West), dilanjutkan sesi 2 yaitu *workshop* pengelolaan dan pengolahan sampah secara mandiri dan terpadu oleh apt. Krismiyati, S.Si (Direktur Bank Sampah Induk Malangbong Bersemi).

Tabel 4. 6 Rundown Kegiatan Penyuluhan dan Workshop

No	Kegiatan	Waktu	Durasi	PIC
1.	Persiapan	13.00-13.30	30'	Praktikan
2.	Pembukaan	13.30-13.35	5'	MC
3.	Sambutan Desa	13.35-13.40	5'	Kasi Kesra Desa Campaka
4.	Pemaparan penyuluhan optimalisasi peran Masyarakat dalam pengelolaan sampah	13.40-14.25	45'	Ridhwan Fauzi Syarif, S.S (CEO Garut Zero West)
5.	Sesi tanya jawab	14.25-14.55	30'	Partisipan
6.	<i>workshop</i> pengelolaan dan	14.55-15.55	60'	apt. Krismiyati, S.Si (Direktur Bank

No	Kegiatan	Waktu	Durasi	PIC
	pengolahan sampah secara mandiri dan terpadu			SampahInduk Malangbong Bersemi)
7.	Sesi Tanya Jawab	15.55-16.10	15'	Partisipan
8.	Penutupan	16.10-16.15	5'	MC
9.	Foto Bersama	16.15-16.20	5'	Seluruh Partisipan

Sumber: Hasil Praktikum Komunitas Desa Campaka Tahun 2023

3) Tahap Tindak Lanjut

Pada tahap pasca pelaksanaan dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang telah dilaksanakan, untuk menilai dan menentukan tingkat keberhasilan dari program “Cerdas memilah sampah menciptakan Lingkungan Peduli Sampah, Bersih, dan Sehat” yang dilakukan praktikan bersama dengan TKM.

h. Rancangan Anggaran dan Peralatan yang Dibutuhkan

1) Rancangan Anggaran Program

Setiap bentuk kegiatan intervensi yang dilakukan pastinya memerlukan anggaran biaya untuk menunjang keberlangsungan pelaksanaan intervensi. Rancangan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Rancangan Anggaran Biaya Program Intervensi

No.	Jenis Pengeluaran	Harga Satuan	Volume	Jumlah
Administrasi				
1.	Print Surat Undangan	Rp 2.000	10 lembar	Rp 20.000
2.	Map	Rp 2.000	10 pcs	Rp 20.000
Sub Total				Rp 40.000
Konsumsi				
3.	Masyarakat	Rp 10.000	30 Porsi	Rp 300.000
4.	Narasumber	RP 10.000	2 Porsi	Rp 20.000
Sub Total				Rp 320.000
<i>Fee</i>				
5.	Narasumber	Rp 500.000	2 orang	Rp 1.000.000
Sub Total				Rp 1.000.000
TOTAL				Rp 1.360.000

Sumber: Hasil Praktikum Komunitas Desa Campaka Tahun 2023

2) Kebutuhan Perlengkapan

Kebutuhan perlengkapan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program “Cerdas memilah sampah menciptakan Lingkungan Peduli Sampah, Bersih, dan Sehat”, antara lain:

Tabel 4. 8 Kebutuhan Perlengkapan Kegiatan

No.	Kebutuhan Perlengkapan
1.	Laptop
2.	Proyektor
3.	LCD
4.	Banner
5.	Meja
6.	Kursi
7.	<i>Microphone</i>
8.	Ruang Pertemuan
9.	Ember bekas 5-8L
10.	Ember bekas 25L 2buah
11.	Kulit buah-buahan 300gr
12.	Gula Pasir 100gr
13.	Air Matang 1L
14.	Botol Plastik 1.5L
15.	Sampah Non Organik
16.	<i>Soundsystem</i>

Sumber: Hasil Praktikum Komunitas Desa Campaka Tahun 2023

i. Analisis SWOT

Analisis dilakukan dengan maksud untuk melihat potensi pelaksanaan intervensi dan mengantisipasi risiko-risiko yang akan dihadapi. Pemahaman strategi atau langkah yang harus diambil saat intervensi. Praktikan menyusun analisis yang akan dijadikan dasar strategi intervensi, analisis yang dibentuk meliputi analisis kekuatan, analisis kelemahan, analisis peluang dan analisis ancaman yang disandingkan satu sama lain. Analisis yang digunakan adalah analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, and Threats*) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. 9 Analisis SWOT

<p style="text-align: center;">Faktor Internal</p> <p style="text-align: center;">Faktor Eksternal</p>	<p>Strenght</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program dapat memberikan pengaruh positif untuk masyarakat dalam mengatasi permasalahan sampah 2. Nilai gotong royong yang erat ada dimasyarakat 3. Memiliki potensi trasformasi positif untuk menjadi model lingkungan yang bersih, sehat, dan peduli sampah 	<p>Weakness</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya TPS di Desa Campaka 2. Infrastruktur tertentu yang kurang memadai
<p>Opportunity</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan dari Aparat Desa Campaka 2. Narasumber yang mudah untuk diakses 3. Saranan dan prasarana pelaksanaan program terfasilitasi dengan baik 	<p>Strategi SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemauan masyarakat dan didorong oleh dukungan dari pemerintahan desa untuk mensukseskan program kegiatan 2. Memaksimalkan kegiatan agar dapat bermanfaat bagi masyarakat dan juga Desa Campaka agar kegiatan dapat dilakukan kembali di RW lainnya. 	<p>Strategi WO</p> <p>Bekerjasama dengan pemerintahan desa melakukan pembuatan TPS 3R maupun Bank Sampah Unit dalam membantu menimalisir sampah</p>
<p>Threats</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan kebiasaan perilaku Masyarakat terkait pengelolaan sampah 2. Ketidakpastian regulasi terkait pengelolaan sampah dapat menjadi hambatan 	<p>Strategi ST</p> <p>Memanfaatkan potensi TKM, PKK Pokja 2 dan dukungan lainnya untuk membuat kegiatan yang dapat menyelesaikan permasalahan sampah di Kampung Salapinang sehingga menciptakan lingkungan yang peduli sampah dan bersih.</p>	<p>Strategi WT</p> <p>Diperlukan upaya kesadaran masyarakat tentang dampak dari perilaku membuang sampah sembarangan yang dilakukan dan dampak dari membakar dan membuang sampah sembarangan</p>

Sumber: Hasil Praktikum Komunitas Desa Campaka Tahun 2023

Berdasarkan analisis SWOT tersebut, kelemahan dan ancaman yang dihadapi dapat diselesaikan dengan berbagai strategi. Maka, rencana intervensi berupa “Cerdas memilah sampah menciptakan Lingkungan Peduli Sampah, Bersih, dan Sehat” dapat dikatakan layak untuk dijalankan.

j. Indikator Keberhasilan

Selain itu adapun rancangan evaluasi yang telah dirancang oleh praktikan bersama Tenaga Kerja Masyarakat (TKM) dengan menentukan beberapa indikator keberhasilan. Adapun indikator keberhasilan dari program “Cerdas memilah sampah menciptakan Lingkungan Peduli Sampah, Bersih, dan Sehat”

- 1) Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pemilahan dan pemanfaatan sampah sebagai upaya pentingnya menjaga lingkungan.
- 2) Diperolehnya wawasan baru dalam pengelolaan sampah yang dapat menjadi nilai ekonomi masyarakat
- 3) Peningkatan kerjasama antar masyarakat, pemerintahan setempat, dan organisasi non-pemerintahan dalam mendukung program pengelolaan sampah.
- 4) Perubahan perilaku Masyarakat terkait pengelolaan sampah, seperti penggunaan kantong belanja *reusable*, pengurangan penggunaan plastic sekali pakai.

4.5 Pelaksanaan Intervensi

Pelaksanaan intervensi merupakan kegiatan Dimana praktikan melaksanakan semua rencana kegiatan atau rencana intervensi yang telah disusun dan direncanakan sebelumnya bersama Tim Kerja Masyarakat (TKM). Berikut ini rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam program-program “Cerdas memilah sampah menciptakan Lingkungan Peduli Sampah, Bersih, dan Sehat:

4.5.1 Pelaksanaan Intervensi Program Penyuluhan optimalisasi peran masyarakat dalam pengelolaan sampah

Pelaksanaan intervensi program “Penyuluhan optimalisasi peran Masyarakat dalam pengelolaan sampah” dilakukan pada hari Jum’at, 24 November 2023 pukul 13.30-16.20 WIB di MI Ma’rif Amin 2 Malangbong. Kegiatan intervensi dihadiri oleh 26 Partisipan yang didalamnya termasuk TKM dan Masyarakat RW 06 Kampung Salapinang. Kegiatan penyuluhan dinarasumberi oleh bapak

Ridhwan Fauzi Syarif, S.S selaku CEO Garut Zero West, dan praktikan sebagai pembawa acara serta ketua pelaksana program.

Adapun materi yang disampaikan berupa fakta perilaku Masyarakat yang masih banyak melakukan buang sampah sembarangan; GARUT 2019 Darurat Sampah; Jumlah Sampah (Data KLHK pada tahun 2019); Komposisi Sampah; Dampak Sampah pada Kesehatan; Dampak Sampah pada Lingkungan; Dampak Sampah pada Ekosistem Laut; Solusi yang dapat dilakukan (Sinergi dan Perubahan, Perubahan Paradigma : Pengolahan jadi Pencegahan; Perubahan Kebiasaan : Dicampur jadi DIPILAH); Regulasi Hukum Sampah.



Gambar 4. 11 Kegiatan Penyuluhan

Sumber: Hasil Praktikum Komunitas Desa Campaka Tahun 2023

Hasil dari penyuluhan dapat dilihat secara langsung pada kegiatan yang telah dilaksanakan bahwa Masyarakat cukup aktif dan partisipatif. Dari penyuluhan tersebut pengetahuan Masyarakat menjadi bertambah terkait dengan komposisi sampah, dampak sampah yang ditimbulkan, Solusi alternatif yang dapat dilakukan oleh Masyarakat dengan cara sederhana yang dapat diterapkan langsung oleh setiap rumah tangga dalam mengatasi sampah. Serta Masyarakat telah merencanakan dalam pembuatan bank sampah unit yang nantinya akan dikelola oleh TKM.

4.5.2 Pelaksanaan Intervensi Program *Workshop* pengelolaan dan pengolahan sampah secara mandiri

Pelaksanaan *workshop* pengelolaan dan pengolahan sampah dilakukan pada hari Jum'at, 24 November 2023 pukul 13.30-16.20 WIB di MI Ma'rif Amin 2 Malangbong. Kegiatan intervensi dihadiri oleh 26 Partisipan yang didalamnya termasuk TKM dan Masyarakat RW 06 Kampung Salapinang. Kegiatan

penyuluhan dinarasumberi oleh ibu apt. Krismiyati, S.Si selaku Direktur Bank Sampah Induk Malangbong Bersemi)., dan praktikan sebagai pembawa acara serta ketua pelaksana program.

Interaksi dengan narasumber dan partisipan sangat aktif, melihat langsung bagaimana Masyarakat menyimak secara sesakma dalam pengelolaan sampah organik yaitu pembuatan pupuk kompos dan *ecoenzym* dan pengelolaan sampah non organik dapat dimanfaatkan sebagai *ecobrik* dan menjadi rompi atau topi yang memiliki nilai jual ekonomi apabila Masyarakat dapat memanfaatkan dan melihat peluang. Ketika *workshop* berlangsung partisipan menjadi menambah wawasan bahwa sampah yang dihasilkan memiliki nilai guna dan nilai ekonomi yang dapat membantu perekonomian Masyarakat. Pada sesi akhir Masyarakat sangat tertarik dalam pengolahan dan pengelolaan sampah yang dapat dilakukan di rumah dengan cara yang sederhana.



Gambar 4. 12 Kegiatan *Workshop*

Sumber: Hasil Praktikum Komunitas Desa Campaka Tahun 2023

4.6 Evaluasi

Tahap evaluasi merupakan kegiatan penilaian terhadap pelaksanaan intervensi atau program yang telah dilaksanakan. Penilaian dilihat dari proses yang dilaksanakan serta hasil dari program yang telah dilaksanakan. Evaluasi juga dilakukan untuk melihat perkembangan dan perubahan, serta tercapainya tujuan intervensi yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai masukan guna penyempurnaan program untuk ke depannya. Tahapan evaluasi praktikan bagi menjadi dua yaitu tahap evaluasi proses dan evaluasi hasil. Adapun tahapan evaluasi proses praktikan laksanakan bersama dengan TKM

selama tahap perencanaan program. Sedangkan tahap evaluasi hasil praktikan dilaksanakan setelah program terlaksana. Adapun hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

4.6.1 Evaluasi Proses

Dalam pelaksanaan program intervensi pastinya ditunjang oleh faktor pendukung dan faktor penghambat program yang telah diidentifikasi oleh TKM (Tim Kerja Masyarakat), faktor-faktor tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

Faktor yang mendukung keberhasilan program dalam pelaksanaannya, sebagai berikut:

- 1) Dukungan dan komitmen pemerintah lokal dalam memberikan sumber daya, regulasi yang mendukung, dan fasilitas yang memadai untuk pengelolaan sampah.
- 2) Tingginya partisipasi masyarakat dalam program, antusiasme, dan keinginan untuk berubah.
- 3) Program penyuluhan yang efektif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah.
- 4) Kemitraan dengan perusahaan atau usaha swasta untuk mendukung program, baik dalam bentuk dukungan finansial maupun kerjasama dalam pengelolaan sampah.
- 5) Peningkatan kesadaran konsumen terhadap produk ramah lingkungan, memudahkan implementasi perubahan perilaku.

b. Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung dalam pelaksanaan program pastinya juga terdapat faktor penghambat, sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan anggaran dan sumber daya dapat menghambat implementasi program, termasuk dalam penyuluhan, pengelolaan infrastruktur, dan pembiayaan kegiatan lainnya.
- 2) Resistensi atau ketidakpatuhan masyarakat dalam mengadopsi perubahan perilaku terkait pengelolaan sampah.
- 3) Keterbatasan atau ketidaktersediaan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai dapat menyulitkan pelaksanaan program.
- 4) Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dapat menghambat pemahaman dan partisipasi dalam program.

4.6.2 Evaluasi Hasil

Evaluasi hasil adalah kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai target yang telah dilaksanakan. Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan oleh praktikan, didapat evaluasi berupa:

- 1) Masyarakat sebagai peserta penyuluhan dan *workshop* berpartisipasi dan terlibat secara aktif dalam kegiatan yang dilakukan
- 2) Meningkatnya peran aktif dan kesadaran dari masyarakat RW 06 terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan pemilahan sampah.
- 3) Adanya respon positif dari ketua RW 06, para ketua RT, dan beberapa masyarakat mengenai pendirian Bank Sampah Unit.
- 4) Seluruh tahapan praktikum komunitas sudah dilaksanakan dan dapat berjalan dengan baik dan diketahui oleh berbagai pihak terkait seperti perangkat desa.
- 5) Kepala desa sangat merespon baik terkait dengan kegiatan program yang dilaksanakan. Kepala desa langsung mengajukan bantuan TPS 3R kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut untuk Desa Campaka sebagai salah satu bentuk dalam menyelesaikan permasalahan sampah.

4.7 Terminasi dan Rujukan

4.7.1 Terminasi

Tahap akhir dalam praktik pekerjaan sosial ini berupa terminasi. Terminasi merupakan tahap penyelesaian hubungan kerja secara formal antara praktikan dengan Tim Kerja MasyarakatTKM dan aparat pemerintah desa. Terminasi perlu dilakukan karena kegiatan sudah harus berhenti sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam matrik rencana kerja sebelumnya. Terminasi merupakan hal penting agar Tim Kerja Masyarakat (TKM) yang telah dibuat dapat melanjutkan kegiatan secara rutin dan tidak bergantung pada praktikan sebagai pendamping sosial. Kegiatan terminasi dilaksanakan oleh praktikan di Aula Kantor Desa Campaka pada Hari Jum'at, Tanggal 08 Desember 2023. Dalam kegiatan terminasi dilakukan pemaparan laporan hasil kegiatan praktikum selama di Desa Campaka. Selain itu momentum ini juga dimanfaatkan oleh praktikan untuk menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang tinggi atas dukungan dan partisipasi TKM, pemerintah Desa Campaka, Ketua RW dan RT serta seluruh masyarakat Desa Campaka selama kegiatan praktikum berlangsung serta permohonan maaf apabila ada kesalahan-kesalahan yang

telah dilakukan praktikan selama melakukan praktikum komunitas di Desa Campaka. Kegiatan terminasi diakhiri dengan pemberian kenang-kenangan berupa plakat yang diberikan kepada Kepala Desa Campaka dan juga sesi foto bersama untuk dokumentasi.

4.7.2 Rujukan

a. Bagi Pemerintah Desa Campaka

Praktikan memberikan rujukan dan menghimbau kepada aparat Desa Campaka agar dapat lebih memperhatikan masalah lingkungan dalam hal ini sampah serta pengelolaannya. Tujuannya agar Sampah tidak lagi menjadi masalah serius bagi lingkungan. Melalui pemerintah Desa Campaka nantinya dapat menganggarkan guna mengembangkan sarana dan prasana serta fasilitas seperti TPS 3R dan Bank Sampah untuk mendukung dan meminimalisir permasalahan sampah di Desa Campaka.

b. Bagi Tim Kerja Masyarakat (TKM)

Praktikan memberikan rujukan kepada TKM agar dapat meneruskan kegiatan atau program yang sudah berjalan dan dapat dilanjutkan ke RW lainnya, sehingga permasalahan Sampah berkurang, masyarakat dapat selalu sadar akan bahayanya sampah bagi kesehatan dan bagi lingkungan, mencegah dampak dari membuang sampah sembarangan sebagai keberlanjutan dari program intervensi yang telah dijalankan oleh praktikan bersama TKM.

BAB V

REFLEKSI PELAKSANAAN PRAKTIKUM

5.1 Pencapaian Tujuan dan Manfaat Praktikum

Kegiatan Praktikum Komunitas yang dijalankan oleh mahasiswa Poltekesos Bandung Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial merupakan kegiatan praktik pekerjaan sosial makro aras komunitas. Selama 42 hari praktikan melakukan proses praktikum praktik pekerjaan sosial makro aras komunitas dan kebijakan di Desa Campaka, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut. Selama kegiatan ini, praktikan merasakan tujuan dan manfaat praktikum secara langsung yang diuraikan sebagai berikut:

1. Selama praktikum ini, saya menjadi lebih sadar akan kompleksitas dan tantangan yang terlibat dalam pelaksanaan tugas tertentu. Saya memahami betapa pentingnya memahami instruksi dengan baik sebelum memulai pekerjaan dan berkomunikasi secara efektif dengan rekan tim.
2. Praktikum ini memberi saya kesempatan untuk mengasah keterampilan praktis dalam konteks nyata. Saya belajar bagaimana menerapkan pengetahuan teoritis dalam situasi praktis, dan hal ini memberi nilai tambah signifikan pada pemahaman saya.
3. Kerjasama tim sangat krusial dalam praktikum ini. Saya menyadari bahwa kesuksesan pekerjaan tidak hanya tergantung pada kemampuan individu tetapi juga pada kemampuan tim untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan memecahkan masalah bersama-sama.
4. Praktikum juga membuka mata saya terhadap berbagai kendala dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan tugas. Saya belajar menghadapi ketidakpastian, menangani tekanan waktu, dan mencari solusi kreatif ketika menghadapi hambatan.
5. Pada awalnya, saya merasa tidak yakin dalam beberapa aspek pekerjaan, tetapi seiring berjalannya waktu, saya melihat peningkatan signifikan dalam keterampilan dan kepercayaan diri saya. Ini memberi saya motivasi untuk terus belajar dan berkembang.

Dengan merenung melalui refleksi ini, saya mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perkembangan pribadi saya, kekuatan, dan area yang perlu ditingkatkan. Refleksi semacam ini membantu dalam pengembangan pribadi

dan profesional serta memastikan bahwa pengalaman praktikum memberikan dampak positif dalam perjalanan pembelajaran saya.

5.2 Faktor pendukung dan Faktor Penghambat

5.2.1 Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung yang dialami selama pelaksanaan Praktikum Komunitas di Desa Campaka antara lain:

1. Dosen pembimbing yang memberikan masukan di setiap rangkaian tahapan praktikum dan arahan untuk menindaklanjuti proses selanjutnya. Hal itu sangat membantu agar praktikan dapat melaksanakan program kegiatan yang selaras dan sesuai dengan kebutuhan di masyarakat.
2. Pembimbing Lapangan yang selalu siap untuk membantu praktikan apabila memiliki kebutuhan dalam proses praktikum. Praktikan juga merasa nyaman dan mudah melakukan pendekatan dengan pembimbing lapangan sehingga ketika membutuhkan bantuan maka selalu dibimbing dan dibantu.
3. Penerimaan masyarakat Desa Campaka yang baik terhadap praktikan sehingga praktikan merasa terbantu dalam pelaksanaan praktikum. Penerimaan masyarakat yang begitu hangat merupakan suatu bentuk dukungan yang luar biasa bagi praktikan.
4. Adanya dukungan dari aparat Desa Campaka berupa bantuan dalam memberikan informasi tentang data-data yang praktikan butuhkan, penyediaan fasilitas serta pelayanan yang bisa diakses dari aparat desa dan dapat digunakan oleh praktikan dalam mengakses kembali para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada di wilayah Desa Campaka.
5. Kerjasama antar anggota kelompok praktikan yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan Praktikum Komunitas di Desa Campaka.

5.2.2 Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat yang dirasakan selama pelaksanaan praktikum komunitas di Desa Campaka antara lain sebagai berikut:

1. Praktikum Komunitas dilaksanakan selama 42 hari, dimana menurut praktikan waktu tersebut sangat singkat untuk melakukan pendekatan, penerimaan dan pelaksanaan program di masyarakat desa. Alokasi waktu dalam buku

pedoman tidak selalu sesuai dengan keadaan lapangan dengan alasan satu dan lain hal di masyarakat.

2. Waktu kerja yang berbeda antara masyarakat dengan praktikan, karena pada umumnya masyarakat bekerja sebagai petani, serabutan atau pedagang yang bekerja dari pagi hingga sore sehingga sulit mencocokkan waktu pertemuan antara praktikan dengan masyarakat.
3. Salah satu faktor penghambat praktikan dalam melakukan praktikum komunitas di Desa Semare ini karena data-data di desa yang kurang lengkap, segala informasi yang mereka bagikan kepada praktikan mayoritas tidak menggunakan data yang konkrit atau hanya informasi secara lisan.

5.3 Usulan dan Masukan untuk Praktik Pekerjaan Sosial Makro

Praktikum III Praktik Pekerjaan Sosial Makro merupakan sebuah rangkaian kegiatan pendidikan yang harus dilalui dalam jenjang Pendidikan Sarjan Terapan Pekerjaan Sosial Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung oleh setiap mahasiswa. Berdasarkan pengalaman praktikan selama dilapangan, usulan untuk praktik peksos makro Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung yang mungkin dapat dijadikan saran untuk penyempurnaan kegiatan praktikum selanjutnya, yakni sebagai berikut:

- a. Alokasi waktu yang diberikan kepada praktikan hanya sebentar dan sangat singkat, hal ini menyebabkan kebingungan terhadap praktikan untuk mengatur waktu dalam setiap tahapan pelaksanaan praktikum. Waktu yang sangat mepet ini berpengaruh kepada setiap pelaksanaan praktikan selain itu program yang dibentuk oleh mahasiswa pun dilakukan secara individu, sehingga pelaksanaan praktikan tidak maksimal.
- b. Memperbanyak dan diberikan kepada mahasiswa mengenai kajian berdasarkan profil lulusan Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial. Hal ini sangat penting, dikarenakan mahasiswa-mahasiswi Prodi Lindayasos perlu mempelajari lebih dalam dan informasi yang bersumber dari buku, jurnal, kajian literatur sehingga dapat menambah wawasan ilmu psengetahuan bagi mahasiswa.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Pada pelaksanaan Praktikum Komunitas ini berisi tentang Praktik Pekerjaan Sosial makro, yaitu dari segi pengembangan komunitas/masyarakat lokal. Kegiatan Praktikum Komunitas ini juga akan mengasah baik ilmu pengetahuan, keterampilan, serta nilai praktikan untuk dapat diterapkan langsung di lapangan yang diharapkan dapat menjadi media pembelajaran juga bagi praktikan selain berbagai pengetahuan yang dipelajari di kampus. Pembelajaran praktik langsung dalam kehidupan masyarakat ini diharapkan dapat mengasah kompetensi pekerjaan sosial serta kepekaan dalam menangani permasalahan sosial serta mengembangkan dan mendayagunakan potensi dan sumber yang ada di sekitar komunitas. Praktikum ini dilaksanakan di salah satu Desa yang ada di Kabupaten Garut yaitu Desa Campaka, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut.

Praktikum Komunitas yang dilaksanakan di Desa Campaka, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut dengan kurun waktu 42 hari dari tanggal 31 Oktober -11 Desember 2022. Pada pelaksanaan kegiatan Praktikum Komunitas di Campaka, Praktikan telah melaksanakan tahap-tahap praktik pekerjaan sosial makro. Tahapan-tahapan intervensi makro antara lain meliputi tahap inisiasi sosial, pengorganisasian sosial, asesmen awal, asesmen lanjutan, perumusan rencana intervensi, pelaksanaan intervensi, evaluasi, terminasi dan rujukan. Dalam pelaksanaan Praktikum Komunitas praktikan melakukan upaya pengembangan masyarakat (*community development*) atau pengorganisasi masyarakat (*community organization*). Praktikan mengambil metode pengembangan masyarakat yang dilakukan pada proses Praktikum Komunitas di Desa Campaka.

Berdasarkan hasil dari kegiatan proses asesmen, diidentifikasi beberapa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan masalah lainnya seperti Akses KPM PKH terhadap peningkatan perekonomian keluarga, Pengelolaan sampah rumah tangga, Kebersertaan BPJS PBI, Pengelolaan Hidroponik oleh KWT, Tidak ada jalur evakuasi, dan Kurang pemahannya mitigasi atau siaga bencana yang kemudian praktikan melakukan intervensi sesuai dengan isu masalah yang sudah teridentifikasi. Praktikan mengambil isu sesuai dengan salah satu profil lulusan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yaitu Analisis Penataan

Lingkungan Sosiak. Berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan prioritas permasalahan terdapat pada Aspek Lingkungan. Praktikan memilih untuk mengangkat isu tentang lingkungan yang terjadi di salah satu Kampung di Desa Campaka dengan fokus masalah “Penumpukan sampah di Sungai dan lahan kosong RW 06 Kampung Salapinang”. Melihat dari permasalahan yang timbul yakni Desa Campaka mengalami peningkatan volume sampah sebagai akibat dari pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi yang meningkat. Hal ini memberikan tekanan tambahan terhadap sistem pengelolaan sampah yang ada dan memerlukan solusi inovatif. Desa Campaka memiliki potensi untuk menjadi model lingkungan yang bersih, sehat, dan peduli sampah. Dengan partisipasi aktif masyarakat dan dukungan berbagai pihak terkait, program ini diharapkan dapat menciptakan perubahan positif dalam cara sampah dikelola dan dipahami oleh masyarakat.

Selanjutnya, tahap asesmen dan rencana intervensi praktikan bersama Tim Kerja Masyarakat (TKM) sebagai *interest group* dan warga masyarakat sebagai *target group* telah menetapkan nama program untuk fokus permasalahan yang diangkat mengenai “Penumpukan sampah di Sungai dan lahan kosong RW 06 Kampung Salapinang” dan program yang disepakati yaitu “Cerdas memilah sampah menciptakan Lingkungan Peduli Sampah, Bersih, dan Sehat”. Berdasarkan hasil asesmen dan rencana intervensi, kemudian praktikan melaksanakan rencana intervensi yang telah disusun dan diketahui dengan kesepakatan oleh *interest group* dan *target group*. Terdapat beberapa bentuk kegiatan dari Program “Cerdas memilah sampah menciptakan Lingkungan Peduli Sampah, Bersih, dan Sehat” diantaranya: Penyuluhan optimalisasi peran Masyarakat dalam pengelolaan sampah dan *Workshop* pengelolaan sampah sebagai nilai guna ekonomi untuk Masyarakat. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik melalui perubahan perilaku masyarakat dan implementasi praktik pengelolaan sampah yang cerdas dan berkelanjutan.

Pelaksanaan intervensi berjalan sesuai dengan rancangan dan mendapatkan respon yang positif oleh Masyarakat melihat partisipasi Masyarakat yang aktif dalam mengikuti rangkaian acara kegiatan yang bertujuan dapat meminimalisir permasalahan sampah yang ada di Kampung Salapinang dan Masyarakat sadar akan pentingnya menjaga lingkungan terutama tidak membuang sampah di Sungai dan tidak membakar sampah di lahan kosong. Dengan kegiatan ini

diharapkan Masyarakat mampu memilah dan mengelola sampah sehingga sampah yang dihasilkan dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai guna dan nilai ekonomi yang dapat menambah pemasukan perekonomian Masyarakat. Kegiatan yang telah dilakukan mendapatkan respon baik oleh pemerintah desa. Pemerintah Desa langsung membuat proposal pengajuan membuat bak sampah TPS 3R di Desa Campaka. Praktikum Komunitas yang dilaksanakan oleh Praktikan di Desa Campaka, Kampung Salapinang RW 06 telah dilakukan dengan maksimal dan membawa perubahan serta manfaat bagi masyarakat. Dukungan dan keterbukaan masyarakat dan aparat desa juga sangat membantu proses Praktikum Komunitas.

6.2 Rekomendasi

Berakhirnya Praktikum Komunitas, praktikan memberikan rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses Program “Cerdas memilah sampah menciptakan Lingkungan Peduli Sampah, Bersih, dan Sehat”, berikut rekomendasi yang disampaikan :

6.2.1 Bagi Pemerintah Desa Campaka

- a. Meningkatkan efektivitas program ataupun kegiatan terkait pengolahan sampah sehingga manfaatnya dapat lebih maksimal dan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial di Desa Campaka.
- b. Pemerintah Desa dapat memfasilitasi warga dalam membentuk suatu organisasi atau komunitas yang berfokus pada kegiatan pengelolaan sampah dan pembuatan bank sampah unit.
- c. Bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, atau instansi kelembagaan terkait yang berkaitan dengan penanganan masalah Sampah. Berkenaan dengan intervensi praktikum III, pemerintah Desa Campaka diharapkan dapat mempererat koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Masyarakat.

6.2.2 Bagi Tim Kerja Masyarakat (TKM)

- a. Diharapkan program yang telah dirancang dapat terus dikembangkan bukan hanya dilakukan dan diterapkan kepada masyarakat RW 06 saja, namun dapat dilakukan juga di RW lainnya agar seluruh masyarakat Desa Campaka dapat memahami mengenai pengelolaan sampah yang baik.

- b. Mempererat rasa kekeluargaan dan kebersamaan antara TKM dan Masyarakat untuk mencengah dan mengentaskan permasalahan sampah yang ada di Desa Campaka terutama di Kampung Salapinang.

6.2.3 Bagi Masyarakat Desa Campaka

Bagi Masyarakat Desa Campaka hendaknya lebih memperhatikan lingkungan sekitar untuk tidak lagi membakar dan membuang sampah rumah tangganya secara sembarangan, memberikan dukungan dan motivasi untuk diri sendiri dalam hal kesadaran untuk menjaga lingkungan sendiri agar terhindar dari dampak sampah, dapat lebih memperhatikan mengenai pengelolaan sampah, dan dapat lebih antusias dalam menangani permasalahan sampah.

DAFTAR PUSTAKA

2021. Tugas *Green Social Work* Mengatasi Ketidaksetaraan Struktural dan Lingkungan yang Terdegradasi.
2020. Sosialisasi: Pengertian, Proses, Fungsi dan Tujuannya. Kompas.com.
2021. Masyarakat: Pengertian, Ciri-Ciri, dan Fungsi. Kompas.com.
- Admin. 2019. Jenis Jenis Sampah. Disperkimta.
- Admin. Struktur Organisasi Pemerintah Desa. Sukojember.com.
- Heni, Maha. 2016. PEKERJAAN SOSIAL KOMUNITAS.
- Maha, Yurika. 2017. Kajian Praktik Pekerjaan Sosial Makro (Teknik dan Model Pengembangan Masyarakat).
- Netting, F. Ellen, dkk. 2012. *Social Work Macro Practice*. Fifth Edition. Pearson
- Prasetyo, Donny dan Irwansyah. 2020. Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya. Volume 1, Issue 1.
- Prawiro, M. 2018. Pengertian Masyarakat: Ciri-ciri, Unsur, dan Macam-Macam Masyarakat.
- Ramdani, Jaka. 2020. INTERVENSI KOMUNITAS BERBASIS GREEN SOCIAL WORK. Vol.3 No. 2.
- Santoso, Meilanny Budiarti dan R. Nunung Nurwati. 2021. PERANAN PEKERJAAN SOSIAL DALAM MENANGANI PERMASALAHAN LINGKUNGAN. Sosio Informa Vol.7 No.2. Diakses melalui Pekerja Sosial dalam Lingkungan (KEMENSOS).pdf

Sumber lain:

Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina
Pemerintahan Desa Data Pokok Desa/ Kelurahan Tahun 2022

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina
Pemerintahan Desa Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Bulan
Januari Tahun 2022

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penerimaan Mahasiswa Praktikum



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG
Jalan Ir.H. Juanda Nomor 367 Bandung 40135 Telepon 022-2504838, 2501330
Faks. 022-2502962, website:www.poltekesos.ac.id, e-mail:humas@poltekesos.ac.id

Nomor : 2953/9.7/K.S.01.01/10/2023 Bandung, 30 Oktober 2023
Lampiran : Susunan Acara
Sifat : Penting
Hal : **Penerimaan Mahasiswa
Praktikan di Pendopo Bupati Garut**

Kepada :
Mahasiswa Praktikum Komunitas
Prodi Lindayasos
di
Tempat

Dalam rangka Penerimaan Mahasiswa Praktikum Komunitas Angkatan 2020 Prodi
Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Poltekesos Bandung di Pendopo Bupati
Garut ,seluruh mahasiswa wajib hadir pada :

Hari/ tanggal : Selasa/ 31 Oktober 2023
Waktu : 08.00 – 11.00 WIB.
Tempat : Pendopo Bupati Kab.Garut
Jl. Kiarasantang No. 2 Regol,
Kec. Garut Kota, Kabupaten Garut

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Ketua Prodi
Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial



Lina Favourita Sutiaputri, Ph.D

Catatan :
Pakaian : kemeja dengan jas almamater

Lampiran 2 Surat Undangan Kegiatan MPA



**KEPALA DESA CAMPAKA
KECAMATAN MALANGBONG
KABUPATEN GARUT**

Campaka, 06 November 2023

Nomor : 005/90-Desa/2023 Kepada
Lampiran : - Yth. Bapak / Ibu Warga Desa Campaka
Perihal : **Undangan Asesmen** di
Mahasiswa Poltekesos Tempat

Kepala Desa Campaka Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut, dengan ini mengundang perwakilan masyarakat Desa Campaka (terlampir) untuk hadir pada acara **Asesmen (Methodology of Participatory Assessment)** yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 08 November 2023
Jam : 08.00 WIB s/d selesai
Tempat : Aula Desa Campaka
Desa Campaka Kecamatan Malangbong

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan disampalikan kepada:

1. Yth Ketua RW (1-8)
2. Perwakilan PKK setiap RW (1 orang)
3. Perwakilan masyarakat setiap RW (1 orang)
4. Perwakilan Karang Taruna (1 orang)

Jln. Raya Malangbong – Tasik No.19 Desa Cinagara Kec. Malangbong
Kab Garut 44188

Lampiran 3 Surat Keiatan Intervensi

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DESA CAMPAKA – KECAMATAN MALANGBONG
RW 06

Campaka, 23 November 2023

Nomor : 001/Sund/Campaka/11/2023
Perihal : Undangan
Lampiran : -

Kepada Yth,
Bapak/Ibu RW 06
di Tempat

Dengan hormat,

Dengan ini kami memberitahukan kepada Masyarakat RW 06 akan dilaksanakan kegiatan Program penyuluhan dan workshop terkait dengan pengelolaan dan pengolahan sampah oleh komunitas Garut *Zero Waste*.

Melalui surat ini, kami mengundang bapak/ibu untuk menghadiri kegiatan yang akan dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Jun'at, 24 November 2023
Waktu : 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat : MI MA'RIF 2 MALANGBONG

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, besar harapan kami untuk kehadiran bapak/ibu dalam kegiatan ini. Atas perhatian dan Kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Ketua TKM

Nanan Suherman

Lampiran 4 Surat Undangan kegiatan Lokakarya



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
 BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENYULUHAN SOSIAL
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG
 Jalan Ir. H. Juanda Nomor 367 Bandung 40135 Telepon 022-2504838, 2501330
 Faks 022-2502962, website:www.poltekesos.ac.id, e-mail:humas@poltekesos.ac.id

Campaka, 06 Desember 2023

Nomor : 002/Sund/Poltekesos/12/2023
 Perihal : Undangan

Kepada Yth.

1. Kepala Desa dan Perangkat Desa
2. Tokoh Masyarakat
3. Ketua RT/RW
4. Kader PKK
5. Pendamping PKH Desa Campaka
6. Babinmas dan Babinsa Desa Campaka

di tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kegiatan praktikum komunitas di Desa Campaka, maka kami Mahasiswa Poltekesos Bandung akan melaksanakan kegiatan lokakarya dalam rangka pemaparan hasil intervensi yang sudah dilaksanakan praktikan di Desa Campaka.

Melalui surat ini, kami mengundang Bapak/Ibu sebagai perwakilan untuk menghadiri kegiatan yang akan dilaksanakan pada :

hari, tanggal : Jumat, 8 Desember 2023
 waktu : 08.00 s.d selesai
 tempat : Kantor Desa

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, besar harapan kami untuk kehadiran Bapak/Ibu dalam kegiatan ini. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Ketua Kelompok
 Praktikum Desa Campaka,

Vidella Setya

Mengetahui,
 Kepala Desa Campaka,

Ade Kamaludin

Lampiran 5 Matriks Kegiatan Praktikum

No	Tahapan	Aktivitas yang dilakukan	Waktu yang diperlukan
1.	Inisiasi Sosial		1 – 4 November
a.	Kontak Awal	Perkenalan dan meminta izin untuk praktikum kepada kepala desa melalui chat Whatsapp	27 Oktober
b.	Home Visit	Kunjungan dan pertemuan dengan tokoh masyarakat (Kepala Desa, RT/RW) dan pengumpulan profil desa	1 November
c.	Transect Walk	Pengenalan lingkungan sekitar	2 November
2.	Pengorganisasian Sosial		3 – 8 November
a.	Community Involvement	Menemui dan terlibat dalam kegiatan masyarakat dan organisasi masyarakat	3 – 8 November
3.	Asesmen		9 – 15 November
a.	Menggali dan mengenali masalah	Melakukan MPA	9 November
b.	Pendalaman permasalahan sebab-akibat	Menggambarkan pohon masalah	10 November
c.	Menganalisis sumber dan potensi	Melakukan MPA	11 November
4.	Perencanaan Intervensi		16 – 21 November
a.	Menyusun rencana kerja dengan <i>target group</i> dan <i>interest group</i>	Melakukan TOP	16 – 17 November
b.	Menyusun tim kerja dan membuat komitmen	Melakukan TOP	18 – 19 November
c.	Rapat koordinasi tim kerja	Melakukan konsultasi dan pengarahan kepada tim kerja	20 – 21 November
5.	Pelaksanaan Intervensi		22 Nov – 5 Des
a.	Mengaktifkan interaksi sosial	Mengadakan rapat dan menggali Kerjasama dengan pihak terkait	22 – 24 November

Lampiran 6 Daftar Hadir Supervisi

ABSENSI SUPERVISI
PRAKTIKUM KOMUNITAS DESA CAMPAKA
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG
TAHUN 2023

No.	Nama	SUPERVISI			
		I	II	III	IV
1.	Vidella Setya Kanti Utomo	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2.	Bernadette Faustina Quinn Nadwinda Nugroho	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3.	Gladys Lucky Salsabilla	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4.	Vebrianti Br Siregar	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5.	Alnugrah Fadhil Alamsyah	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6.	Mahmud	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Mengetahui,
 Dosen Pembimbing Kelompok 14,

Rosilawati, MPS.Sp

Lampiran 7 Daftar Hadir Lapangan

ABSENSI PRAKTIKUM KOMUNITAS
KELOMPOK 14 DESA CAMPAKA

Tanggal	Nama					
	Vidella	Bernadette	Gladys	Fadhil	Vebrianti	Mahmud
Okt 31	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
1	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
7	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
8	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
9	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
10	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
11	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
12	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
13	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
14	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
15	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
16	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
17	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
18	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
19	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
20	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
21	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
22	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
23	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
24	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
25	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

26	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
27	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
28	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
29	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
30	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Des 1	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
7	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
8	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
9	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Mengetahui,
 Dosen Pembimbing Kelompok 14,

Rosilawati, MPS.Sp

Lampiran 8 Instrumen Profil Komunitas

NO	Aspek	Pertanyaan
1.	Latar Belakang Desa	1. Bagaimana sejarah berdirinya Desa Campaka? 2. Seperti apa gambaran geografis dari Desa Campaka? 3. Bagaimana perkembangan masyarakat di Desa Campaka? 4. Bagaimana struktur organisasi Desa Campaka?
2.	Komponen Khusus dalam Masyarakat	1. Bagaimana kondisi demografis dari Desa Campaka? 2. Bagaimana tingkat ekonomi di Desa Campaka? 3. Bagaimana kondisi perumahan di Desa Campaka? 4. Bagaimana tingkat pendapatan penduduk Desa Campaka? 5. Bagaimana nilai budaya yang ada di Desa Campaka? 6. Bagaimana sistem pelayanan yang ada di Desa Campaka?
3.	Kehidupan interaksi sosial masyarakat	1. Bagaimana interaksi antara masyarakat Desa Campaka? dengan sesama nya? 2. Di Desa Campaka? kehidupan kerjasamanya bagaimana? 3. Bagaimana keeratn hubungan antara masyarakat Desa Campaka? 4. Apakah pernah ada konflik di Desa Campaka? 5. Bagaimana cara penanganan Konflik di Desa Campaka?
4.	Potensi dan Sumber	Apa saja potensi sumber kesejahteraan sosial yang ada di Desa Campaka?
5.	Permasalahan Sosial yang Utama	1. Apa saja permasalahan sosial yang ada di Desa Campaka? 2. Bagaimana ada upaya untuk pemecahan masalah sosial yang da di Desa Campaka? 3. Bagaimana hasil yang telah dicapai sehubungan dengan penyelesaian masalah yang telah dilakukan?

Lampiran 10 Skenario Asesmen Awal

**SKENARIO PERTEMUAN WARGA DALAM KEGIATAN ASESMEN AWAL
PRAKTIKUM KOMUNITAS POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL
BANDUNG DI DESA CAMPAKA KECAMATAN MALANGBONG
KABUPATEN GARUT**

1.	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan serta kebutuhan-kebutuhan, dan potensi target groups (kelompok sasaran yang potensial menjadi penerima manfaat upaya perubahan) b. Mengidentifikasi interest groups (kelompok – kelompok kepentingan) yang relevan dengan permasalahan target groups c. Mengidentifikasi potensi, sumber dan, kekuatan-kekuatan yang dapat dimanfaatkan baik yang berasal dari dalam dan luar komunitas. d. Menentukan prioritas permasalahan komunitas yang akan diintervensi
2.	Teknik	Methodology Assesment Partipatory (MPA)
3.	Partisipan	<ul style="list-style-type: none"> a. Aparat Desa b. Ketua RW c. Ketua RT d. Kader PKK e. Kader Posyandu f. Karang Taruna g. Praktikan
4.	Hari/Tanggal	Rabu, 8 November 2023
5.	Waktu	09.00 – 12.00 WIB
6.	Tempat	Aula Kantor Desa Campaka
7.	Langkah – Langkah Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembukaan oleh Praktikan b. Penyampaian Maksud dan Tujuan Praktikum c. Pemaparan tentang MPA d. Pemaparan tentang Profil Lulusan Poltekesos e. Melakukan tahapan MPA f. Penutupan oleh Praktikan g. Foto Bersama
8.	Alat yang Diperlukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kertas Plano b. Spidol c. meta card d. masking tape

Lampiran 11 Skenario Asesmen Lanjutan

Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggali informasi mengenai sebab dan akibat dari fokus masalah Tumpukan Sampah di Sungai dan Lahan Kosong Kampung Salapinang RW 06 2. Mengidentifikasi potensi, sumber, dan kekuatan yang dapat dimanfaatkan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar 3. Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk penyusunan rencana intervensi
Waktu	22 November 2023
Sasaran	Ketua RW 06, Kader PKK, Tokoh Pemuda, dan Para Ketua RT
Media	<i>Community Meeting</i>
Teknik	Analisis Pohon Masalah
Langkah Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan dan pengenalan diri oleh Praktikan 2. Menanyakan kesediaan partisipan untuk terlibat dalam kegiatan 3. Penjelasan mengenai Teknik pohon masalah 4. Tahapan proses pohon masalah 5. Penutupan oleh praktikan
Alat yang digunakan	<ul style="list-style-type: none"> • Kertas Plano • Spidol • meta card • masking tape

Lampiran 12 Skenario Rencana Intervensi

Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kegiatan untuk mengatasi permasalahan yang sudah menjadi fokus masalah 2. Menyusun nama program untuk melaksanakan rencana kegiatan intervensi 3. Membentuk Tim Kerja Masyarakat (TKM) 4. Mengatur waktu dan tempat untuk pelaksanaan kegiatan intervensi
Waktu	22 November 2023
Sasaran	Ketua RW 06, Kader PKK, Tokoh Pemuda, dan Para Ketua RT
Media	<i>Community Meeting</i>
Teknik	<i>Technology of Participatory (TOP)</i>
Langkah Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menanyakan Upaya apa yang pernah dilakukan sebelumnya untuk menangani permasalahan sampah 2. Menanyakan ide, saran atau gagasan untuk menangani permasalahan sampah 3. Membuat Nama Program 4. Membuat Kegiatan 5. Menentukan Sasaran 6. Menentukan Waktu Pelaksanaan 7. Membentuk TKM 8. Koordinator kegiatan
Alat yang digunakan	<ul style="list-style-type: none"> • Kertas Plano • Spidol • meta card • masking tape

Lampiran 17 Dokumentasi Kegiatan Praktikum 2023



Penerimaan Mahasiswa di Pendopo Kabupaten Garut



Penerimaan mahasiswa di Desa Campaka



Transect Walk Desa Campaka



Mengunjungi pengrajin sapu ijuk



Berdialog bersama Kepala Desa Campaka



mengikuti kegiatan Kelompok Wanita Tani (KWT)



Berdiskusi bersama dengan perangkat Desa Campaka



Praktikan melaksanakan kegiatan MPA



Praktikan melakukan *home visit* dan melakukan asesmen lanjutan dengan melakukan wawancara bersama Ketua RW 06



Praktikan melakukan observasi lokasi permasalahan



Praktikan melakukan tahap perencanaan intervensi



Kegiatan pelaksanaan intervensi



Masyarakat antusias dalam kegiatan workshop



Praktikan ikut dilibatkan dalam pembagian bansos beras

Praktikan ikut dilibatkan dalam pembagian bansos pangan kepada stunting beras



Praktikan melakukan asesmen terintegrasi terhadap CPM Warmindo



Kegiatan Supervisi Lembaga pertama, praktikan sebagai MC



Kegiatan supervisi oleh dosen pembimbing



Kegiatan mengikuti pengajian bulanan Desa Campaka



Kegiatan Supervisi Lembaga pertama, praktikan sebagai MC



Kegiatan supervisi oleh dosen pembimbing



Ngeliwet bareng bersama Ibu kader PKK



Kegiatan terminasi yaitu lokakarya bersama perangkat desa dan stakeholder terkait

Mengikuti kegiatan KWT



Praktikan menyusun laporan praktikum komunitas ke Kabupaten



Pelepasan praktikan di Pendopo Kabupaten Garut



Penyerahan bantuan usaha gerobak Warmindo kepada KPM